



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Seri Perencanaan Partisipatif

Peran Media dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Bahan Pelatihan dan Pendampingan



RPJPD

RPJMD
Renstra SKPD

RKPD
Renja SKPD

KUA
PPAS
RKA

Local Governance Support Program

DAFTAR ISI

BAGIAN I: RPJPD

Apa itu RPJPD
Landasan Hukum RPJPD
Prinsip-prinsip Penyusunan RPJPD
Keluaran Utama RPJPD
Indikator Kualitas RPJPD
Kerangka Analisis RPJPD
Alur Proses Penyusunan RPJPD
Step by step Penyusunan RPJPD
Template dan Handout
Daftar Peristilahan dan Singkatan

- P 1 Orientasi perencanaan daerah
- P 2 Pembentukan tim penyusun RPJPD
- P 3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
- P 4 Pengumpulan data dan informasi
- P 5 Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
- P 6 Identifikasi stakeholder
- P 7 Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
- P 11 Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
- P 12 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJPD
- P 13 Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
- P 14 Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
- P 15 Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
- P 16 Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
- P 17 FGDs Profil Daerah Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
- P 18 Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
- P 19 Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
- P 20 FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
- P 21 Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD
- P 22 Musrenbang RPJPD
- P 23 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
- P 24 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
- P 25 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD
- P 31 Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan

RPJPD

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH)

**BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN
BAGI MEDIA**



BAGIAN I

Tentang LGSP



L GSP (Local Governance Support Program) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah merupakan program peningkatan kapasitas (2005-2009) yang didanai oleh United Agency for International Development (USAID). Program ini bertujuan memperkenalkan tata pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di beberapa provinsi terpilih di Indonesia. Prakarsa dan program LGSP ditujukan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah mitra, organisasi kemasyarakatan, dan media yang mencakup bidang perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan dan mobilisasi sumber daya, serta tata pemerintahan yang partisipatif. Sampai dengan September 2009, LGSP akan bekerja dengan lebih dari 55 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Irian Jaya Barat.

Pengantar



Bahan pelatihan dan pendampingan ini disusun oleh LGSP USAID dengan tujuan untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih baik tentang esensi RPJPD sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah.

Bahan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu media dalam memahami RPJPD sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan dokumen RPJPD, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

APA ITU RPJPD?

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

LANDASAN HUKUM

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJPD

KELUARAN UTAMA RPJPD

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

INDIKATOR KUALITAS RPJPD

Karena dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, maka kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan dan perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan akan turut menentukan kualitas rencana daerah dibawahnya.

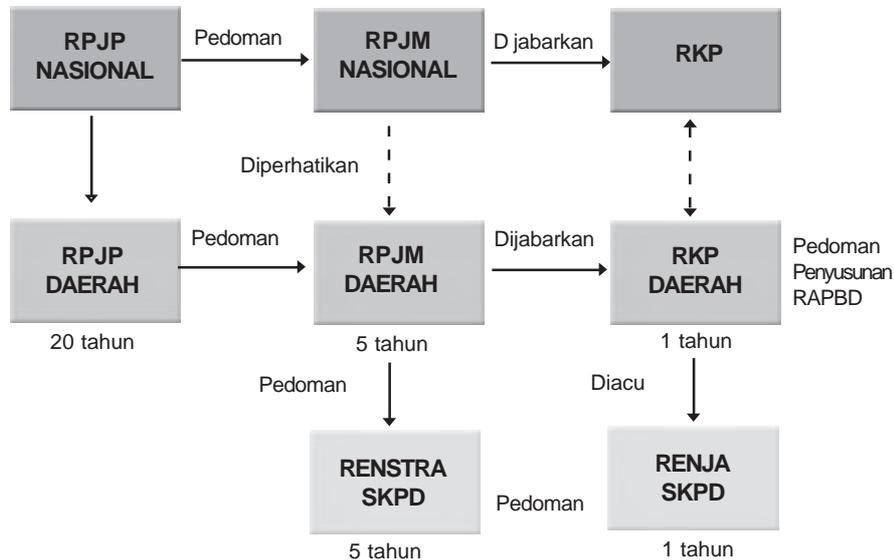
BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJPD

RPJPD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJPD

HANDOUT PENDUKUNG

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT UU 25/2004



Dalam konteks ini, RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin.

Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan **stakeholder untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati ARAH perjalanan (Road Map) pembangunan daerah masa depan yang perlu ditempuh**; untuk itu proses penyusunan dokumen RPJPD perlu membangun **komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJPD** melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

APA ITU RPJPD?

Sebagai dokumen resmi perencanaan daerah yang strategis, RPJPD perlu disusun berdasarkan *performance planning* sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana daerah 5 (lima) tahunan yaitu RPJMD.

Ada 3 (tiga) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RPJPD di era desentralisasi ini, yaitu:

LANDASAN HUKUM

- **Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**
- **Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah**
- **SE Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota**

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJPD

Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang muatan dokumen RPJPD (visi, misi, arah, dan strategi pembangunan daerah jangka panjang), tahapan proses penyusunan RPJPD, waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD, peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk menyiapkan RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD dan mengacu pada RPJP Nasional, dan status hukum RPJPD.

KELUARAN UTAMA RPJPD

Undang-Undang No 32/2004 mengemukakan jangka waktu perencanaan RPJPD yaitu 20 tahun, dan muatan dokumen RPJPD (visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional) dan; status hukum RPJPD sebagai Peraturan Daerah.

INDIKATOR KUALITAS RPJPD

SE Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota mengatur tata cara penyusunan RPJPD, muatan pokok RPJPD, dan tata cara pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJPD

Pada saat ini, yang sedang dalam proses pengesahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 32/2004 dan Undang-Undang No 25/2004. Diharapkan PP ini akan dapat memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah dan **memberikan panduan yang lebih menyeluruh untuk penyusunan rencana daerah.**

STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJPD

HANDOUT PENDUKUNG

APA ITU RPJPD?

Sejalan dengan Undang-Undang No 25/2004, maka penyusunan RPJPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Teknokratis (Strategis)
- Demokratis dan partisipatif
- Politis
- Perencanaan Bottom- Up
- Perencanaan Top- Down

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJPD

Strategis

Dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses merumuskan apa tantangan dan peluang pembangunan daerah masa depan; menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

KELUARAN UTAMA RPJPD

Alur pemikiran strategis (strategic thinking process) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

- Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas
- Ada kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini
- Ada analisis trend atau kecenderungan perkembangan faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah seperti fisik, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi
- Ada analisis tentang kekuatan dan kelemahan internal dan peluang dan ancaman eksternal pembangunan daerah
- Ada rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah yang SMART
- Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, reliable, time bound)
- Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
- Ada rumusan **arah** kebijakan untuk masing-masing strategi
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
- Ada instrumen, metodologi, pendekatan (seperti scenario planning) yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan

INDIKATOR KUALITAS RPJPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJPD

HANDOUT PENDUKUNG

Demokratis dan Partisipatif

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stake-

holder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan
- Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder dalam pengambilan keputusan
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal dan lembaga penelitian/ perguruan tinggi
- Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap RPJPD
- Ada pelibatan dari media
- Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka panjang

Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan RPJPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:

- Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD
- Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD
- Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJPD
- Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD
- Ada review, saran, dan masukan Gubernur Provinsi berkaitan terhadap rancangan RPJPD
- Ada pembahasan terhadap RANPERDA RPJPD
- Ada pengesahan RPJPD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam dua puluh tahun ke depan

Bottom-up

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:

- Ada penjangkaran aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya
- Memperhatikan hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah

Top down

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- Ada sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RTRWD Provinsi
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD

- Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb

Tujuan Utama / Goals MDG

Dalam MDG ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber : Millennium Development Goals reports : an assessment UNDP

APA ITU
RPJPD?

Adapun keluaran utama yang diharapkan dari hasil proses penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut:

LANDASAN
HUKUM

Hasil Proses Strategis

- Profil Daerah berisikan status, posisi, dan kedudukan daerah masa kini dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 20 tahun ke depan
- Dokumen RPJPD yang telah disahkan berisikan visi, misi dan arah (strategi) pembangunan daerah jangka panjang (20 tahun ke depan)

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJPD

Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif

- Naskah Kesepakatan Stakeholder dalam Konsultasi Publik pada tahapan penting perencanaan dan Musrenbang RPJPD yang berisikan konsensus dan kesepakatan terhadap prioritas isu daerah jangka panjang, rumusan visi, misi, tujuan, arah, strategi dan kebijakan pembangunan daerah dalam masa 20 tahun ke depan.

**KELUARAN
UTAMA RPJPD**

Hasil Proses Politis

- Hasil konsultasi dengan Gubernur Provinsi berkaitan
- Naskah Akademis Ranperda RPJPD
- Perda RPJPD

INDIKATOR
KUALITAS RPJPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJPD

HANDOUT
PENDUKUNG

APA ITU RPJPD?

Perencanaan jangka panjang 20 tahun akan sangat banyak dipengaruhi oleh banyak ketidakpastian atau yang tidak dapat diprediksi. Kualitas dokumen RPJPD akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan membaca dan mengeksplorasi kecenderungan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Untuk ini pendekatan perencanaan strategis berbasis *scenario planning* sangatlah diperlukan dalam penyusunan RPJPD.

LANDASAN HUKUM

Pengertian Perencanaan Strategis Berbasis *Scenario Planning*

Perencanaan strategis berbasis *scenario planning* adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan, dan tindakan diberbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis berbasis *scenario* perlu melibatkan stakeholders untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan diantara strategi tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJPD

KELUARAN UTAMA RPJPD

Perencanaan strategis berbasis skenario menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya; **mencoba memetakan arah perjalanan pembangunan daerah**; apa yang hendak dicapai pada masa **dua puluh tahun mendatang**; bagaimana **tahapan** mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

INDIKATOR KUALITAS RPJPD

Esensi Perencanaan Strategis Berbasis *Scenario Planning*

- Ada pemahaman atas kondisi dan status pencapaian kinerja pembangunan daerah masa kini
- Ada identifikasi dan analisis atas kekuatan, kelemahan internal masa kini, dan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi pada masa mendatang
- Ada identifikasi dan eksplorasi kemungkinan kecenderungan perkembangan faktor-faktor eksternal sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan teknologi yang berpengaruh pada pembangunan daerah
- Ada rumusan pengembangan alternatif **scenario (perkiraan apa yang akan terjadi di masa depan) dan perkiraan seberapa jauh atau seberapa signifikan pengaruhnya pada pembangunan daerah**
- Ada **rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran** pembangunan jangka panjang yang SMART untuk merespon skenario yang dirumuskan.
- Ada rumusan **strategi dan arah kebijakan** pembangunan daerah jangka panjang yang dapat lebih dipahami oleh masyarakat; dengan demikian membangun *'sense of ownership'* dari rencana yang dibuat
- Menyediakan dasar (benchmark) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan
- Merumuskan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJPD

HANDOUT PENDUKUNG

Elemen-Elemen Penting Perencanaan Strategis Berbasis Scenario Planning

- Analisis situasi dan kinerja pembangunan daerah masa kini
- Identifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah masa kini
- Eksplorasi kecenderungan, perubahan-perubahan besar yang diperkirakan terjadi dalam ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi yang berpengaruh pada pembangunan daerah
- Penulisan alternatif skenario faktor-faktor pendorong perubahan (seperti ekonomi, politik, social, lingkungan dan teknologi) masa depan
- Analisis dampak perubahan masa depan terhadap pembangunan daerah
- Perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk merespon dampak perubahan yang diperkirakan akan terjadi

Syarat Keberhasilan Perencanaan Strategis

- Mengikut sertakan stakeholders yang tepat dalam proses perencanaan
- Mengkomunikasikan rencana dengan bahasa yang mudah dimengerti
- Tujuan (goals) dan sasaran (objectives) rencana mesti realistis dan SMARTER (specific, measurable, acceptable, realistic, time frame, extending and rewarding)
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
- Menggunakan instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat untuk mendukung proses perencanaan

Kualitas RPJPD

Berdasarkan pendekatan perencanaan strategis berbasis scenario planning tersebut di atas, kualitas RPJPD dapat diukur dari hal-hal dibawah ini:

- Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
- Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini
- Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini
- Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan faktor- faktor eksternal di masa depan
- Ada **pendekatan** dan rumusan skenario (**apa yang diantisipasi terjadi**) perkembangan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada pembangunan daerah di masa depan
- Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan daerah
- Ada rumusan **visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah** yang merespon tantangan dan mengoptimasikan peluang masa depan
- Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan dan lembaga penelitian (dan perguruan tinggi) dalam semua tahapan proses penyusunan RPJPD
- Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh **fasilitator yang kompeten dalam scenario planning dalam jaring aspirasi isu dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD**

APA ITU
RPJPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJPD

KELUARAN
UTAMA RPJPD

INDIKATOR
KUALITAS
RPJPD

**KERANGKA
ANALISI
RPJPD**

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJPD

HANDOUT
PENDUKUNG

RPJPD dalam Kerangka PERMENDAGRI 13/2006

Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJPD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RPJMD, RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD, serta APBD.

Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJPD adalah menggunakan pembahagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai dasar analisis. **Ini untuk memastikan bahwa RPJPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada rencana strategis jangka menengah serta rencana dan penganggaran tahunan.**

Adapun fungsi pemerintahan daerah meliputi:

- **Pelayanan Umum**
- **Ketertiban dan Keamanan**
- **Ekonomi**
- **Lingkungan Hidup**
- **Perumahan dan Fasilitas Umum**
- **Kesehatan**
- **Pariwisata dan Budaya**
- **Pendidikan**
- **Perlindungan Sosial**

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Wajib

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20. Pemerintahan Umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Sumber: Lampiran A I Permendagri No 13/2006

Untuk kepentingan diatas, perlu dipahami adanya table-tabel utama dari PERMENDAGRI 13/2006 **tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang merupakan kerangka utama bagi penyusunan RPJPD:

- Lampiran A.1 tentang Kode dan Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran A.V tentang Kode dan Klasifikasi Fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Lampiran A.VI tentang Pembagian Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah

Pengembangan Tolok Ukur Kinerja Pembangunan Daerah

Untuk mengembangkan analisis pembangunan daerah yang berkelanjutan, adalah penting bagi RPJPD untuk mengembangkan tolok ukur kinerja untuk masing-masing fungsi tersebut di atas **yang dapat menggambarkan dimana posisi dan kedudukan daerah saat ini dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas; fungsi-fungsi mana daerah pada saat ini masih mengalami masalah; fungsi-fungsi mana yang perlu dikembangkan dan diperbaiki; seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh untuk menuju penyelenggaraan fungsi yang optimal.**

Pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang mencakup semua fungsi di atas akan memperlihatkan secara jelas sejauh mana 'sistem pembangunan daerah' hubungan antara komponen-komponen fisik, lingkungan sosial, ekonomi telah terjalin baik; dapat mendeteksi segera apabila terdapat permasalahan dan dapat dirumuskan pemecahannya.

Pengembangan tolok ukur kinerja dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan dicapai dalam masa lima tahun kedepan dari penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut diatas.

Kriteria dalam pengembangan tolok ukur kinerja:

- Relevan
- Mudah dipahami
- *Reliable*
- Informasi mudah diakses
- Menunjukkan perspektif jangka menengah dan panjang
- Berhubungan dengan isu pembangunan daerah
- Menunjukkan hubungan antara komponen pembangunan daerah

Beberapa rujukan dalam pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang telah dikembangkan oleh Bappenas:

- **Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah**
- **Indeks Pembangunan Daerah**
- **Indikator Kemajuan Otonomi Daerah**
- **Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan Daerah**

Dalam kaitan di atas, RPJPD perlu mengembangkan:

- Tolok ukur kinerja (5- 7) untuk masing-masing fungsi tersebut di atas yang dapat mencerminkan kemajuan pencapaian penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut secara berkelanjutan.
- Posisi dan kedudukan daerah pada saat ini dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas
- Posisi dan kedudukan daerah yang diharapkan pada masa depan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas
- Analisis SWOT untuk menggambarkan secara lebih rinci kedudukan internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) daerah dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi tersebut di atas
- Visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun kedepan.

APA ITU
RPJPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJPD

KELUARAN
UTAMA RPJPD

INDIKATOR
KUALITAS
RPJPD

KERANGKA
ANALISI
RPJPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Bagan 1 memperlihatkan alur proses penyusunan RPJPD yang dikembangkan oleh LGSP-USAID, yang mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan di sini yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJPD yang terpadu.

Alur Proses Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi **organisasi masyarakat sipil** (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Perda RPJPD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

**APA ITU
RPJPD?****LANDASAN
HUKUM****PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJPD****KELUARAN
UTAMA RPJPD****INDIKATOR
KUALITAS
RPJPD****KERANGKA
ANALISI
RPJPD****BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJPD****STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJPD****HANDOUT
PENDUKUNG****Tahap Persiapan**

- P1 Orientasi perencanaan daerah
- P2 Pembentukan tim penyusun RPJPD
- P3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
- P6 Identifikasi stakeholder
- P7 Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
- P8 Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJPD
- P9 Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJPD
- P10 Surat Perintah KepDa kepada GS & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJPD
- P11 Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
- P11 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan
- P12 Musrenbang RPJPD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

- P4 Pengumpulan data dan informasi
- P5 Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
- P13 Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
- P14 Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
- P15 Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi
- P16 Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
- P17 FGDs Profil Daerah Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka Panjang
- P18 Penetapan isu strategis dan draft visi-misi
- P19 Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang
- P20 FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
- P21 Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah

- P22 Musrenbang RPJPD
- P23 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah

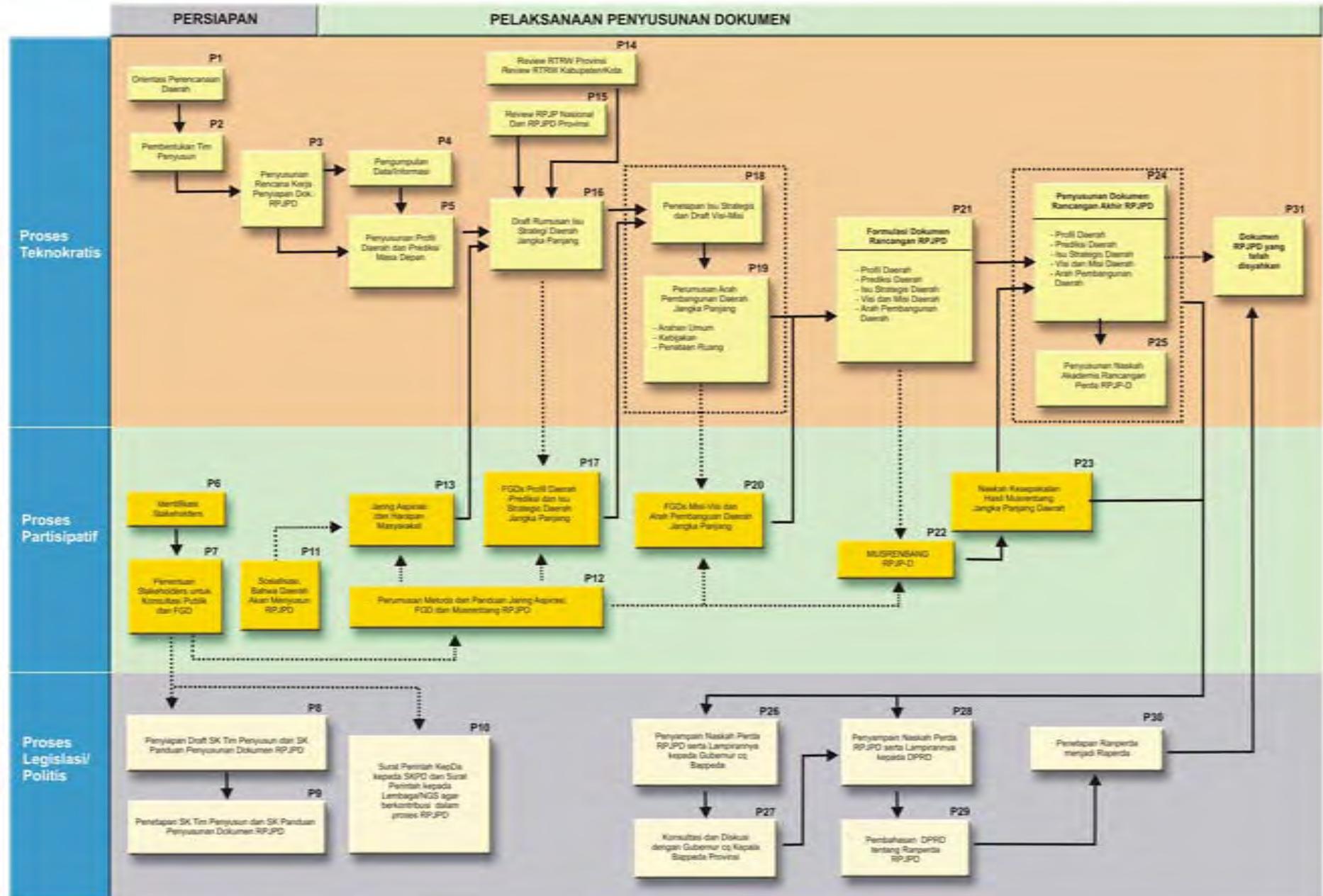
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah

- P24 Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
- P25 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah

- P26 Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Gubernur cq Bappeda
- P27 Konsultasi dan Diskusi dgn Gubernur cq Kepala Bappeda Provinsi
- P28 Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
- P29 Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
- P30 Penetapan Ranperda menjadi PERDA
- P31 Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan

TOPIK	TEMPLATE DAN HANDOUT
<p>APA ITU RPJPD?</p>	<p>Bahan Pelatihan dan Pendampingan ini didukung dengan TEMPLATE dan penjelasan ringkas (hand out) tambahan tentang hal-hal penting dalam setiap tahapan penyusunan RPJPD.</p>
<p>LANDASAN HUKUM</p>	<p>Handout yang dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Orientasi Kerangka Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah 2) Millennium Development Goals 3) Prinsip-prinsip Good Governance 4) Fasilitasi dan Rekrutmen Fasilitator
<p>PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJPD</p>	<p>Permasalahan Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</p>
<p>KELUARAN UTAMA RPJPD</p>	
<p>INDIKATOR KUALITAS RPJPD</p>	
<p>KERANGKA ANALISI RPJPD</p>	
<p>BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJPD</p>	
<p>STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJPD</p>	
<p>HANDOUT PENDUKUNG</p>	



Keterangan P = Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RPJPD

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan sosialisasi/lokakarya tentang ketentuan sistem perencanaan daerah bagi calon anggota tim penyusun dokumen perencanaan daerah, khususnya untuk RPJP Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Tujuan kegiatan ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan penyusunan RPJPD 2) Mengetahui substansi dokumen RPJPD menjadi kewajiban daerah serta saling keterkaitan antar dokumen daerah 3) Mengetahui peran dan fungsi setiap kelompok pemangku kepentingan dalam proses perencanaan RPJPD
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami ketentuan peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan 2) Mengetahui substansi pokok dan prinsip-prinsip dasar untuk setiap dokumen perencanaan daerah 3) Tim RPJPD memahami dan memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen RPJPD dan proses partisipatif yang harus dilakukan.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta lokakarya/sosialisasi orientasi perencanaan daerah adalah staf daerah yang dicalonkan menjadi anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen serta para pengambil keputusan di daerah • Di luar staf Pemda, dalam orientasi perlu juga melibatkan peserta yang berasal dari non pemerintah, seperti Perguruan Tinggi setempat, serta organisasi masyarakat dan LSM yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan daerah.



Unsur media perlu terlibat/dilibatkan dalam kegiatan orientasi perencanaan RPJPD, agar memperoleh pemahaman secara umum tentang:

- Jenis-jenis dokumen perencanaan daerah dan hirarki dokumen perencanaan, khususnya terkait RPJPD.
- Payung hukum dan perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- Substansi/muatan pokok dari dokumen RPJPD.
- Keterkaitan dokumen RPJPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah, maupun dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
- Proses penyusunan RPJPD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, serta kemungkinan pengkayaan dalam rangka meningkatkan proses yang lebih partisipatif dan lebih akuntabel.
- Identifikasi tahapan proses penyusunan RPJPD yang membutuhkan kontribusi media dalam rangka meningkatkan kinerja.

Tujuan	<p>Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan informasi awal bagi seluruh pemangku kepentingan daerah tentang rencana daerah untuk menyusun RPJPD; mensosialisasikan proses, prosedur, dan mekanisme penyusunan RPJPD; menyampaikan isu dan perspektif yang terkait dengan penyusunan RPJPD; mendapatkan partisipasi seluruh stakeholder yang relevan; menyepakati jumlah dan jadwal konsultasi publik/FGD yang akan dilakukan.</p> <p>Kegiatan ini dilakukan agar seluruh stakeholder dapat mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan RPJPD.</p>
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Disepakatinya proses dan mekanisme penyusunan RPJPD 2) Jumlah dan jadwal konsultasi publik/FGD yang disepakati
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder yang relevan, termasuk kelompok marjinal dan kelompok masyarakat dengan kerawanan sosial tinggi. 2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah.



Untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya, khususnya dalam rangka penyusunan RPJPD, maka media dapat memberikan kontribusi penting dengan cara:

- Menginformasikan melalui media bahwa Pemda berencana menyusun RPJPD dan menyampaikan harapan Pemda kepada masyarakat agar pada waktunya dapat berkontribusi.
- Mendorong masyarakat agar berpartisipasi dan mencermati proses dan substansi rencana, baik melalui ulasan pers ataupun opini.

Tujuan	Menghimpun isu yang dihadapi dan harapan seluruh stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jangka panjang. Ini ditujukan untuk mendapatkan informasi terkini atas berbagai isu yang dihadapi dan harapan seluruh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jangka panjang
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rumusan permasalahan/isu yang dihadapi masyarakat 2) Rumusan harapan masyarakat
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1) Partisipatif dan interaktif; proses penjaringan ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi 2) Cepat dan mendasar; tahap ini dimaksudkan untuk menstrukturkan informasi yang diterima untuk mendukung tahap perumusan isu strategis 3) Open-ended; informasi yang diterima bersifat dapat dikembangkan, diperluas, dan dimutakhirkan sehingga kualitas informasi tsb dapat terus diperbaiki. 4) Sensitif gender; sedapat mungkin, informasi yang diperoleh dalam tahap ini dipilah berdasarkan gender 5) Menyeluruh; rumusan isu dan harapan tsb disajikan dalam format dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat

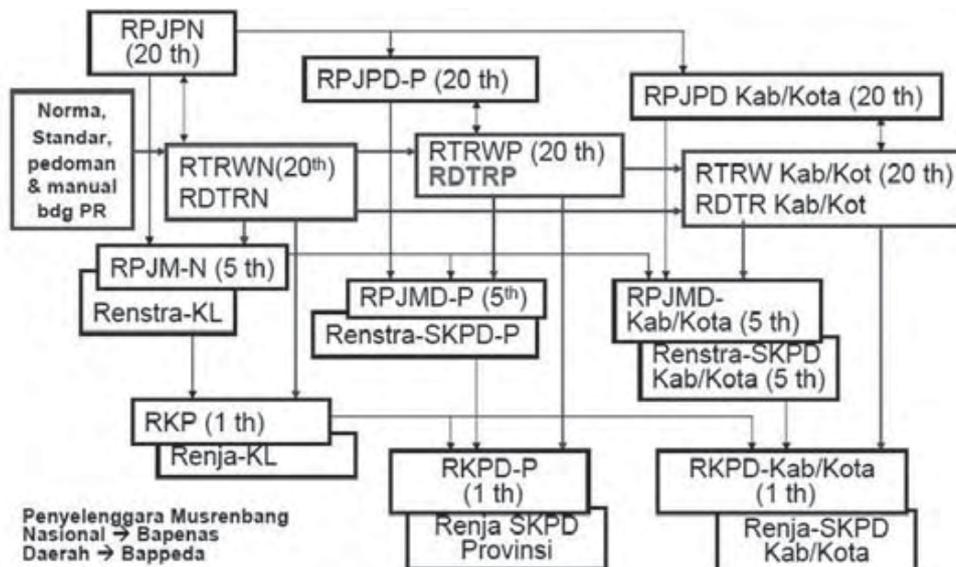


Pada tahapan kegiatan jaring aspirasi dan harapan masyarakat, media dapat berperan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca jaring pendapat.

- Pada tahap persiapan, unsur media diharapkan berperan dalam mensosialisasikan rencana dan agenda Pemda untuk melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka RPJPD.
- Pada tahap pelaksanaan jaring aspirasi, media dapat juga bekerjasama dengan Pemda sebagai salah satu sarana/mediasi untuk mengumpulkan pendapat masyarakat melalui penyebaran kuisisioner (pooling pendapat).
- Mempublikasikan proses pelaksanaan jaring aspirasi beserta hasil yang diperoleh diantaranya berkaitan dengan isu strategis dan harapan masyarakat tentang arah pembangunan daerahnya untuk masa jangka panjang.
- Memberikan evaluasi dan komentar atas hasil jaring aspirasi dikaitkan dengan isu dan permasalahan pembangunan daerah

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji arahan pembangunan daerah untuk perencanaan jangka panjang daerah dikaitkan dengan kebijakan tata ruang kabupaten/kota. Kegiatan ini ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terformulasikan arah kebijakan pembangunan tata ruang daerah/kota untuk jangka panjang maupun jangka menengah • Teridentifikasi potensi-potensi pengembangan ruang yang merupakan bagian penting dalam penentuan arah pembangunan daerah. • Supaya arahan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan kebijakan tata ruang
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil identifikasi arahan kebijakan pengembangan ruang terbangun beserta kinerja pencapaiannya • Arah pengembangan fungsi-fungsi kegiatan daerah/kota serta penempatan pusat-pusat kegiatan menurut periode perencanaan
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pengembangan ruang dan arahan fungsi daerah tergambar secara jelas • Prioritas pembangunan ruang beserta fungsinya menurut RTRW kabupaten/kota tergambar secara jelas. • Perbandingan antara rencana dengan pencapaian kinerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya teridentifikasi

KAITAN RTRW DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Sumber: Penataan Ruang Wilayah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Ananto Yudono)

Tujuan	<p>Mengkaji arah kebijakan pembangunan baik dalam lingkup nasional, maupun dalam lingkup regional provinsi yang berkaitan dengan daerah yang akan menyusun RPJPD. Secara spesifik bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengetahui kebijakan nasional dan regional berkaitan dengan arahan peran dan fungsi daerah perencanaan.• Mengetahui arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi yang akan berdampak terhadap pembangunan daerah perencanaan.• Mengetahui hal-hal prinsip yang harus dijadikan acuan dalam menentukan visi, misi serta arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka panjang.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Visi, misi dan arah pembangunan nasional dan provinsi• Kedudukan, peran dan fungsi daerah perencanaan dalam kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Titik berat kajian review pada aspek kebijakan yang terkait dengan peran dan fungsi daerah perencanaan, serta prioritas program yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang berdampak terhadap daerah perencanaan.



Media dapat juga berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan jangka panjang di daerahnya, dengan cara :

- Menginformasikan hasil kajian RPJP Nasional, RPJP Prov, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota serta dampaknya terhadap daerah yang direncanakan.
- Mensosialisasikan visi, misi dan program utama pusat/provinsi untuk periode jangka panjang.
- Pokok-pokok kebijakan/rencana/program pembangunan nasional dan provinsi terhadap daerah perencanaan dan peluang masa depan daerah.
- Menanggapi dan mengomentari hasil kajian dokumen terkait

Perumusan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan perumusan profil, jaring aspirasi masyarakat, serta kajian terhadap perencanaan yang skalanya lebih luas. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memformulasikan rumusan isu strategis daerah dalam skala waktu jangka panjang sebagai masukan untuk menentukan arah pembangunan daerah.

Tujuan	Profil Kinerja Pembangunan Daerah masa kini selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi isu-isu di daerah sebagai masukan dalam menentukan fokus pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang, serta arah dan prioritas pembangunan serta pentahapan pembangunan jangka panjang daerah.
Keluaran	<p>Rancangan rumusan isu strategis terkait pembangunan jangka panjang perlu diorganisasikan kedalam klassifikasi fungsi pemerintahan daerah. Isu pembangunan daerah dapat berkaitan dengan aspek- aspek dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan dan pengembangan daya saing ekonomi daerah • Hambatan-hambatan dalam investasi dan penanaman modal • Ekonomi biaya tinggi • Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan ruang terbangun' • Kerusakan sumberdaya alam • Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam • Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran • Konflik-konflik sosial • Pelayanan publik • Hambatan penyelenggaraan otonomi daerah dan • Pemekaran wilayah
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan secara jelas permasalahan strategis yang memerlukan penanganan segera dan potensi pembangunan daerah strategis yang berdampak jangka panjang atau membutuhkan kesinambungan pengembangan jangka panjang.



Pada tahapan ini, media diharapkan berkontribusi dalam :

- Menginformasikan hasil rumusan isu strategis kepada masyarakat umum agar dikritisi dan diberi masukan.
- Menanggapi hasil rumusan isu strategis daerah dan mengkaitkannya dengan hasil jaring aspirasi pada tahap sebelumnya

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyepakati laporan profil daerah dan draft rumusan isu strategis daerah jangka panjang; merumuskan skenario perkembangan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi dan implikasinya pada penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah; merumuskan rancangan visi dan misi daerah jangka panjang untuk merespon skenario masa depan.

Tujuan	Mendapatkan kesepakatan stakeholder atas profil daerah, isu strategis daerah, dan rumusan visi-misi dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Profil daerah yang telah disepakati • Isu strategis daerah jangka panjang yang disepakati • Skenario perkembangan faktor eksternal pembangunan daerah • Rancangan visi-misi pembangunan jangka panjang
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipatif dan interaktif; proses ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi • Singkat dan Padat; penyampaian draft laporan profil dan isu strategis perlu ringkas, padat dan memberikan tinjauan yang fokus atas issues dan permasalahan yang dikemukakan • Open-ended; informasi yang diterima bersifat dapat dikembangkan, diperluas, dan dimutakhirkan sehingga kualitas informasi tsb dapat terus diperbaiki. • Sensitif gender; sedapat mungkin, tahap ini mempertimbangkan dan memenuhi secara seimbang kebutuhan laki-laki dan perempuan • Menyeluruh; rumusan profil, isu, dan visi-misi yang disepakati disajikan dalam format dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat



Pada tahapan ini, peran media:

- Terlibat dalam diskusi-diskusi FGD pada setiap topik bahasan yang menyangkut profil daerah (lingkungan hidup, sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, aksesibilitas, dan sebagainya), prediksi masa depan, serta isu-isu strategis
- Memberikan informasi tentang isu pembangunan daerah terkait
- Mensosialisasikan proses dan hasil pembahasan FGD-FGD kepada masyarakat.
- Media dapat pula mengevaluasi, memberikan komentar, kritik atau mengemukakan opini terkait topik bahasan. Hal yang perlu dicermati antara lain adalah:
 - Apakah profil daerah sudah menggambarkan kondisi nyata di lapangan?
 - Apakah prediksinya sudah mempertimbangkan kondisi internal dan kondisi eksternal secara komprehensif?
 - Apakah isu yang diangkat sudah menggambarkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

SCENARIO PLANNING DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJPD KOTA KEDIRI 2007-2026

Scenario Planning:

- Sesuatu yang kita perkirakan terjadi
- Sesuatu yang kita inginkan terjadi
- Sesuatu yang mungkin terjadi

Nilai Penting Scenario Planning

Menghindarkan siapapun dari keterkejutan karena telah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan

Elemen Utama Scenario Planning

- Penafsiran masa kini
- Citra masa depan
- Konsistensi secara internal dalam pemaparan titian-titian dari masa kini ke masa depan

Tiga Tahap Proses Scenario Planning

- Persiapan
- Pengembangan
- Tindak lanjut dari scenario ke strategi

Tantangan dalam Scenario Planning adalah: *melahirkan nilai bersama*

Prinsip-prinsip Proses Dialog

- Kesetaraan dalam kebebasan (*equality in freedom*)
- Kerendahan hati untuk saling mendengarkan dan berbicara
- Kepekaan dalam menangkap yang tidak tersirat dan tidak terucapkan
- Mendengarkan dengan sikap dan aktif
- Toleransi
- Kesiediaan untuk belajar dari sesama
- Membangun *trust* dan *respect*, membuka diri, dan menghindari dari permusuhan dan kemarahan

Peran Fasilitator

- Mencermati dan mengelola proses
- Memberi umpan balik
- Mengarahkan kekuatan kelompok mencapai tujuan bersama
- Mengusulkan proses atau metode alternatif
- Memberikan perlindungan kepada setiap peserta agar pribadi dan pikiran mereka tidak mengalami serangan dari peserta lain
- Mendorong semua peserta berpartisipasi

Prinsip Fasilitator

- Mengkritisi intensi-intensi sendiri
- Menyadari keseluruhan proses
- Membangun pemahaman bersama
- Menjaga keseimbangan antara advokasi dan inquiry

Tugas Partisipan

- Terlibat dalam seluruh proses dan tahapan
- Memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan prinsip-prinsip dialog

Proses I: PERSIAPAN

Penyusunan *Focal Concern* (pusat kepedulian yang harus dinyatakan secara spesifik, jelas, mempertimbangkan audience, dan mengandung maksud yang relevan)

Proses II: PENGEMBANGAN

- Partisipan merumuskan kekuatan-kekuatan yang tampaknya terpenting atau paling tidak pasti
- Dari *Driving Force* (kekuatan kunci yang dianggap mendorong atau memperlemah) ke Kerangka Skenario.

Lima Kategori Driving Force

- SOSIAL
- TEKNOLOGI
- LINGKUNGAN
- EKONOMI
- POLITIK

Tiga Tahap Proses Perumusan DRIVING FORCE

- Selama 15 menit peserta memikirkan tentang driving force yang mempengaruhi focal concern
- Menuliskan dalam kertas meta-plan, dipresentasikan, dan dilakukan pengelompokan driving force
- Kelompok membahas penyebab di balik sebab beserta implikasinya dan memikirkan "yang tak terpikirkan" dilanjutkan dengan analisis

Proses Analisis

- Gunakan kata benda untuk memilih nama variabel
- Gunakan tanda panah untuk menunjukkan hubungan kausalitas

- Nyatakan secara eksplisit konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang

Proses Prioritisasi

Kelompok menetapkan prioritas dengan meranking berdasarkan driving forces yang penting sekaligus tidak pasti/menyimpang. Caranya

- Membobot driving force
- Mendaftar 10 besar driving force

Proses Pengembangan

Pengembangan kerangka skenario dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengkritik identifikasi focal concern dan penetapan driving forces

Proses Penyegaran Wawasan

Kelompok menyegarkan wawasan untuk menguji validitas eksternal pemikiran mereka dan memasukkan unsur-unsur tak terduga ke dalam proses dengan cara riset, wawancara, dan konsultasi

Proses Prioritisasi Driving Forces

Kelompok menyusun prioritas driving forces dengan pendekatan deduktif dan/atau induktif

Proses Final

Menghidupkan skenario-skenario untuk menunjukkan ketidakpastian-ketidakpastian utama yang berinteraksi dalam tiap skenario sehingga mudah dikenal, mudah diingat, dan dikenang kembali

Ciri Penting dalam Scenario Planning

- Mempesona
- Alur peristiwa mengalir logis
- Ada belokan-belokan tak terduga
- Memberi pencerahan

Tindak Lanjut

- Laporan tertulis
- Presentasi dan pameran
- Artikel dan brosur
- Pementasan
- Lokakarya
- Video

Sumber: Materi Fasilitasi Penyusunan Scenario Planning Kota Kediri (PUSDAKOTA, UNIVERSITAS SURABAYA)

SKENARIO I – BANDAR KERTARAHARJA

Kepastian Hukum Konsisten dan Pertumbuhan Ekonomi Dinamis

Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya kebersamaan • Partisipasi tinggi, masyarakat melakukan kontrol pada penyelenggaraan tata kelola kota • SDM berkualitas tinggi, seluruh warga minimal mengenyam pendidikan 9 tahun, bahkan mayoritas berpendidikan tinggi • Masyarakat memiliki etos kerja • Masyarakat kritis dan cerdas • Kenyamanan dalam kehidupan sosial budaya (maju berkelanjutan)
Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan • Teknologi terakses oleh semua penduduk, sehingga arus informasi terdistribusi secara merata • Teknologi yang tersedia memudahkan proses produksi
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi tinggi • Jaminan kesejahteraan (kesehatan dan pendidikan) • Angka kemiskinan dan pengangguran rendah • Dari tahun ke tahun investasi meningkat • Dunia usaha/industri berkembang • Masyarakat merasa nyaman, ekonomi mudah dicari, ada jaminan keamanan bagi pelaku ekonomi • PAD besar dengan pengembalian kepada penduduk dengan proporsi yang berimbang berupa program yang berkelanjutan
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya mesin pengolah sampah yang dilindungi perda • Lingkungan kota bersih • Hutan kota terjaga kelestariannya • Sungai Brantas dan sumber daya air lainnya terjaga kelestariannya
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum ditegakkan dengan sebenar-benarnya • Pemerintah kota sangat peduli dengan memproduksi banyak perda • Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai keinginan masyarakat • Masyarakat mulai dapat menterjemahkan demokrasi lewat putusan di tingkat RT/RW • Partai berkompetisi secara sehat • Birokrasi memberikan pelayanan publik secara profesional. Tiga pilar pemerintahan: eksekutif, legislatif, yudikatif, bekerja secara bahu membahu berlandaskan hukum untuk memberikan pelayanan terbaik

Sumber: Scenario Planning RPJPD Kota Kediri 2005-2025

SKENARIO III: BANDAR TAK BERTUAN

Kepastian Hukum Inkonsisten dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Sosial	<ul style="list-style-type: none">▪ Banyak terjadi perilaku menyimpang (anarkhis)▪ Ragu-ragu untuk melangkah
Teknologi	<ul style="list-style-type: none">▪ Teknologi bertumbuh pesat tetapi tidak ada perlindungan hukum bagi penciptanya▪ Tidak ada perlindungan HAKI▪ Kesalahan tata ruang (perencanaan dan pelaksanaan RTRW)
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">▪ Terjadinya kesenjangan/ tidak ada pemerataan sehingga muncul kantong-kantong kemiskinan kota▪ Melebarnya ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat▪ Munculnya kesenjangan sosial berakibat gangguan keamanan dan kemiskinan akut▪ Meskipun ekonomi mudah dicari tapi tidak ada kepastian hukum, pelaku ekonomi merasa was-was▪ Banyak berdiri pusat perbelanjaan serta industri yang padat karya namun ternyata tidak imbang dengan sistem pengujian yang layak sesuai ketentuan pemerintah tentang UMR, kenyataan yang dikerjakan adalah gaji mereka tetap dibawah UMR.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">▪ Kerusakan lingkungan
Politik	<ul style="list-style-type: none">▪ Stabilitas terganggu▪ Pembangunan yang tidak berkelanjutan▪ Terjadi banyak konspirasi dan KKN

Sumber: Scenario Planning RPJPD Kota Kediri 2005-2025

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menetapkan isu strategis daerah jangka panjang dan merumuskan VISI, MISI pembangunan daerah sebagai jawaban terhadap tantangan dan peluang yang diperkirakan terjadi (skenario perkembangan politik, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, prasarana dan saran).

Tujuan

Mendapatkan kepastian isu strategis apa yang disepakati untuk diangkat dan menjadikan arah fokus pembangunan untuk jangka panjang, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan visi, misi serta agenda pembangunan daerah.

Keluaran

- Rumusan isu-isu strategis yang **diorganisasikan sesuai klasifikasi fungsi- fungsi pemerintahan daerah** dan diperkirakan akan menghambat perwujudan “good governance” dan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan:

Ekonomi

- Pertumbuhan dan pengembangan daya saing ekonomi daerah
- Hambatan-hambatan dalam investasi dan penanaman modal
- Ekonomi biaya tinggi

Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

- Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan ruang terbangun
- Kerusakan sumberdaya alam
- Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam

Perlindungan Sosial

- Tantangan ketagakerjaan dan pengangguran
- Konflik-konflik sosial

Pelayanan Umum

- Pelayanan publik
- Hambatan penyelenggaraan otonomi daerah dan
- Pemekaran wilayah

- Rancangan rumusan visi daerah jangka panjang
- Rancangan rumusan misi daerah jangka panjang
- Penetapan isu strategis didasarkan atas pertimbangan matang setelah mensinergikan hasil kajian dari aspek politis, teknokratis, partisipatif, top-down, dan bottom-up.
- Rancangan visi daerah jangka panjang perlu lebih tegas, jelas arahnya, ringkas, realistis dan aplikatif, serta mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang menjadi isu strategis daerah.
- Rumusan misi harus mempunyai keterkaitan jelas dengan pencapaian visi.

Visi yang benar memenuhi syarat sbb:

- Mengemukakan secara jelas kemana arah yang dituju
- Mudah dibaca dan dipahami
- merefleksikan ‘spirit’ dari pemerintah daerah
- Masyarakat dapat ‘mengisi’ dan memberikan ‘kontribusi’
- Sifatnya ‘kompak’ dapat mempedomani pengambilan keputusan
- Mendapatkan perhatian masyarakat
- Dapat dirasakan apabila mendengarkan
- Memberikan pemahaman tentang posisi tujuan individu dalam tujuan bersama
- Memberikan ‘motivating force’
- Memberikan tantangan untuk mencapainya

Perumusan misi perlu menjawab:

Siapa kita? Apa tujuan kita?

Masalah utama apa yang kita perlu tangani?

Apa yang membuat kita unik atau ‘distinct’ sebagai pemerintah daerah atau organisasi?

Nilai-nilai utama (core values) apa yang akan memandu kita mencapai misi?



Pada tahapan ini, peran media :

- Membantu mengkonfirmasi hasil-hasil rumusan Tim kepada masyarakat umum mengenai penetapan isu strategis dan rancangan rumusan visi-misi daerah untuk pembangunan jangka panjang agar diketahui dan dikritisi.
- Mengkritisi hasil rumusan dikaitkan dengan kondisi nyata lapangan atau hasil opini/kajian media sendiri.
- Mengawal agar substansi RPJPD mengandung muatan visi, misi, dan

arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi daerah, berorientasi kepentingan umum dan pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan dan marginal, serta mempertimbangan tujuan pembangunan global (Millennium Development Goals).

SKENARIO II: BANDAR TAK BERPERAHU

Kepastian Hukum Konsisten dan Pertumbuhan Ekonomi Statis

Sosial	<ul style="list-style-type: none">Orang-orang licik dan culas tidak mampu merebut sumber daya, karena kekuatan penegakan hukumMasyarakat saling tolong-menolong untuk bersama-sama keluar dari keterpurukan"Kami boleh miskin, tetapi kami hidup damai dan amanHubungan kekerabatan sangat erat
Teknologi	<ul style="list-style-type: none">Teknologi mengalami "kemandegan" karena tidak ada sumber daya untuk pengembangannyaDengan keterbatasan sumber daya teknologi dan muatan yang dibawanya menjadi tidak terakses oleh sebagian besar warga kotaTeknologi ditinggalkan dan semua kembali ke alam
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">Masyarakat tidak butuh investasi, yang penting damaiSebagian besar penghuni kota Kediri adalah orang-orang yang sudah pensiun, ingin hidup tenang, dan tidak lagi mengejar kebutuhan duniawiPengangguran di mana-mana, sedangkan kesempatan kerja sangat terbatas, sehingga banyak orang muda memilih pindah ke kota lainSumber daya tanah sudah sangat terbatas untuk usaha pertanian atau usaha yang lainJumlah orang miskin meningkatMasyarakat cenderung bertahan (subsisten) karena serba terbatas.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">Lingkungan tetap terjaga karena usaha-usaha untuk menjarahnya terhambat oleh penegakan hukum yang konsistenKota Kediri hijau, segar, dan rapi
Politik	<ul style="list-style-type: none">Birokrasi masih memberikan pelayanan profesional dengan kesadaran untuk mengangkat masyarakat dari krisis.Hubungan harmonis terjadi antar elemen masyarakat: pemerintah, legislatif, dan masyarakatKelompok politis tertentu yang tamak tidak mampu menguasai kebijakan-kebijakan karena ada kontrol masyarakat dan kepatuhan hukum

SKENARIO III: BANDAR TAK BERTUAN

Kepastian Hukum Inkonsisten dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Sosial	<ul style="list-style-type: none">Banyak terjadi perilaku menyimpang (anarkhis)Ragu-ragu untuk melangkah
Teknologi	<ul style="list-style-type: none">Teknologi bertumbuh pesat tetapi tidak ada perlindungan hukum bagi penciptanyaTidak ada perlindungan HAKIKesalahan tata ruang (perencanaan dan pelaksanaan RTRW)
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">Terjadinya kesenjangan/ tidak ada pemerataan sehingga muncul kantong-kantong kemiskinan kotaMelebarnya ketidakmerataan kesejahteraan masyarakatMunculnya kesenjangan sosial berakibat gangguan keamanan dan kemiskinan akutMeskipun ekonomi mudah dicari tapi tidak ada kepastian hukum, pelaku ekonomi merasa was-wasBanyak berdiri pusat perbelanjaan serta industri yang padat karya namun ternyata tidakimbang dengan sistem pengujian yang layak sesuai ketentuan pemerintah tentang UMR, kenyataan yang dikerjakan adalah gaji mereka tetap dibawah UMR.
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">Kerusakan lingkungan
Politik	<ul style="list-style-type: none">Stabilitas tergangguPembangunan yang tidak berkelanjutanTerjadi banyak konspirasi dan KKN

Sumber: Scenario Planning RPJPD Kota Kediri 2005-2025

Tujuan	Melakukan pembahasan atas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang disusun oleh Tim Penyusun RPJPD. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan substansi utama Rancangan Awal RPJPD (visi, misi, dan arah pembangunan) berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan visi dan misi daerah• Rancangan arah pembangunan daerah jangka panjang
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Partisipatif dan interaktif; proses ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi• Singkat dan Padat; penyampaian draft laporan profil dan isu strategis sebagai dasar pertimbangan perumusan visi, misi, dan arah pembangunan perlu ringkas, padat dan memberikan tinjauan yang ocus atas isu dan permasalahan yang dikemukakan• Open-ended; informasi yang diterima bersifat dapat dikembangkan, diperluas, dan dimutakhirkan sehingga kualitas informasi tsb dapat terus diperbaiki.• Sensitif gender; sedapat mungkin, tahap ini mempertimbangkan dan memenuhi secara seimbang kebutuhan laki-laki dan perempuan• Menyeluruh; rumusan visi-misi dan arah pembangunan yang disepakati disajikan dalam format dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat



Media diharapkan ikut aktif terlibat di dalam pembahasan-pembahasan kelompok diskusi terfokus (FGD) untuk mengawal, mengkaji, dan merumuskan bersama alternatif visi-misi dan arah pembangunan jangka panjang yang memperhatikan hasil jaring pendapat, khususnya dalam rangka perumusan visi-misi serta arah pembangunan jangka panjang daerah, sekaligus mensosialisasikan hasil-hasilnya untuk diketahui masyarakat.

Tujuan	Sesuai UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan RPJPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan kegiatan ini dengan tujuan membahas rancangan RPJP Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan. Hasil Musrenbang dijadikan masukan bagi penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
Keluaran	Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah, menjadi rancangan akhir RPJP Daerah
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none">1. Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder yang relevan untuk mengidentifikasi kepedulian mereka, menunjukkan posisinya, dan memutuskan peran dan kontribusinya2. Proses berkelanjutan: bukan merupakan proses yang berhenti pada waktu Musrenbang saja, melainkan tahapan ini akan ditindaklanjuti dengan keterlibatan CSO dalam tahapan pengawalan, implementasi, pengendalian dan evaluasi rencana.3. Demand Driven: Musrenbang perlu difasilitasi dan dipandu oleh fasilitator yang kompeten untuk menghasilkan keluaran yang nyata dan menstrukturkan pembahasan sedemikian rupa sehingga kondusif bagi peserta untuk menyampaikan masalah dan pendapatnya4. Merespon terhadap kebutuhan: berorientasi pada hasil yang konkrit atas kebutuhan multi stakeholder berdasarkan diskusi dan negosiasi di antara peserta.5. Kerjasama: merupakan wadah yang memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. Di samping itu, wadah ini juga mendorong pemahaman bersama tentang isu dan membangun konsensus.6. Konsensus: mendorong pemahaman yang lebih baik atas perbedaan perspektif dan kepentingan, memfasilitasi pemahaman bersama dan berbagi kepentingan, serta membangun kemandirian untuk bekerjasama mencari pemecahan masalah.



Dalam kegiatan musrenbang RPJPD, unsur media dapat berkontribusi sejak tahap persiapan hingga pasca pelaksanaan, yaitu dengan cara mensosialisasikan rencana Pemda untuk melaksanakan musrenbang, terlibat aktif dalam proses musrenbang, serta mempublikasikan hasil-hasil pelaksanaan musrenbang RPJPD.

Tujuan	Kegiatan ini ditujukan sebagai (1) pernyataan konsensus peserta atas materi pembahasan dalam Musrenbang RPJPD dan komitmen peserta untuk terus mendukung tahapan berikutnya; (2) sebagai berita acara untuk menformalkan secara eksplisit hasil-hasil kesepakatan atas rumusan prioritas isu strategis daerah, visi dan misi pembangunan jangka panjang, serta arah pembangunan daerah jangka panjang; (3) sebagai alat pemantauan atas pelaksanaan komitmen yang telah disepakati baik komitmen teknis, sumber daya dan dana, termasuk kesepakatan untuk bekerja sama dalam kerangka partisipatif
Keluaran	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none">1. komunikatif dan inklusif- naskah kesepakatan akan memfasilitasi komunikasi semua pihak dengan membuat eksplisit pandangan dan interest yang berbeda dan proses negosiasi sehingga menghasilkan kesepakatan2. dinamis- naskah kesepakatan bersifat dinamis, merupakan instrumen penting perencanaan berorientasi tindakan dan hasil. Merupakan pernyataan resmi atas hasil-hasil suatu proses partisipasi, sifatnya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam implementasinya3. komitmen- mengemukakan secara jelas dan eksplisit tujuan-tujuan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolaboratif4. saling melengkapi- naskah kesepakatan yang dirumuskan secara partisipatif ini akan memberikan parameter (nilai tambah) baru bagi daerah dalam pelaksanaan <i>'good local governance'</i>



Pada tahapan ini, peran media diharapkan dapat menyebarkan hasil-hasil kesepakatan musrenbang RPJPD kepada masyarakat untuk diketahui dan meningkatkan kepedulian masyarakat.

Tujuan	Membahas naskah /rancangan Perda tentang dokumen RPJPD.
Keluaran	Rancangan Perda yang telah disahkan setelah mengakomodasi masukan dari DPRD.



Media berperan untuk mengawal hasil-hasil kesepakatan masyarakat serta mendorong agar kebijakan-kebijakan daerah berorientasi pada kepentingan umum. Untuk itu, maka pada tahap pembahasan rancangan oleh DPRD, media dapat berkontribusi dalam :

- Memantau pelaksanaan pembahasan DPRD terhadap Rancangan Akhir RPJPD.
- Melaporkan jalannya persidangan pembahasan Ranperda RPJPD
- Mencatat dan mengkritisi perubahan-perubahan substansial oleh DPRD atas isi Rancangan Akhir RPJPD
- Mempublikasikan/memberikan komentar/opini terhadap hasil pembahasan DPRD.



Pada tahapan ini, media diharapkan dapat menyebarluaskan informasi agar diketahui dan menjadi perhatian masyarakat, dengan cara :

- Mensosialisasikan substansi pokok dokumen RPJPD serta status legalitas dokumen kepada masyarakat.
- Memberikan opini tentang kewajiban dan/atau partisipasi yang dapat dilakukan oleh berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan RPJPD

HANDOUT

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS: APAKAH ITU?

Pengantar

Pada tahun 2000, awal pergantian zaman dari abad 20 ke abad 21 yang disebut era milenium, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia mengikuti Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan bertujuan mendiskusikan berbagai permasalahan yang terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa, serta penegakan hak asasi dan kerjasama internasional untuk memajukan bangsa dengan target dan indikator yang jelas. Pertemuan ini berhasil mengadopsi Deklarasi Mileenium, yang berisi komitmen untuk menjawab berbagai tantangan di era milenium, menetapkan langkah konkrit melalui tujuan, itarget dan indikator yang ditetapkan dari tahun 1990 sampai tahun 2015.

Tujuan Utama / Goals MDG

Dalam MDG ditetapkan delapan tujuan utama (*goal*) yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Kedelapan tujuan utama MDGs ini sebenarnya telah menjadi arahan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang selanjutnya tercantum dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), lengkap dengan indikator kinerjanya yang akan dicapai dalam kurun waktu yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa delapan permasalahan utama tersebut dirasakan oleh hampir seluruh negara.

Target dan Indikator Kinerja

Masing-masing tujuan utama mempunyai target dan indikator kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan hidup bangsa yang ditetapkan dari tahun 1999 sampai 2015. Target dan indikator masing-masing tujuan utama tersebut adalah:

1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan

Target (1) tinggal 50 persen proporsi penduduk dengan penghasilan dibawah 1 dolar sehari.

Indikator:

- ❖ Proporsi penduduk dibawah 1 dollar sehari
- ❖ Ratio kesenjangan kemiskinan
- ❖ Persebaran kuantil orang miskin dalam konsumsi nasional

Target (2) Antara tahun 1990–2015 proporsi penduduk kelaparan tinggal separuhnya.

Indikator:

- ❖ Prevalensi balita kurang berat badan
- ❖ Proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan konsumsi.

2. Meningkatkan pendidikan dasar
Target (3) menjamin semua anak, *laki-laki dan perempuan* dimanapun berada mampu menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Indikator:

- ❖ Ratio partisipasi di sekolah dasar
- ❖ Proporsi murid kelas 1 mencapai kelas 5
- ❖ Tingkat melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun

3. Promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Target (4) memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolah menengah pada tahun 2005 dan pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.

- Indikator:
- ❖ Ratio perempuan terhadap laki-laki di sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah menengah atas.
 - ❖ Ratio perempuan melek huruf terhadap laki-laki usia 15-24 tahun.
 - ❖ Kontribusi perempuan dalam angkatan kerja di luar sektor pertanian.
 - ❖ Proporsi perempuan yang duduk di parlemen.
4. Penurunan angka kematian anak
Target (5) menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 1990-2015.
- Indikator:
- ❖ Tingkat kematian anak di bawah lima tahun
 - ❖ Tingkat kematian bayi
 - ❖ Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi campak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
Target (6): menurunkan dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 1990- 2015.
- Indikator:
- ❖ Ratio kematian ibu
 - ❖ Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
Target (7): pada tahun 2015 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS.
- Indikator:
- ❖ Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun.
 - ❖ Tingkat prevalensi kontrasepsi
 - ❖ Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS
- Target (8)**: tahun 2015 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya.
- Indikator:
- ❖ Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria
 - ❖ Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan.
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Target (9): mengintegrasikan prinsip-prinsip pengembangan lingkungan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara dan mencegah kerusakan sumber-sumber alam.
- Indikator :
- ❖ Proporsi luas hutan
 - ❖ Wilayah cagar alam
 - ❖ Efisiensi penggunaan energi
 - ❖ Emisi karbondioksida.
- Target (10)**: pada tahun 2015 proporsi penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air minum sehat menurun 50 persen.
- Indikator :
- ❖ Proporsi penduduk yang mempunyai akses berlanjut terhadap sumber air yang memadai.
- Target (11)**: pada tahun 2020, 100 juta penghuni daerah kumuh mengalami peningkatan taraf hidup yang bermakna.
- Indikator :
- ❖ Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap sanitasi yang memadai.
 - ❖ Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap pemukiman
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan
Target (12): Pengembangan sistem perdagangan bebas, berdasar aturan, dapat diramalkan serta tidak diskriminatif dan sistem keuangan, termasuk kesepakatan mengenai pemerintahan yang bersih, pembangunan dan pengentasan kemiskinan baik nasional maupun internasional.

Target (13): perhatian kepada kebutuhan negara-negara berkembang di kepulauan, termasuk tarif dan akses terhadap kuota ekspor negara berkembang dan miskin.

Target (14): memperhatikan kebutuhan khusus negara landlocked dan negara kepulauan

Target (15): kesepakatan terhadap masalah hutang negara berkembang melalui standard nasional dan internasional untuk ditangguhkan masa pengembaliannya.

Indikator:

- ❖ Subsidi pertanian domestik dan ekspor di negara

Target (16): kerjasama dengan negara berkembang dan negara maju untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pemuda.

Indikator:

- ❖ Tingkat pengangguran kelompok umur 15-24 tahun

Target (17): Kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat bagi negara sedang berkembang.

Indikator:

- ❖ Proporsi penduduk yang mempunyai akses terhadap obat yang dibutuhkan secara berkesinambungan

Target (18): Kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan teknologi baru terutama informasi dan komunikasi.

Indikator:

- ❖ Saluran telepon per 1000 penduduk
- ❖ Komputer per 1000 penduduk

Penutup

Tujuan utama, target dan indikator dalam Millenium Development Goals ini dapat dikatakan merupakan penjabaran lebih rinci dari hasil kesepakatan *International Conference for Population and Development* di Kairo tahun 1994 dan hasil Konferensi Wanita tahun 1995 di Beijing. Hal ini menunjukkan bahwa semua permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang khususnya, menjadi perhatian dunia dan semua negara berusaha bekerjasama untuk mengatasinya menuju masyarakat dunia yang sejahtera.

Sumber: Millennium Development Goals reports: an assessment UNDP

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Prinsip-prinsip utama 'good governance' terdiri dari:

- *Sustainability*
- *Subsidiarity*
- *Equity*
- *Efficiency*
- *Transparency and Accountability*
- *Civic Engagement and Citizenship*
- *Security*

Sustainability

Prinsip **Sustainability** dapat diartikan dengan: terdapatnya keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk masa sekarang dan generasi masa mendatang. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen yang jelas dan kuat terhadap usaha pengurangan kemiskinan. Para Pimpinan pada semua segmen masyarakat perlu memiliki visi jangka panjang dan strategi untuk pembangunan berkelanjutan dan mampu mengorganisir segenap sumber daya dan dana dan kepentingan untuk tujuan bersama yang lebih baik

Beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan antara lain:

- Melakukan konsultasi dengan stakeholders untuk menyepakati visi dan misi strategis daerah melalui perencanaan strategis secara partisipatif
- Melakukan proses konsultasi untuk perencanaan lingkungan dan manajemen dari penggunaan sumber daya secara lebih berhati-hati dengan memperhitungkan dampak negatifnya untuk generasi mendatang
- Mengintegrasikan pengurangan kemiskinan ke dalam perencanaan daerah
- Melestarikan historical dan cultural heritage
- Memastikan kemampuan keuangan untuk mempromosikan kegiatan ekonomi melalui partisipasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi daerah
- Promosi transfer teknologi

Subsidiarity

Prinsip **Subsidiarity** dapat diartikan dengan: pendelegasian kewenangan dan sumber daya ke tingkatan yang terdekat dengan penyediaan pelayanan, konsisten dengan prinsip pelayanan yang efisien dan efektivitas pembiayaan (cost effective). Hal ini akan mengoptimalkan potensi keterlibatan masyarakat dalam proses 'governance' pelayanan. Desentralisasi dan demokratisasi lokal akan memperbaiki tingkat responsivitas (responsiveness) kebijakan dan usaha penyediaan pelayanan yang memenuhi keinginan masyarakat.

Beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan antara lain:

- Pengembangan kerangka pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan umum dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat kecamatan/kelurahan/desa
- Peraturan daerah yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam masalah-masalah penyediaan pelayanan umum untuk meningkatkan 'responsiveness' pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat
- Transfer dana yang transparan dan pemberian dukungan pengembangan kapasitas adminsitratif, teknis dan manajemen pada tingkat kecamatan/kelurahan

Equity

Prinsip **equity** berkaitan dengan akses kepada pengambilan keputusan dan 'basis necessities' (kebutuhan dasar) kehidupan. Pria dan wanita memiliki akses yang sama dalam partisipasi pengambilan keputusan, penetapan prioritas dan proses alokasi sumber daya. Daerah yang baik adalah yang memberikan kesempatan kepada semua baik yang miskin, remaja atau lanjut usia (lansia), kelompok minoritas, cacat, dengan akses yang sama terhadap penyediaan nutrisi, pendidikan, kesempatan

kerja, perawatan kesehatan, perumahan, penyediaan air bersih, sanitasi dan lain-lain pelayanan dasar.

Beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan antara lain:

- Memastikan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama kepada pengambilan keputusan, sumber daya, pelayanan dasar (melalui gender disaggregated data)
- Mengembangkan kuota untuk perwakilan perempuan dalam pemerintahan daerah dan memberikan peluang untuk mencapai posisi/jabatan tinggi dalam pemerintahan daerah
- Memastikan kebijakan ekonomi mendorong sektor informal
- Mempromosikan kepastian pemilikan lahan (security land tenure (land and property))
- Menghilangkan semua hambatan dalam urusan pelayanan umum dan keuangan
- Menciptakan kerangka regulasi daerah yang 'fair' dan 'predictable'

Efficiency

Prinsip **efficiency** dalam Good Governance dapat diartikan dengan: mengutamakan prinsip efisiensi dalam penyediaan pelayanan umum dan dalam mempromosikan pengembangan ekonomi lokal. Daerah perlu mengelola keuangannya dengan baik dan cost effective juga dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dan belanja; administrasi pelayanan umum berbasis 'competitiveness', keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam perekonomian daerah.

Beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyediaan dan regulasi pelayanan umum melalui kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil
- Mempromosikan 'user pay principles' yang adil untuk pelayanan Pemerintah Daerah dan infrastruktur
- Mempromosikan 'management contracts'
- Mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan antar sektor
- Efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan pendapatan daerah
- Penghilangan hambatan-hambatan dalam pengurusan pelayanan

Transparency and Accountability

Prinsip **Transparansi dan Akuntabilitas** dalam Good Governance dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya. Prinsip ini merupakan hal terpenting dalam good governance. Korupsi perlu diberantas karena dapat mengurangi kredibilitas pemerintah daerah dan memperparah kemiskinan penduduk. Transparansi dan akuntabilitas adalah penting untuk stakeholders memahami pemerintahan daerah dan mengetahui bagaimana, apa, dan siapa penerima manfaat dari pengambilan keputusan pemerintah daerah. Perundangan dan kebijakan publik mestilah transparan. Pimpinan daerah perlu memperlihatkan standard integritas professional dan pribadi yang tinggi. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan antara lain:

- Mendorong konsultasi publik untuk masalah-masalah berkaitan dengan keuangan daerah melalui mekanisme participatory budgeting; tender dan prosedur pengadaan (procurement) yang transparan
- Penggunaan 'integrity pacts' dan monitoring mekanisme pengadaan
- Internal dan external audit untuk laporan keuangan tahunan dan didiseminasikan ke publik untuk dibahas
- Penerapan kebijakan bersifat disinsentif, untuk mencegah tindakan korupsi
- Penghilangan hambatan dalam pengurusan perizinan
- Simplifikasi sistem retribusi dan pajak daerah
- Mengembangkan 'code of conduct'/tata tertib
- Mengembangkan standar akuntabilitas dan penyediaan pelayanan seperti ISO
- Menciptakan mekanisme umpan balik (feedback) seperti ombudsman, hotlines, prosedur penyampaian complain, citizen report cards
- Mempromosikan hak Publik untuk mengakses informasi pemerintahan daerah
- Akses bagi investor terhadap informasi pemerintahan daerah

Civic Engagement and Citizenship

Prinsip Civic Engagement and Citizensip dapat dilakukan dengan beberapa tindakan praktis seperti:

- Mempromosikan demokratisasi lokal melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan
- Pengembangan regulasi yang memungkinkan masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara efektif dalam komite perencanaan di berbagai peringkat pemerintah daerah
- Pembentukan 'city watch' groups
- Mempromosikan mekanisme public hearing ataupun citizen forum

Security

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan keamanan. Kekurang keamanan akan meningkatkan marginalisasi kelompok masyarakat miskin. Daerah perlu menghindarkan conflict dan disasters dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pencegahan konflik dan pencegahan bencana alam.

Beberapa tindakan praktis yang dapat dilakukan:

- Menciptakan iklim damai dan toleran melalui public campaign
- Meningkatkan rasa aman dilingkungan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan akses ke lapangan kerja, kredit, pendidikan dan pelatihan
- Menerapkan perencanaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat
- Menangani permasalahan keamanan bagi kelompok-kelompok rawan seperti perempuan, remaja melalui pelatihan
- Meningkatkan fungsi-fungsi kepolisian
- Meningkatkan kesadaran akan resiko dari bencana alam dan merumuskan rencana pencegahan bencana alam berbasis partisipasi masyarakat
- Penyusunan emergency plan disemua unit kerja pemerintah daerah
- Penyusunan rencana tindak untuk menghindarkan kekerasan terhadap perempuan, anak-anak dan keluarga

(sumber: UN HABITAT)

BAGIAN 2



Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah (RPJMD)

DAFTAR ISI BAGIAN 2: RPJMD

	Hal
Apa itu RPJMD	2
Landasan Hukum RPJMD	3
Prinsip-prinsip Penyusunan RPJMD	5
Keluaran Utama RPJMD	8
Indikator Kualitas RPJMD	8
Kerangka Analisis RPJMD	10
Alur Proses Penyusunan RPJMD	12
Step by step Penyusunan RPJMD	13
Template dan Handout	15
Daftar Peristilahan dan Singkatan	17
M 1 Orientasi Perencanaan Daerah	20
M 2 Pembentukan TIM Penyusun RPJMD	22
M 3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD	24
M 4 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan	26
M 5 Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan	27
M 6 Kajian terhadap RPJPD	41
M 7 Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih	41
M 8 Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih	42
M 9 Analisis keuangan daerah	43
M 10 Kajian RTRW-D	49
M 11 Review RPJMD Provinsi dan Nasional	50
M 12 Orientasi Renstra SKPD	50
M 13 Pembentukan TIM Penyusun Renstra SKPD	51
M 14 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD	52
M 15 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD	53
M 16 Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah	54
M 17 Identifikasi Stakeholders	55
M 18 Penentuan Stakeholders untuk konsultasi publik	57
M 19 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD	58
M 23 Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD	62
M 24 Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat	63
M 25 Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD	65
M 26 Tupoksi SKPD	67
M 27 Perumusan Visi dan Misi SKPD	68
M 28 Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu	69
M 29 FGDs untuk setiap Topik	70
M 30 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs	73
M 31 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	73
M 32 Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)	74
M 33 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan	75
M 34 Pembahasan Forum SKPD	76
M 35 Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	78
M 36 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD	79
M 37 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD	80
M 38 Musrenbang RPJMD	81
M 39 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD	83
M 40 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah	85
M 41 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD	86
M 42 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD	87
M 43 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD	89
M 49 Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan	89
M 50 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan	89

RPJMD

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI MEDIA



BAGIAN 2

Tentang LGSP



L GSP (Local Governance Support Program) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah merupakan program peningkatan kapasitas (2005-2009) yang didanai oleh United Agency for International Development (USAID). Program ini bertujuan memperkenalkan tata pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di beberapa provinsi terpilih di Indonesia. Prakarsa dan program LGSP ditujukan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah mitra, organisasi kemasyarakatan, dan media yang mencakup bidang perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan dan mobilisasi sumber daya, serta tata pemerintahan yang partisipatif. Sampai dengan September 2009, LGSP akan bekerja dengan lebih dari 55 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Irian Jaya Barat.

Pengantar



Bahan pelatihan dan pendampingan ini disusun oleh LGSP USAID dengan tujuan untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih baik tentang esensi RPJMD sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah.

Bahan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu media dalam memahami RPJMD sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan dokumen RPJMD, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

**APA ITU
RPJMD?**

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

**LANDASAN
HUKUM**

Dalam peraturan dan perundangan baru penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD**
**KELUARAN
UTAMA RPJMD**

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

**INDIKATOR
KUALITAS RPJMD**
**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMD**

Karena dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, maka kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas KDH Terpilih dalam memandu, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMD**

RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

**HANDOUT
PENDUKUNG**

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi RPJMD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen RPJMD perlu membangun **komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan RPJMD** melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

APA ITU
RPJMD?LANDASAN
HUKUM

Penyusunan RPJMD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum RPJMD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang *performance planning* walaupun penganggaran daerah telah menjalankan *performance budgeting* untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun RPJMD.

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD

Penyusunan RPJMD perlu **mengembangkan hubungan** (*link*) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga RPJMD sebagai dokumen rencana jangka menengah **mudah diterjemahkan ke dalam** rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD.

KELUARAN
UTAMA RPJMD

Ada 10 (sepuluh) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RPJMD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

INDIKATOR
KUALITAS RPJMDBAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMDSTEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMDHANDOUT
PENDUKUNG

- Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- SE Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota
- SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/ 01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Bappeda untuk menyiapkan RPJMD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, pokok-pokok isi dokumen RPJMD, waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan penyampaian RPJMD; status hukum RPJMD.

Undang-Undang No 17/2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang RPJMD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (*performance budgeting*).

Undang-Undang No 32/2004 memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang RPJMD dibandingkan dengan UU No 25/2004 tentang SPPN. Undang-Undang ini mengatur tentang fungsi RPJMD untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah; perlunya konsistensi dan keselarasan dengan RPJPD dan RPJM Nasional; pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, selain strategi, kebijakan umum pembangunan daerah, program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan; RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta; status hukum RPJMD sebagai Peraturan Daerah.

Undang-Undang No 33/2004 seperti halnya Undang-Undang No 17/2003 tidak mengatur secara langsung RPJMD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah No 58/2005 menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah No 65/2005 menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan.

SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 mengatur

secara lebih rinci tentang pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. SEB ini mengatur tentang tahapan musrenbang (pra dan pasca musrenbang), informasi yang perlu disediakan dalam musrenbang; masukan dan keluaran musrenbang; agenda; tipologi peserta musrenbang; organisasi penyelenggara, peranan dan tanggung jawab Bappeda dan SKPD dalam proses musrenbang. Secara keseluruhan, SEB ini telah memperlihatkan komitmen politik Pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD, maka dokumen RPJMD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI No 13/2006. Ini bermakna bahwa RPJMD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, RPJMD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

Pada saat ini, yang sedang dalam proses pengesahan adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 32/2004 dan Undang-Undang No 25/2004. Diharapkan PP ini akan dapat memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.

**APA ITU
RPJMD?**

Sejalan dengan Undang-Undang 25/2004 maka penyusunan RPJMD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Strategis
- Demokratis dan Partisipatif
- Politis
- Perencanaan Bottom- Up
- Perencanaan Top- Down

**LANDASAN
HUKUM**

Strategis

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD**

Dokumen RPJMD pada dasarnya merupakan hasil suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

**KELUARAN
UTAMA RPJMD**

Alur pemikiran strategis (*strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

**INDIKATOR
KUALITAS RPJMD**

- Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
- Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak
- Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, reliable, time bound)
- Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
- Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
- Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)
- Ada prioritas program
- Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program
- Ada pagu indikatif program
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran, dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
- Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

Demokratis dan Partisipatif

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan
- Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder dalam pengambilan keputusan
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
- Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap RPJMD
- Ada pelibatan dari media
- Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas issues dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program

Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:

- Ada konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD
- Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJMD
- Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJMD
- Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJMD
- Ada review, saran dan masukan Gubernur Provinsi berkaitan terhadap rancangan RPJMD
- Ada pembahasan terhadap Ranperda RPJMD
- Ada pengesahan RPJMD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

Bottom-up

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:

- Ada penjarangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih
- Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- Memperhatikan hasil proses penyusunan Renstra SKPD

Top down

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- Ada sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- Ada sinergi dan komitmen Pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb

Tujuan Utama / Goals MDG

Dalam MDG ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber : Millennium Development Goals reports : an assessment UNDP

TOPIK	KELUARAN UTAMA RPJPD
-------	----------------------

<p>APA ITU RPJMD?</p>	<p>Adapun keluaran utama yang diharapkan dari hasil proses penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:</p>
<p>LANDASAN HUKUM</p>	<p>Hasil Proses Strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> Profil Daerah berisikan status, posisi, dan kedudukan daerah dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 5 tahun ke depan
<p>PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJMD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RPJMD yang telah disahkan berisikan visi, misi Kepala Daerah Terpilih; tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah; prioritas program (SKPD, Lintas SKPD dan Lintas Kewilayahan). Tolok ukur dan target kinerja capaian program, pagu indikatif, dan penanggung jawab kelembagaan
<p>KELUARAN UTAMA RPJMD</p>	<p>Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif</p> <ul style="list-style-type: none"> Naskah Kesepakatan Stakeholder dalam Konsultasi Publik pada tahapan penting perencanaan dan Musrenbang RPJMD yang berisikan konsensus dan kesepakatan terhadap prioritas isu daerah jangka menengah, rumusan tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, program prioritas dan pagu indikatif program
<p>INDIKATOR KUALITAS RPJMD</p>	<p>Hasil Proses Politis</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil konsultasi dengan Gubernur Provinsi berkaitan Naskah Akademis Ranperda RPJMD Perda RPJMD
<p>BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJMD</p>	
<p>STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJMD</p>	
<p>HANDOUT PENDUKUNG</p>	

APA ITU
RPJMD?

Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh **kualitas proses pemikiran strategis** yang digunakan dalam proses penyusunan RPJMD.

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD

KELUARAN
UTAMA RPJMD

INDIKATOR
KUALITAS
RPJMD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMD

HANDOUT
PENDUKUNG

Pengertian Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan stakeholder untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

Perencanaan strategis menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Esensi Perencanaan Strategis

- Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan daerah untuk implementasinya.
- Arah perkembangan daerah dapat lebih dipahami oleh masyarakat; dengan demikian membangun *'sense of ownership'* dari rencana yang dibuat
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu daerah prioritas
- Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan
- Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan
- Merumuskan fokus dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan

Elemen-elemen Penting Perencanaan Strategis

- Analisis SWOT atas profil daerah
- Analisis prioritas isu pembangunan daerah
- Perumusan tujuan

- Desain strategi untuk mengatasi isu
- Klarifikasi atau perumusan visi, misi dan program
- Perumusan rencana
- Penyusunan anggaran
- Implementasi program
- Pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran rencana

Syarat Keberhasilan Perencanaan Strategis

- Mengikut sertakan stakeholders yang tepat dalam proses perencanaan
- Mengkomunikasikan rencana dengan bahasa yang mudah dimengerti
- Tujuan (goals) dan sasaran (objectives) rencana mesti realistis dan SMARTER (specific, measurable, acceptable, realistic, time frame, extending and rewarding)
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
- Menggunakan instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat untuk mendukung proses perencanaan

Kualitas RPJMD

Berdasarkan pendekatan perencanaan strategis tersebut diatas, kualitas RPJMD dapat diukur dari hal-hal dibawah ini:

- Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
- Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah
- Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah
- Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah
- Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah
- Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah
- Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah
- Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah
- Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah
- Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal daerah
- Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional
- Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

APA ITU
RPJMD?

RPJMD dalam Kerangka PERMENDAGRI No 13/2006

LANDASAN
HUKUM

Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja dan RKA SKPD, dan APBD.

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD

Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembahagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai dasar analisis. **Ini untuk memastikan bahwa RPJMD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada rencana dan penganggaran tahunan.**

KELUARAN
UTAMA
RPJMD

Adapun fungsi Pemerintahan Daerah meliputi:

- **Pelayanan umum**
- **Ketertiban dan keamanan**
- **Ekonomi**
- **Lingkungan hidup**
- **Perumahan dan fasilitas umum**
- **Kesehatan**
- **Pariwisata dan budaya**
- **Pendidikan**
- **Perlindungan sosial**

INDIKATOR
KUALITAS
RPJMD

**KERANGKA
ANALISIS
RPJMD**

Untuk kepentingan di atas, perlu dipahami adanya table-tablet utama dari PERMENDAGRI No 13/2006 **tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** yang merupakan kerangka utama bagi penyusunan RPJMD:

- Lampiran A.V tentang Kode dan Klasifikasi Fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Lampiran A.VI tentang Pembagian Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMD

Pengembangan Tolok Ukur Kinerja Pembangunan Daerah

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMD

Untuk mengembangkan analisis pembangunan daerah yang berkelanjutan, adalah penting bagi RPJMD untuk mengembangkan tolok ukur kinerja untuk masing-masing fungsi tersebut di atas **yang dapat menggambarkan dimana posisi dan kedudukan daerah saat ini dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas; fungsi-fungsi mana di daerah yang pada saat ini masih mengalami masalah; fungsi-fungsi mana yang perlu dikembangkan dan diperbaiki; seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh untuk menuju penyelenggaraan fungsi yang optimal.**

HANDOUT
PENDUKUNG

Pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang mencakup semua fungsi di atas akan memperlihatkan secara jelas sejauh mana **'sistem pembangunan daerah'** hubungan antara **komponen-komponen fisik, lingkungan sosial, ekonomi telah terjalin baik; dapat mendeteksi segera apabila terdapat permasalahan dan dapat dirumuskan pemecahannya.**

Pengembangan tolok ukur kinerja dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan dicapai dalam masa lima tahun ke depan dari penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas.

Kriteria dalam pengembangan tolok ukur kinerja:

- **Relevan**
- **Mudah dipahami**
- **Reliable**
- **Informasi mudah diakses**
- **Memperlihatkan perspektif jangka menengah dan panjang**
- **Berhubungan dengan isu pembangunan daerah**
- **Memperlihatkan hubungan antara komponen pembangunan daerah**

Beberapa rujukan dalam pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang telah dikembangkan oleh Bappenas:

- **Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah**
- **Indeks Pembangunan Daerah**
- **Indikator Kemajuan Otonomi Daerah**
- **Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan Daerah**

Dalam kaitan diatas, RPJMD perlu mengembangkan:

- Tolok ukur kinerja (5- 7) untuk masing-masing fungsi tersebut di atas yang dapat mencerminkan kemajuan pencapaian penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut secara berkelanjutan.
- Target kinerja untuk masing- masing fungsi tersebut di atas dalam lima tahun kedepan yang disesuaikan sejauh mungkin dengan target kinerja capaian program pemerintah, ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, standar pelayanan minimal atau komitmen internasional
- Posisi dan kedudukan daerah pada saat ini dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas
- Posisi dan kedudukan daerah yang diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut di atas
- Analisis SWOT untuk menggambarkan secara lebih rinci kedudukan internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) daerah dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi tersebut di atas
- Strategi, kebijakan, program dan tolok ukur capaian kinerja program dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk masing-masing fungsi

APA ITU
RPJMD?

Bagan 1 Memperlihatkan alur proses penyusunan RPJMD yang dikembangkan oleh LGSP-USAID, yang mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.

LANDASAN
HUKUM

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan di sini yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD

Alur Proses Strategis

KELUARAN
UTAMA
RPJMD

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

INDIKATOR
KUALITAS
RPJMD

Alur Proses Partisipatif

KERANGKA
ANALISIS RPJMD

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi non government stakeholder seperti NGO, CSO, CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMD**

Alur Legislasi dan Politik

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMD

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

HANDOUT
PENDUKUNG

APA ITU RPJMD?	Tahap Persiapan
LANDASAN HUKUM	M 1 Orientasi Perencanaan Daerah M 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMD M 3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD M 7 Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih M 12 Orientasi Renstra SKPD M 13 Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD M 14 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD M 17 Identifikasi Stakeholder M 18 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik M 20 Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD M 21 Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD M 22 Surat Perintah KepDa kepada GS & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD M 23 Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD M 19 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPJMD	
KELUARAN UTAMA RPJMD	
INDIKATOR KUALITAS RPJMD	
KERANGKA ANALISIS RPJMD	Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah
BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RPJMD	M 4 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan M 5 Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan M 6 Kajian terhadap RPJMD M 8 Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih M 9 Analisis keuangan daerah M 10 Kajian RTRW-D M 11 Review RPJMD Provinsi dan Nasional M 24 Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat M 25 Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD M 29 FGDs untuk setiap Topik M 30 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs M 36 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD
STEP BY STEP PENYUSUNAN RPJMD	
HANDOUT PENDUKUNG	Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD
	M 15 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD M 16 Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah M 26 Tupoksi RPJMD M 27 Perumusan Visi dan Misi RPJMD

- M 28 Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu
- M 31 Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi
- M 33 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
- M 32 Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
- M 34 Pembahasan Forum RPJMD
- M 35 Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD
- M 37 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

- M 38 Musrenbang RPJMD
- M 39 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD

- M 40 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
- M 42 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
- M 41 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
- M 43 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

- M 44 Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi
- M 45 Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
- M 46 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
- M 47 Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
- M 48 Penetapan Ranperda menjadi Perda
- M 49 Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
- M 50 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

**APA ITU
RPJMD?**

Bahan Pelatihan dan Pendampingan ini didukung dengan **TEMPLATE** dan penjelasan ringkas (handout) tambahan tentang hal-hal penting dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD.

**LANDASAN
HUKUM**

Handout yang dimaksud terdiri dari:

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RPJMD**

- 1) Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
- 2) Proyeksi Keuangan Daerah dan Proyeksi Belanja Daerah
- 3) Orientasi Kerangka Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- 4) Millennium Development Goals
- 5) Prinsip-prinsip Good Governance
- 6) Fasilitasi dan Rekrutmen Fasilitator

**KELUARAN
UTAMA RPJMD**

**INDIKATOR
KUALITAS RPJMD**

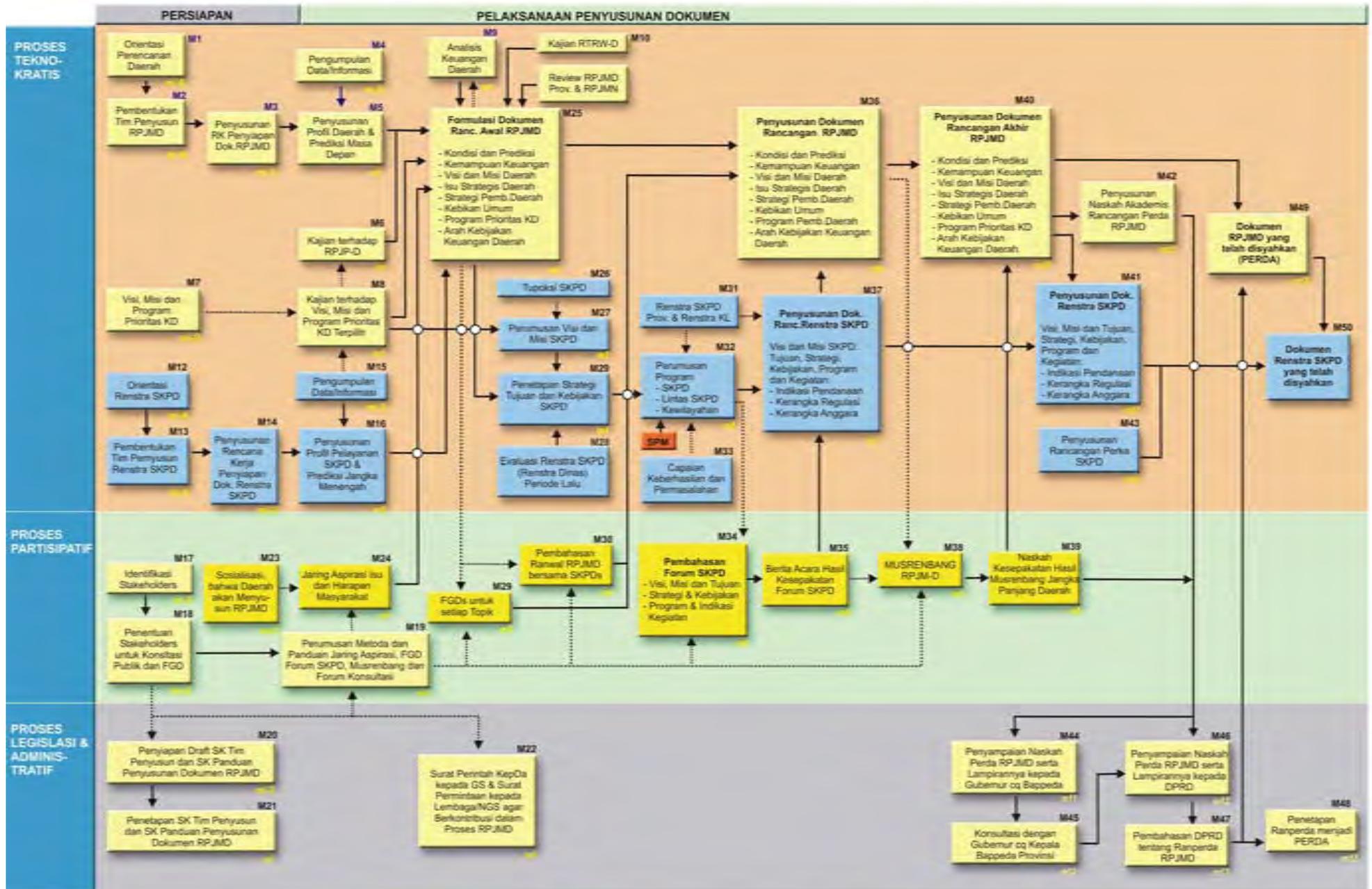
**KERANGKA
ANALISIS RPJMD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RPJMD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RPJMD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA STRATEGIS SKPD



KETERANGAN: Proses penyusunan RPJMD Proses partisipatif Proses penyusunan Renstra SKPD

M : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan sosialisasi/ lokakarya tentang ketentuan sistem perencanaan daerah bagi calon anggota tim penyusun dokumen perencanaan daerah, khususnya untuk RPJM Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Tujuan kegiatan ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengetahui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan penyusunan RPJMD2) Mengetahui substansi dokumen RPJMD menjadi kewajiban daerah serta saling keterkaitan antar dokumen daerah3) Mengetahui peran dan fungsi setiap kelompok pemangku kepentingan dalam proses perencanaan RPJMD
Keluaran	<ol style="list-style-type: none">1) Memahami ketentuan peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan2) Mengetahui substansi pokok dan prinsip-prinsip dasar untuk setiap dokumen perencanaan daerah3) Memahami dan memiliki kemampuan untuk menyusun setiap dokumen RPJMD untuk Tim RPJMD, serta kemampuan untuk menyusun Renstra SKPD bagi Tim penyusun Renstra, serta proses partisipatif yang harus dilakukan.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Peserta lokakarya/sosialisasi orientasi perencanaan daerah adalah staf daerah yang dicalonkan menjadi anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen serta para pengambil keputusan di daerah• Di luar staf Pemda, dalam orientasi perlu juga melibatkan peserta yang berasal dari non pemerintah, seperti Perguruan Tinggi setempat, serta organisasi masyarakat dan LSM yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan daerah.



Unsur media perlu meningkatkan pemahaman yang memadai berkaitan dengan proses penyusunan serta muatan pokok RPJMD dan Renstra SKPD. Aspek pokok yang perlu dicermati, antara lain:

- Payung hukum-perundangan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
- Proses penyusunan RPJMD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, serta kemungkinan pengkayaan dalam rangka meningkatkan proses yang lebih partisipatif dan lebih akuntabilitas.
- Substansi/muatan pokok dari dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
- Keterkaitan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah, maupun dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
- Identifikasi tahapan proses penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD yang membutuhkan kontribusi media dalam rangka meningkatkan kinerja.

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji arahan pembangunan daerah untuk perencanaan jangka menengah daerah dikaitkan dengan kebijakan tata ruang kabupaten/kota. Kegiatan ini ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terformulasikan arah kebijakan pembangunan tata ruang daerah/kota untuk jangka panjang maupun jangka menengah• Teridentifikasi potensi-potensi pengembangan ruang yang merupakan bagian penting dalam penentuan arah pembangunan daerah.• Supaya arahan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan kebijakan tata ruang
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Hasil identifikasi arahan kebijakan pengembangan ruang terbangun beserta kinerja pencapaiannya• Arah pengembangan fungsi-fungsi kegiatan daerah/kota serta penempatan pusat-pusat kegiatan menurut periode perencanaan
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pengembangan ruang dan arahan fungsi daerah tergambar secara jelas• Prioritas pembangunan ruang beserta fungsinya menurut RTRW kabupaten/kota tergambar secara jelas.• Perbandingan antara rencana dengan pencapaian kinerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya teridentifikasi

Pengantar	Merupakan tahapan awal dari setiap proses perencanaan pembangunan. Pemutakhiran data dan informasi diperlukan untuk menjamin terdapatnya kualitas dalam pengambilan keputusan perencanaan.
Tujuan	Memutakhirkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan analisis kinerja pelayanan dan perencanaan strategis SKPD sehingga setiap rumusan kebijakan, program dan kegiatan didasarkan atas data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Keluaran	Kompilasi data yang sistematis dan lengkap yang meliputi data dasar sesuai bidang SKPD, pencapaian kinerja saat ini, pola perkembangan masa lalu dan aspek kebijakan serta peraturan perundangan yang terkait SKPD.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data/informasi yang dikumpulkan harus valid dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan Renstra SKPD ▪ Kompilasi data/informasi melalui pendekatan partisipatif dan interaktif, terbuka terhadap masukan baru. ▪ Bila terjadi perbedaan data antara satu sumber dengan sumber data lainnya, maka perlu kesepakatan data mana yang akan diambil dengan pertimbangan validasi dan kompetensi sumber.



Media dapat juga berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan jangka menengah di daerahnya, dengan cara :

- Menginformasikan hasil kajian RPJPD dan RTRWD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, serta hasil kajian RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, termasuk kajian dampaknya terhadap daerah yang direncanakan.
- Mensosialisasikan visi, misi, dan program utama Presiden/ Gubernur untuk periode jangka menengah.
- Pokok-pokok kebijakan/rencana/program pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, serta peluang masa depan daerah.
- Menanggapi dan mengomentari hasil kajian dokumen terkait

Tujuan	Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan informasi awal bagi seluruh pemangku kepentingan daerah tentang rencana daerah untuk menyusun RPJMD; mensosialisasikan proses, prosedur, dan mekanisme penyusunan RPJMD; menyampaikan isu dan perspektif yang terkait dengan penyusunan RPJMD; mendapatkan partisipasi seluruh stakeholder yang relevan; menyepakati jumlah dan jadwal konsultasi publik/FGD yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh stakeholder dapat mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan RPJMD
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Disepakatinya proses dan mekanisme penyusunan RPJMD 2) Jumlah dan jadwal konsultasi publik/FGD yang disepakati
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder yang relevan, termasuk kelompok marjinal dan kelompok masyarakat dengan kerawanan sosial tinggi. 2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah.

10 Serambi ♦ SELASA 12 DESEMBER 2006

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
 Jl. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh, NAD Telp. 0651-22744/21910
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2006 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2006-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRD Kota Banda Aceh, dunia usaha, dan masyarakat yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh.
2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh stakeholder dalam menentukan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang.
3. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, pemberdayaan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tidak diskriminatif dan memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, mandiri, sejahtera dan Islami dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat di 9 kecamatan dan konsultasi publik di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur pada tanggal 30 November 2006 maka rancangan visi dan misi Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

VISI
TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODEREN DAN ISLAMI

MISI

Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah
 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
 Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan
 Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan yang berkualitas
 Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, perindustrian dan perikanan
 Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas
 Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata dan budaya Islami





Mohon saran dan kritikan terhadap rancangan visi dan misi Kota Banda Aceh 2006 – 2026
 Masa depan kota ditentukan oleh partisipasi anda dalam memberikan saran dan kritikan yang dapat ditunjukkan ke :
 Bappeda Kota Banda Aceh
 Jln. Nyak Adam Kamil – 1 No. 19 Telp. 0651 – 32398 Fax. 0651 – 32397 Email, visi-banda-aceh@yahoo.com SMS. 08126944676 (Ir. Dahlan Aziz)

**SARAN DAN KRITIKAN DAPAT DISAMPAIKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 DESEMBER 2006
 LEWAT TANGGAL TERSEBUT DIANGGAP SETUJU**



Untuk membangkitkan kepedulian aktif masyarakat terhadap agenda pembangunan jangka menengah di daerahnya, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, maka media dapat memberikan kontribusi penting dengan cara :

- Menyebarluaskan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih melalui media terutama berkaitan dengan perubahan-perubahan yang diinginkan.
- Menginformasikan agenda Pemda untuk menyusun RPJMD & Renstra SKPD dan harapan Pemda kepada masyarakat
- Mendorong masyarakat agar berpartisipasi mencermati proses penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

Tujuan	Mengartikulasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dan menghimpun isu yang dihadapi dan harapan seluruh stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jangka menengah. Ini ditujukan untuk mendapatkan informasi terkini atas berbagai issue yang dihadapi dan harapan seluruh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jangka menengah
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rumusan permasalahan/isu yang dihadapi masyarakat 2) Rumusan harapan masyarakat
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1) Partisipatif dan interaktif; proses penjaringan ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi 2) Cepat dan mendasar; tahap ini dimaksudkan untuk menstrukturkan informasi yang diterima untuk mendukung tahap perumusan isu strategis 3) Open-ended; informasi yang diterima bersifat dapat dikembangkan, diperluas, dan dimutakhirkan sehingga kualitas informasi tsb dapat terus diperbaiki. 4) Sensitif gender; sedapat mungkin, informasi yang diperoleh dalam tahap ini dipilah berdasarkan gender 5) Menyeluruh; rumusan isu dan harapan tsb disajikan dalam format dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat



Pada tahapan kegiatan jaring aspirasi dan harapan masyarakat, media dapat berperan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pasca jaring pendapat.

- Mensosialisasikan rencana dan agenda Pemda untuk melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka RPJMD
- Mempublikasikan proses pelaksanaan jaring aspirasi beserta hasil yang diperoleh diantaranya berkaitan dengan isu strategis dan harapan masyarakat tentang arah pembangunan daerahnya untuk masa jangka menengah.
- Memberikan evaluasi dan komentar atas hasil penjaringan aspirasi masyarakat

Tujuan	<p>Melakukan beberapa pembahasan untuk setiap substansi Rancangan Awal RPJMD. Diusulkan sedikitnya dilakukan empat kali FGD, masing-masing untuk pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil daerah dan prediksi kondisi umum daerah 5 tahun yang akan datang • Isu strategis dan strategi pembangunan daerah • Analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah • Kebijakan umum dan Program Prioritas Kepala Daerah <p>Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan substansi Rancangan Awal RPJMD berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli</p>
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Profil daerah dan prediksi kondisi umum daerah 5 tahun yang akan datang berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli • Isu strategis dan strategi pembangunan daerah berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli • Analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli • Kebijakan umum dan Program Prioritas Kepala Daerah berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder kunci/ahli yang relevan. 2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah 4. Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi



Pada tahapan ini, peran media antara lain :

- Terlibat dalam diskusi-diskusi FGD pada setiap topik bahasan Rancangan Awal RPJMD yang menyangkut kondisi dan prediksi daerah, kemampuan keuangan daerah, isu strategis daerah, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah.
- Mensosialisasikan proses dan hasil pembahasan FGD-FGD kepada masyarakat.
- Mengomentari, mengkritisi atau mengemukakan opini terkait topik bahasan.

Tujuan	<p>Kepala SKPD mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renstra SKPD dengan Forum SKPD. Kegiatan ini ditujukan mengelaborasi, mengkonsolidasikan dan mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan SKPD terhadap Rancangan Renstra SKPD. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan (cross sectoral) dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga untuk menumbuhkan semangat bekerja sama di antara stakeholder dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan perencanaan</p>
Keluaran	<p>Materi kesepakatan dan komitmen hasil Forum Renstra SKPD dijadikan masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, serta menjadi rancangan akhir Renstra SKPD, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">- visi, misi, dan tujuan pembangunan SKPD- strategi dan kebijakan pembangunan SKPD- program dan indikasi kegiatan
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none">1) Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder SKPD yang relevan untuk mengidentifikasi masalah dan aspirasinya, menunjukkan posisinya, dan merumuskan peranan dan kontribusinya2) Legitimasi: karena stakeholder Forum SKPD merupakan representatif dari berbagai CSO, maka rencana yang dibuat akan mendapatkan legitimisasi dan dukungan yang lebih kuat.3) Merespon terhadap kebutuhan: berorientasi pada hasil yang konkrit atas kebutuhan multi stakeholder berdasarkan diskusi dan negosiasi di antara peserta.4) Mendorong kerjasama dan komitmen: merupakan wadah yang memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. Di samping itu, wadah ini juga mendorong pemahaman bersama tentang isu dan membangun konsensus.5) Pengembangan konsensus: mendorong pemahaman yang lebih baik atas perbedaan perspektif dan kepentingan, memfasilitasi pemahaman bersama dan berbagi kepentingan, serta membangun kemauan untuk bekerjasama merumuskan pemecahan masalah.

Tujuan	Sesuai UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan RPJMD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan kegiatan ini dengan tujuan membahas rancangan RPJM Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan. Hasil Musrenbang dijadikan masukan bagi penyempurnaan rancangan RPJM Daerah.
Keluaran	Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder yang relevan untuk mengidentifikasi kepedulian mereka, menunjukkan posisinya, dan memutuskan peran dan kontribusinya 2. Proses berkelanjutan: bukan merupakan proses yang berhenti pada waktu Musrenbang saja, melainkan tahapan ini akan ditindaklanjuti dengan keterlibatan CSO dalam tahapan pengawalan, implementasi, pengendalian dan evaluasi rencana. 3. Demand Driven: Musrenbang perlu difasilitasi dan dipandu oleh fasilitator yang kompeten untuk menghasilkan keluaran yang nyata dan menstrukturkan pembahasan sedemikian rupa sehingga kondusif bagi peserta untuk menyampaikan masalah dan pendapatnya 4. Merespon terhadap kebutuhan: berorientasi pada hasil yang konkrit atas kebutuhan multi stakeholder berdasarkan diskusi dan negosiasi di antara peserta. 5. Kerjasama: merupakan wadah yang memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. Di samping itu, wadah ini juga mendorong pemahaman bersama tentang isu dan membangun konsensus. 6. Konsensus: mendorong pemahaman yang lebih baik atas perbedaan perspektif dan kepentingan, memfasilitasi pemahaman bersama dan berbagi kepentingan, serta membangun kamaan untuk bekerjasama mencari pemecahan masalah.



Pembahasan rancangan RPJMD dilakukan melalui pembahasan forum SKPD yang lebih terfokus sesuai dengan masing-masing SKPD serta melalui musrenbang yang melibatkan stakeholder lebih luas, namun pembahasannya lebih komprehensif. Dalam kegiatan ini unsur media dapat berkontribusi, melalui:

- Penyampaian informasi mengenai agenda pembahasan forum-forum SKPD dalam rangka Renstra SKPD dan agenda pembahasan musrenbang RPJMD
- Terlibat aktif dalam pembahasan forum-forum SKPD serta proses musrenbang, melaporkan proses pembahasan mulai dari tahap persiapan, serta mempublikasikan hasil-hasil pembahasan forum-forum SKPD dan pelaksanaan musrenbang RPJMD

Tujuan	Kegiatan ini ditujukan sebagai (1) pernyataan konsensus peserta atas materi pembahasan dalam Musrenbang RPJMD dan komitmen peserta untuk terus mendukung tahapan berikutnya; (2) sebagai berita acara untuk menformalkan secara eksplisit hasil-hasil kesepakatan atas rumusan prioritas isu strategis daerah, agenda pembangunan SKPD, strategi dan kebijakan, serta kesepakatan atas program pembangunan 5 tahunan dan kerangka untuk tindak lanjut; (3) sebagai alat pemantauan atas pelaksanaan komitmen yang telah disepakati baik komitmen teknis, sumber daya dan dana, termasuk kesepakatan untuk bekerja sama dalam kerangka partisipatif
Keluaran	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. komunikatif dan inklusif- naskah kesepakatan akan memfasilitasi komunikasi semua pihak dengan membuat eksplisit pandangan dan interest yang berbeda dan proses negosiasi sehingga menghasilkan kesepakatan 2. dinamis- naskah kesepakatan bersifat dinamis, merupakan instrument penting perencanaan berorientasi tindakan dan hasil. Merupakan pernyataan resmi atas hasil-hasil suatu proses partisipasi, sifatnya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam implementasinya 3. komitmen- mengemukakan secara jelas dan eksplisit tujuan-tujuan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolaboratif 4. saling melengkapi- naskah kesepakatan yang dirumuskan secara partisipatif ini akan memberikan parameter (nilai tambah) baru bagi daerah dalam pelaksanaan <i>'good local governance'</i>



Pada tahapan ini, peran media diharapkan dapat menyebarluaskan hasil-hasil kesepakatan dari pembahasan forum-forum SKPD berkaitan dengan rancangan Renstra SKPD, khususnya SKPD yang terkait dengan pelayanan publik, serta hasil-hasil kesepakatan musrenbang RPJMD, khususnya terkait dengan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka menengah, serta arah kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas pembangunan untuk jangka menengah. Penyebarluasan informasi ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi peduli sekaligus turut mengawal konsistensi proses perencanaan selanjutnya sampai menjadi sebuah kebijakan daerah.

Tujuan	Membahas naskah /rancangan Perda tentang dokumen RPJMD.
Keluaran	Rancangan Perda yang telah disahkan setelah mengakomodasi masukan dari DPRD.



Media dapat berperan untuk mengawal hasil-hasil kesepakatan bersama masyarakat serta mendorong agar kebijakan-kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada kepentingan umum. Hal yang perlu diperhatikan media dalam tahap pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD adalah:

- Mencermati dan mengkritisi perubahan-perubahan substansial yang dilakukan oleh DPRD atas isi Rancangan Akhir RPJMD
- Mengklarifikasi/menanggapi atas usul perubahan DPRD
- Mempublikasikan/memberikan komentar/opini terhadap hasil pembahasan DPRD

Penjelasan	Merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang telah berketetapan hukum, melalui Perda, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang bersifat tahunan, maupun bagi penyusunan Renstra SKPD.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penjelasan	Merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang telah resmi dan disepakati dengan legalitas melalui Peraturan Kepala SKPD, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pada tahapan ini, media diharapkan dapat menyebarkan informasi agar masyarakat mengetahui dan memiliki kepedulian terhadap RPJMD dan Renstra SKPD di daerahnya, dengan cara :

- Mensosialisasikan substansi pokok dokumen RPJMD dan Renstra SKPD serta status legalitas dokumen kepada masyarakat.
- Memberikan opini tentang kewajiban dan/atau partisipasi yang dapat dilakukan oleh berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka implementasi RPJMD dan Renstra SKPD

Tujuan	<p>Sebagai pernyataan konsensus peserta atas materi pembahasan dalam Forum SKPD dan komitmen peserta untuk terus mendukung tahapan berikutnya. Kegiatan ini ditujukan</p> <ol style="list-style-type: none">1) sebagai berita acara untuk menformalkan secara eksplisit hasil-hasil kesepakatan atas rumusan prioritas isu strategis SKPD, pernyataan visi, misi, dan tujuan pembangunan SKPD, strategi dan kebijakan, kesepakatan atas program dan indikasi kegiatan SKPD, serta kerangka untuk tindak lanjut2) sebagai alat pemantauan atas pelaksanaan komitmen yang telah disepakati baik komitmen teknis, sumber daya dan dana, termasuk kesepakatan untuk bekerjasama dalam kerangka partisipatif
Keluaran	Naskah kesepakatan Forum SKPD (Jangka Menengah)
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none">1) komunikatif dan inklusif- naskah kesepakatan akan memfasilitasi komunikasi semua pihak dengan membuat eksplisit pandangan dan interest yang berbeda dan proses negosiasi sehingga menghasilkan kesepakatan2) dinamis- naskah kesepakatan bersifat dinamis, merupakan instrument penting perencanaan berorientasi tindakan dan hasil. Merupakan pernyataan resmi atas hasil-hasil suatu proses partisipasi, sifatnya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam implementasinya3) komitmen- mengemukakan secara jelas dan eksplisit tujuan-tujuan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolaboratif4) saling melengkapi- naskah kesepakatan yang dirumuskan secara partisipatif ini akan memberikan parameter (nilai tambah) baru bagi daerah dalam pelaksanaan '<i>good local governance</i>'

BAGIAN 3



RENSTRA SKPD
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah

DAFTAR ISI RENSTRA SKPD

	Hal
Apa itu Renstra SKPD	2
Landasan Hukum Renstra SKPD	3
Prinsip-prinsip Penyusunan Renstra SKPD	5
Keluaran Utama Renstra SKPD	8
Indikator Kualitas Renstra SKPD	9
Kerangka Analisis Renstra SKPD	11
Alur Proses Penyusunan Renstra SKPD	14
Step by step Penyusunan Renstra SKPD	15
Template dan Handout	17
Daftar Peristilahan dan Singkatan	19
M 1 Orientasi Perencanaan Daerah	22
M 2 Pembentukan TIM Penyusun RPJMD	24
M 3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD	26
M 4 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan	28
M 5 Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan	29
M 6 Kajian terhadap RPJPD	43
M 7 Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih	43
M 8 Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih	44
M 9 Analisis keuangan daerah	45
M 10 Kajian RTRW-D	51
M 11 Review RPJMD Provinsi dan Nasional	52
M 12 Orientasi Renstra SKPD	52
M 13 Pembentukan TIM Penyusun Renstra SKPD	53
M 14 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD	54
M 15 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD	55
M 16 Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah	56
M 17 Identifikasi Stakeholders	57
M 18 Penentuan Stakeholders untuk konsultasi publik	59
M 19 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD	60
M 23 Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD	64
M 24 Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat	65
M 25 Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD	67
M 26 Tupoksi SKPD	69
M 27 Perumusan Visi dan Misi SKPD	70
M 28 Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu	72
M 29 FGDs untuk setiap Topik	73
M 30 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs	78
M 31 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	78
M 32 Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)	79
M 33 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan	80
M 34 Pembahasan Forum SKPD	82
M 35 Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	84
M 36 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD	85
M 37 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD	86
M 38 Musrenbang RPJMD	87
M 39 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD	89
M 40 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah	91
M 41 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD	92
M 42 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD	93
M 43 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD	95
M 49 Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan	95
M 50 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan	95

RENSTRA SKPD

(RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI MEDIA



BAGIAN 3

Tentang LGSP



L GSP (Local Governance Support Program) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah merupakan program peningkatan kapasitas (2005-2009) yang didanai oleh United Agency for International Development (USAID). Program ini bertujuan memperkenalkan tata pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di beberapa provinsi terpilih di Indonesia. Prakarsa dan program LGSP ditujukan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah mitra, organisasi kemasyarakatan, dan media yang mencakup bidang perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan dan mobilisasi sumber daya, serta tata pemerintahan yang partisipatif. Sampai dengan September 2009, LGSP akan bekerja dengan lebih dari 55 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Irian Jaya Barat.

Pengantar



Bahan pelatihan dan pendampingan ini disusun oleh LGSP USAID dengan tujuan untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih baik tentang esensi RPJMD sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah.

Bahan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu media dalam memahami Renstra SKPD sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

APA ITU RENSTRA SKPD

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

LANDASAN HUKUM

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up dan top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

KELUARAN UTAMA RENSTRA SKPD

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

INDIKATOR KUALITAS RENSTRA SKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

Karena penyusunan Dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan KDH selama masa kepemimpinannya.

STEP BY STEP PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa

Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi KDH Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun **komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD** melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis

APA ITU RENSTRA SKPD

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

KELUARAN UTAMA RENSTRA SKPD

INDIKATOR KUALITAS RENSTRA SKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Penyusunan Renstra SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang status hukum Renstra SKPD; belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang *performance planning* walaupun penganggaran daerah telah menjalankan *performance budgeting* untuk beberapa waktu; singkatnya waktu (3 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renstra SKPD.

Penyusunan Renstra SKPD perlu **mengembangkan hubungan** (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra SKPD sebagai dokumen rencana jangka menengah **mudah diterjemahkan ke dalam** rencana tahunan RKPD, KUA APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD

Ada 9 (sembilan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

- **Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**
- **Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara**
- **Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah**
- **Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**
- **Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal**
- **SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007**
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD

dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra SKPD, status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. **Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RENSTRA SKPD.**

Undang-Undang No 17/2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. Undang-undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (*performance budgeting*) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang No 32/2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan **sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD.**

Undang-Undang No 33/2004 seperti halnya Undang-Undang No 17/2003 tidak mengatur secara langsung Renstra SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD).

Peraturan Pemerintah No 58/2005 mengemukakan tentang penyusunan Renstra SKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD; RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD sebagai penerjemahan RPJMD.

Peraturan Pemerintah No 65/2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra SKPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, RENJA SKPD, KUAAPBD,

dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. SEB ini mengatur tentang tahapan musrenbang (pra dan pasca musrenbang), informasi yang perlu disediakan dalam musrenbang; masukan dan keluaran musrenbang; agenda; tipologi peserta musrenbang; organisasi penyelenggara, peranan dan tanggung jawab Bappeda dan SKPD dalam proses musrenbang. Secara keseluruhan, SEB ini telah memperlihatkan komitmen politik Pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RPJMD dan Renstra SKPD dijadikan dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen Renstra SKPD perlu sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI No 13/2006. Ini bermakna bahwa Renstra SKPD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. **Untuk itu, Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas programnya, setiap program perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.**

Pada saat ini, yang sedang dalam proses pengesahan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 32/2004 dan undang-Undang No 25/2004. Diharapkan PP ini akan dapat memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.

APA ITU
RENSTRA SKPD

Sejalan dengan Undang-Undang No 25/2004, maka penyusunan Renstra SKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

LANDASAN
HUKUM

- **Teknokratis (Strategis)**
- **Demokratis dan partisipatif**
- **Politis**
- **Perencanaan Bottom- Up**
- **Perencanaan Top- Down**

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

Teknokratis (Strategis)

Dokumen Renstra SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas Dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD

Alur pemikiran strategis (*strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD

- Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas
- Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak
- Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, **result oriented**, time bound)
- Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
- Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
- Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal SKPD)
- Ada prioritas program
- Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program
- **Ada pagu indikatif program**
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

- Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan

Demokratis dan Partisipatif

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi, misi, dan agenda SKPD serta dalam proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD
- Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder dalam pengambilan keputusan
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal
- Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap Renstra SKPD
- Ada pelibatan dari media
- **Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program**

Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan Renstra SKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:

- Ada konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan Renstra SKPD
- Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan Renstra SKPD
- Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan Renstra SKPD
- Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan Renstra SKPD
- Ada pembahasan terhadap Ranperda Renstra SKPD
- Ada pengesahan Renstra SKPD sebagai Peraturan Kepala SKPD yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

Bottom-up

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RENSTRA SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:

- Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
- Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- Mempertimbangkan hasil Forum Multi Stakeholder SKPD
- Memperhatikan hasil proses penyusunan Renstra SKPD

Top down

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu **bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:**

- Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan RENSTRA K/L
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- Ada sinergi dan **komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals, Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb***

Tujuan Utama / Goals MDG

Dalam MDG ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber : Millennium Development Goals reports : an assessment UNDP

APA ITU
RENSTRA SKPD

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

**KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD**

INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Adapun keluaran utama yang diharapkan dari hasil proses penyusunan Renstra SKPD adalah sebagai berikut:

Hasil Proses Strategis

- Profil Pelayanan SKPD berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah sesuai TUPOKSI SKPD serta kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 5 tahun ke depan.
- Dokumen Renstra SKPD yang telah disahkan berisikan visi, misi, tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD dan keuangan SKPD; prioritas program (SKPD, Lintas SKPD, dan Lintas Kewilayahan). Tolok ukur dan target kinerja capaian program, pagu indikatif, dan penanggung jawab kelembagaan.

Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif

- Naskah Kesepakatan Stakeholder dalam Konsultasi Publik pada tahapan penting perencanaan dan Forum Multi Stakeholder Renstra SKPD yang berisikan **konsensus dan kesepakatan terhadap prioritas isu pelayanan SKPD jangka menengah, rumusan tujuan, arah, strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, keuangan dan pembiayaan SKPD, program prioritas, dan pagu indikatif program dan kegiatan.**

Hasil Proses Politis

- Hasil konsultasi dengan KDH dan DPRD
- Naskah Akademis Ranperka Renstra SKPD
- Perka SKPD tentang Renstra SKPD

APA ITU
RENSTRA SKPD

Kualitas Dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh **Kualitas proses pemikiran strategis** yang digunakan dalam proses penyusunan Renstra SKPD.

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

Pengertian Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan dan tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan stakeholder untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi tidak saling bertentangan namun saling melengkapi.

KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD

Perencanaan strategis menetapkan kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD

Esensi Perencanaan Strategis

- Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan TUPOKSI SKPD dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan SKPD untuk implementasinya.
- Arah perkembangan **pelayanan SKPD** dapat lebih dipahami oleh masyarakat; dengan demikian membangun '*sense of ownership*' dari rencana yang dibuat.
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pelayanan SKPD prioritas.
- Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
- Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
- Merumuskan fokus dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Syarat Keberhasilan Perencanaan Strategis

- Mengikut sertakan stakeholders yang tepat dalam proses perencanaan
- Mengkomunikasikan rencana dengan bahasa yang mudah dimengerti
- Tujuan (goals) dan sasaran (objectives) rencana mesti realistis dan SMARTER (specific, measurable, acceptable, realistic, time frame, extending and rewarding)
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
- Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi
- Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan
- Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan
- Menggunakan instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat untuk mendukung proses perencanaan

Elemen-Elemen Penting Perencanaan Strategis

- Analisis SWOT atas profil **Kinerja Pelayanan SKPD**
- Analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal SKPD masa depan
- Analisis prioritas isu strategis pembangunan pelayanan SKPD
- Perumusan tujuan
- Desain strategi untuk mengatasi isu
- Klarifikasi atau perumusan visi, misi, dan program
- Perumusan rencana
- Penyusunan anggaran
- Implementasi program
- Pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran rencana

Kualitas Renstra SKPD

Berdasarkan pendekatan perencanaan strategis tersebut di atas, kualitas Renstra SKPD dapat diukur dari hal-hal di bawah ini:

- Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
- Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
- Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
- Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
- Ada kesesuaian dan **konsistensi** antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.

- Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
- Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berdasarkan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.
- Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
- Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD.
- Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
- Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD

APA ITU
RENSTRA SKPD

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD

KERANGKA
ANALISIS
RENSTRA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

RENSTRA SKPD dalam Kerangka PERMENDAGRI 13/2006

Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, Renstra SKPD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, dan RKA SKPD dan APBD.

Kerangka analisis yang diusulkan untuk Renstra SKPD adalah menggunakan pembahagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai dasar analisis. **Ini untuk memastikan bahwa Renstra SKPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada rencana dan penganggaran tahunan (RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD).**

Adapun fungsi pemerintahan daerah meliputi:

- **Pelayanan umum**
- **Ketertiban dan keamanan**
- **Ekonomi**
- **Lingkungan hidup**
- **Perumahan dan fasilitas umum**
- **Kesehatan**
- **Pariwisata dan budaya**
- **Pendidikan**
- **Perlindungan sosial**

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Wajib

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Pemerintahan Umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Sumber : Lampiran A I Permendagri No 13/2006

Untuk kepentingan diatas, perlu dipahami adanya table-tabel dari PERMENDAGRI No 13/2006 yang merupakan kerangka utama bagi penyusunan RENSTRA SKPD:

- Lampiran A.1 tentang Kode dan Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran A.V tentang Kode dan Klasifikasi Fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Lampiran A.VI tentang Pembagian Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.X tentang FORMAT KUAAPBD
- Lampiran A. XI tentang FORMAT PPAS
- Lampiran A. XIV tentang FORMAT RKA-SKPD

Pengembangan Tolok Ukur Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk mengembangkan analisis pelayanan SKPD yang berkelanjutan, adalah penting bagi Renstra SKPD untuk mengembangkan tolok ukur kinerja untuk fungsi dan setiap urusan pelayanan wajib dan pilihan **yang dapat menggambarkan dimana posisi dan kedudukan SKPD saat ini dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib dan pilihan; urusan pelayanan mana SKPD pada saat ini masih mengalami masalah; urusan pelayanan wajib mana yang perlu dikembangkan dan diperbaiki; seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh untuk menuju penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib atau pilihan yang optimal.**

Pengembangan tolok ukur kinerja pelayanan SKPD yang mencakup semua urusan pelayanan wajib atau pilihan akan memperlihatkan secara jelas sejauh mana 'sistem pelayanan SKPD'; hubungan antara komponen-komponen fisik, lingkungan sosial, ekonomi telah terjalin baik; dapat mendeteksi segera apabila terdapat permasalahan dalam pelayanan SKPD dan dapat dirumuskan pemecahannya.

Pengembangan tolok ukur kinerja dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam masa lima tahun ke depan dari penyelenggaraan urusan pelayanan wajib atau pilihan tersebut di atas.

Pengembangan tolok ukur kinerja organisasi dan pelayanan SKPD perlu melibatkan Forum Multi Stakeholder SKPD, karena sangat erat kaitannya dengan persepsi stakeholder tentang apa yang mereka anggap penting dalam pelayanan SKPD.

Kriteria dalam pengembangan tolok ukur kinerja:

- **Relevan**
- **Mudah dipahami**
- **Reliable**
- **Informasi mudah diakses**
- **Memperlihatkan perspektif jangka menengah dan panjang**
- **Berhubungan dengan isu pembangunan daerah**
- **Memperlihatkan hubungan antara komponen pembangunan daerah**
- **Jumlah tolok ukur kinerja tidak terlalu banyak (3-5 tolok ukur kinerja kunci)**

Beberapa rujukan dalam pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang telah dikembangkan oleh Bappenas:

- **Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah**
- **Indeks Pembangunan Daerah**
- **Indikator Kemajuan Otonomi Daerah**
- **Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan Daerah**

Dalam kaitan di atas, maka setiap SKPD perlu mengembangkan:

- Tolok ukur kinerja (3-5) untuk fungsi yang ditangani sesuai TUPOKSI yang dapat mencerminkan kemajuan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pelayanan wajib atau pilihan secara berkelanjutan.
- Target kinerja untuk masing-masing fungsi tersebut di atas dalam lima tahun ke depan yang disesuaikan sejauh mungkin dengan target kinerja capaian program pemerintah, ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku, standar pelayanan minimal atau komitmen internasional
- Posisi dan kedudukan SKPD pada masa kini dalam penyelenggaraan urusan pelayanan wajib dan pilihan dari fungsi yang ditangani
- Posisi dan kedudukan SKPD yang diharapkan pada 5 (lima) tahun ke depan dalam penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan wajib tersebut di atas
- Analisis SWOT untuk menggambarkan secara lebih rinci kedudukan internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) daerah dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib, dan urusan pilihan
- Strategi, kebijakan, program dan tolok ukur capaian kinerja program dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk masing-masing urusan pelayanan

APA ITU
RENSTRA SKPD

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD

KERANGKA
ANALISIS
RENSTRA SKPD

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Bagan 1 Memperlihatkan alur proses penyusunan Renstra SKPD yang dikembangkan oleh LGSP-USAID, yang mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan di sini yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan Renstra SKPD yang terpadu.

Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

**APA ITU
RENSTRA SKPD**

**LANDASAN
HUKUM**

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

**KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD**

**KERANGKA
ANALISIS
RENSTRA SKPD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

Tahap Persiapan

- M 1 Orientasi Perencanaan Daerah
- M 2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
- M 3 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
- M 7 Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
- M 12 Orientasi Renstra SKPD
- M 13 Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
- M 14 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
- M 17 Identifikasi Stakeholder
- M 18 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
- M 20 Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
- M 21 Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
- M 22 Surat Perintah KepDa kepada GS & surat permintaan kepada Lembaga/NGS agar berkontribusi dalam proses RPJMD
- M 23 Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
- M 19 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

- M 4 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
- M 5 Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
- M 6 Kajian terhadap RPJPD
- M 8 Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
- M 9 Analisis keuangan daerah
- M 10 Kajian RTRW-D
- M 11 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
- M 24 Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
- M 25 Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
- M 29 FGDs untuk setiap Topik
- M 30 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
- M 36 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

- M 15 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
- M 16 Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
- M 26 Tupoksi SKPD

- M 27 Perumusan Visi dan Misi SKPD
- M 28 Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
- M 31 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- M 33 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
- M 32 Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
- M 34 Pembahasan Forum SKPD
- M 35 Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
- M 37 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah

- M 38 Musrenbang RPJMD
- M 39 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

**Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/
Renstra SKPD**

- M 40 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
- M 42 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
- M 41 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
- M 43 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

- M 44 Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi
- M 45 Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
- M 46 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
- M 47 Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
- M 48 Penetapan Ranperda menjadi Perda
- M 49 Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
- M 50 Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

**APA ITU
RENSTRA SKPD**

Bahan Pelatihan dan Pendampingan ini didukung dengan **TEMPLATE** dan penjelasan ringkas (hand out) tambahan tentang hal-hal penting dalam setiap tahapan penyusunan Renstra SKPD.

**LANDASAN
HUKUM**

Handout yang dimaksud terdiri dari:

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Proyeksi Belanja Daerah
2. Proyeksi Keuangan Daerah
3. Renstra SKPD Kota Bukittinggi 'Go Public'
4. Klinik Konsultasi Teknik Renstra SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

**KELUARAN
UTAMA
RENSTRA SKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS
RENSTRA SKPD**

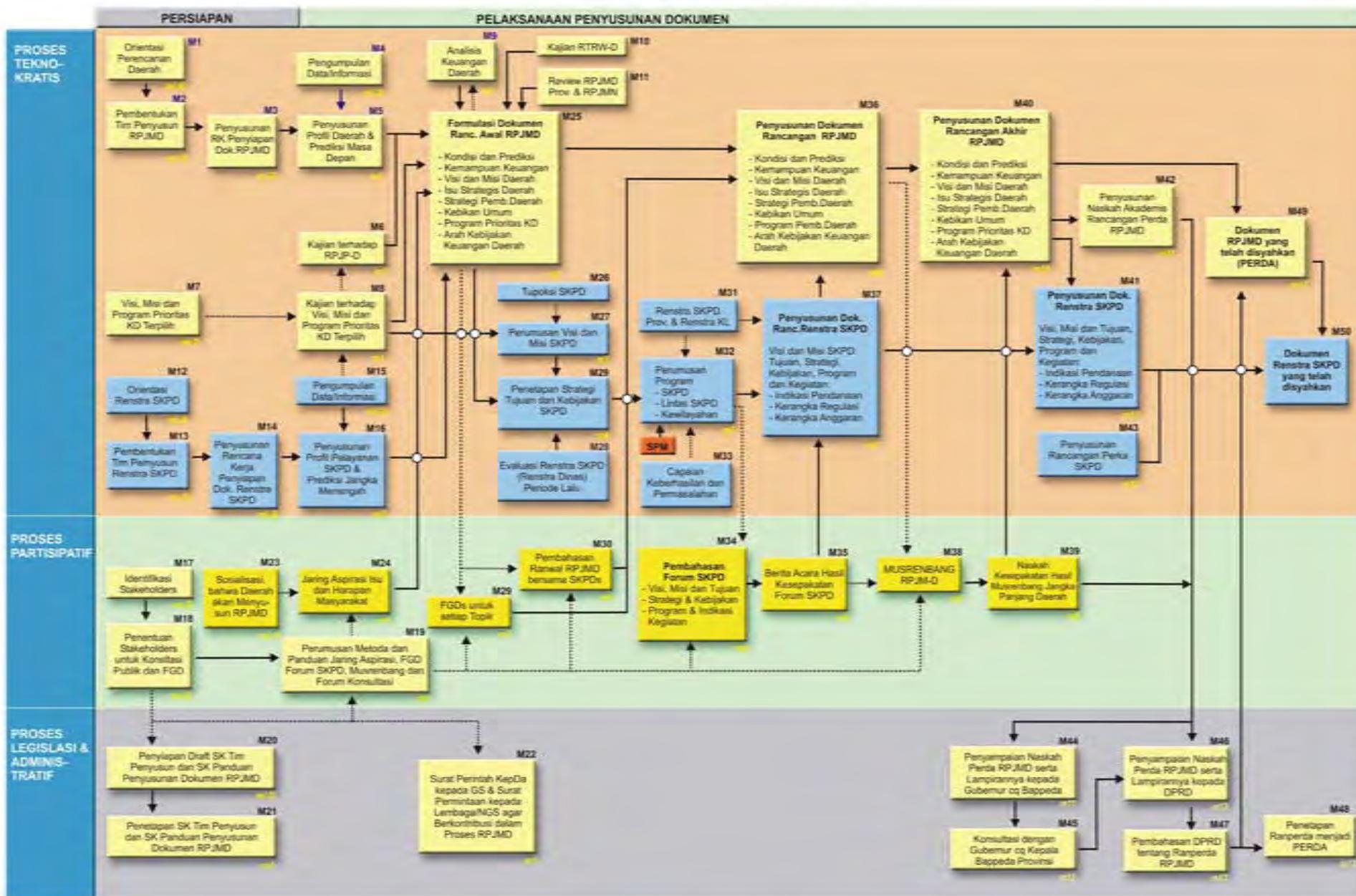
**KERANGKA
ANALISIS
RENSTRA SKPD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENSTRA SKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA STRATEGIS SKPD



KETERANGAN: Proses penyusunan RPJMD Proses partisipatif Proses penyusunan Renstra SKPD

M : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan sosialisasi/ lokakarya tentang ketentuan sistem perencanaan daerah bagi calon anggota tim penyusun dokumen perencanaan daerah, khususnya untuk RPJM Daerah dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Tujuan kegiatan ini:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Mengetahui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan penyusunan RPJMD2) Mengetahui substansi dokumen RPJMD menjadi kewajiban daerah serta saling keterkaitan antar dokumen daerah3) Mengetahui peran dan fungsi setiap kelompok pemangku kepentingan dalam proses perencanaan RPJMD
Keluaran	<ol style="list-style-type: none">1) Memahami ketentuan peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan2) Mengetahui substansi pokok dan prinsip-prinsip dasar untuk setiap dokumen perencanaan daerah3) Memahami dan memiliki kemampuan untuk menyusun setiap dokumen RPJMD untuk Tim RPJMD, serta kemampuan untuk menyusun Renstra SKPD bagi Tim penyusun Renstra, serta proses partisipatif yang harus dilakukan.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Peserta lokakarya/sosialisasi orientasi perencanaan daerah adalah staf daerah yang dicalonkan menjadi anggota Tim Teknis Penyusunan Dokumen serta para pengambil keputusan di daerah• Di luar staf Pemda, dalam orientasi perlu juga melibatkan peserta yang berasal dari non pemerintah, seperti Perguruan Tinggi setempat, serta organisasi masyarakat dan LSM yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan daerah.



Unsur media perlu meningkatkan pemahaman yang memadai berkaitan dengan proses penyusunan serta muatan pokok RPJMD dan Renstra SKPD. Aspek pokok yang perlu dicermati, antara lain:

- Payung hukum-perundangan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
- Proses penyusunan RPJMD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, serta kemungkinan pengkayaan dalam rangka meningkatkan proses yang lebih partisipatif dan lebih akuntabilitas.
- Substansi/muatan pokok dari dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.
- Keterkaitan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah, maupun dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.
- Identifikasi tahapan proses penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD yang membutuhkan kontribusi media dalam rangka meningkatkan kinerja.

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkaji arahan pembangunan daerah untuk perencanaan jangka menengah daerah dikaitkan dengan kebijakan tata ruang kabupaten/kota. Kegiatan ini ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terformulasikan arah kebijakan pembangunan tata ruang daerah/kota untuk jangka panjang maupun jangka menengah• Teridentifikasi potensi-potensi pengembangan ruang yang merupakan bagian penting dalam penentuan arah pembangunan daerah.• Supaya arahan pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan kebijakan tata ruang
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Hasil identifikasi arahan kebijakan pengembangan ruang terbangun beserta kinerja pencapaiannya• Arah pengembangan fungsi-fungsi kegiatan daerah/kota serta penempatan pusat-pusat kegiatan menurut periode perencanaan
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pengembangan ruang dan arahan fungsi daerah tergambar secara jelas• Prioritas pembangunan ruang beserta fungsinya menurut RTRW kabupaten/kota tergambar secara jelas.• Perbandingan antara rencana dengan pencapaian kinerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya teridentifikasi

Pengantar	Merupakan tahapan awal dari setiap proses perencanaan pembangunan. Pemutakhiran data dan informasi diperlukan untuk menjamin terdapatnya kualitas dalam pengambilan keputusan perencanaan.
Tujuan	Memutakhirkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan analisis kinerja pelayanan dan perencanaan strategis SKPD sehingga setiap rumusan kebijakan, program dan kegiatan didasarkan atas data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
Keluaran	Kompilasi data yang sistematis dan lengkap yang meliputi data dasar sesuai bidang SKPD, pencapaian kinerja saat ini, pola perkembangan masa lalu dan aspek kebijakan serta peraturan perundangan yang terkait SKPD.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data/informasi yang dikumpulkan harus valid dan sesuai dengan kebutuhan penyusunan Renstra SKPD ▪ Kompilasi data/informasi melalui pendekatan partisipatif dan interaktif, terbuka terhadap masukan baru. ▪ Bila terjadi perbedaan data antara satu sumber dengan sumber data lainnya, maka perlu kesepakatan data mana yang akan diambil dengan pertimbangan validasi dan kompetensi sumber.



Media dapat juga berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan jangka menengah di daerahnya, dengan cara :

- Menginformasikan hasil kajian RPJPD dan RTRWD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, serta hasil kajian RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi, termasuk kajian dampaknya terhadap daerah yang direncanakan.
- Mensosialisasikan visi, misi, dan program utama Presiden/ Gubernur untuk periode jangka menengah.
- Pokok-pokok kebijakan/rencana/program pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, serta peluang masa depan daerah.
- Menanggapi dan mengomentari hasil kajian dokumen terkait

Tujuan	Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan informasi awal bagi seluruh pemangku kepentingan daerah tentang rencana daerah untuk menyusun RPJMD; mensosialisasikan proses, prosedur, dan mekanisme penyusunan RPJMD; menyampaikan isu dan perspektif yang terkait dengan penyusunan RPJMD; mendapatkan partisipasi seluruh stakeholder yang relevan; menyepakati jumlah dan jadwal konsultasi publik/FGD yang akan dilakukan. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh stakeholder dapat mempersiapkan diri untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan RPJMD
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Disepakatinya proses dan mekanisme penyusunan RPJMD 2) Jumlah dan jadwal konsultasi publik/FGD yang disepakati
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder yang relevan, termasuk kelompok marjinal dan kelompok masyarakat dengan kerawanan sosial tinggi. 2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah.

10 Serambi • SELASA 12 DESEMBER 2006

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
 Jl. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh, NAD Telp. 0651-22744/21910
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2006 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2006-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRD Kota Banda Aceh, dunia usaha, dan masyarakat yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh.
2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh stakeholder dalam menentukan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang.
3. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, pemberdayaan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tidak diskriminatif dan memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, mandiri, sejahtera dan Islami dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat di 9 kecamatan dan konsultasi publik di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur pada tanggal 30 November 2006 maka rancangan visi dan misi Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

VISI
TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODEREN DAN ISLAMI

MISI
 Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah
 Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
 Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan
 Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan yang berkualitas
 Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, perindustrian dan perikanan
 Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas
 Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata dan budaya Islami

 **USAID** FROM THE AMERICAN PEOPLE  **BAPPEDA KOTA BANDA ACEH** 

Mohon saran dan kritikan terhadap rancangan visi dan misi Kota Banda Aceh 2006 – 2026
 Masa depan kota ditentukan oleh partisipasi anda dalam memberikan saran dan kritikan yang dapat ditunjukkan ke :
 Bappeda Kota Banda Aceh
 Jln. Nyak Adam Kamil – 1 No. 19 Telp. 0651 – 32398 Fax. 0651 – 32397 Email, visi-banda-aceh@yahoo.com SMS. 08126944676 (Ir. Dahlan Aziz)

**SARAN DAN KRITIKAN DAPAT DISAMPAIKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 DESEMBER 2006
 LEWAT TANGGAL TERSEBUT DIANGGAP SETUJU**



Untuk membangkitkan kepedulian aktif masyarakat terhadap agenda pembangunan jangka menengah di daerahnya, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra SKPD, maka media dapat memberikan kontribusi penting dengan cara :

- Menyebarluaskan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih melalui media terutama berkaitan dengan perubahan-perubahan yang diinginkan.
- Menginformasikan agenda Pemda untuk menyusun RPJMD & Renstra SKPD dan harapan Pemda kepada masyarakat
- Mendorong masyarakat agar berpartisipasi mencermati proses penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

Tujuan	Mengartikulasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dan menghimpun isu yang dihadapi dan harapan seluruh stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jangka menengah. Ini ditujukan untuk mendapatkan informasi terkini atas berbagai issue yang dihadapi dan harapan seluruh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah jangka menengah
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rumusan permasalahan/isu yang dihadapi masyarakat 2) Rumusan harapan masyarakat
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1) Partisipatif dan interaktif; proses penjaringan ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi 2) Cepat dan mendasar; tahap ini dimaksudkan untuk menstrukturkan informasi yang diterima untuk mendukung tahap perumusan isu strategis 3) Open-ended; informasi yang diterima bersifat dapat dikembangkan, diperluas, dan dimutakhirkan sehingga kualitas informasi tsb dapat terus diperbaiki. 4) Sensitif gender; sedapat mungkin, informasi yang diperoleh dalam tahap ini dipilah berdasarkan gender 5) Menyeluruh; rumusan isu dan harapan tsb disajikan dalam format dan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh seluruh masyarakat



Pada tahapan kegiatan jaring aspirasi dan harapan masyarakat, media dapat berperan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pasca jaring pendapat.

- Mensosialisasikan rencana dan agenda Pemda untuk melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dalam rangka RPJMD
- Mempublikasikan proses pelaksanaan jaring aspirasi beserta hasil yang diperoleh diantaranya berkaitan dengan isu strategis dan harapan masyarakat tentang arah pembangunan daerahnya untuk masa jangka menengah.
- Memberikan evaluasi dan komentar atas hasil penjaringan aspirasi masyarakat

Tujuan	<p>Melakukan beberapa pembahasan untuk setiap substansi Rancangan Awal RPJMD. Diusulkan sedikitnya dilakukan empat kali FGD, masing-masing untuk pembahasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profil daerah dan prediksi kondisi umum daerah 5 tahun yang akan datang • Isu strategis dan strategi pembangunan daerah • Analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah • Kebijakan umum dan Program Prioritas Kepala Daerah <p>Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan substansi Rancangan Awal RPJMD berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli</p>
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Profil daerah dan prediksi kondisi umum daerah 5 tahun yang akan datang berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli • Isu strategis dan strategi pembangunan daerah berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli • Analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli • Kebijakan umum dan Program Prioritas Kepala Daerah berdasarkan analisis dan kesepakatan stakeholder kunci/ahli
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif. Memastikan terlibatnya seluruh stakeholder kunci/ahli yang relevan. 2. Relevan. Melibatkan hanya stakeholder yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah 4. Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan ini harus melibatkan seluruh stakeholder secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, dan interpretasi informasi

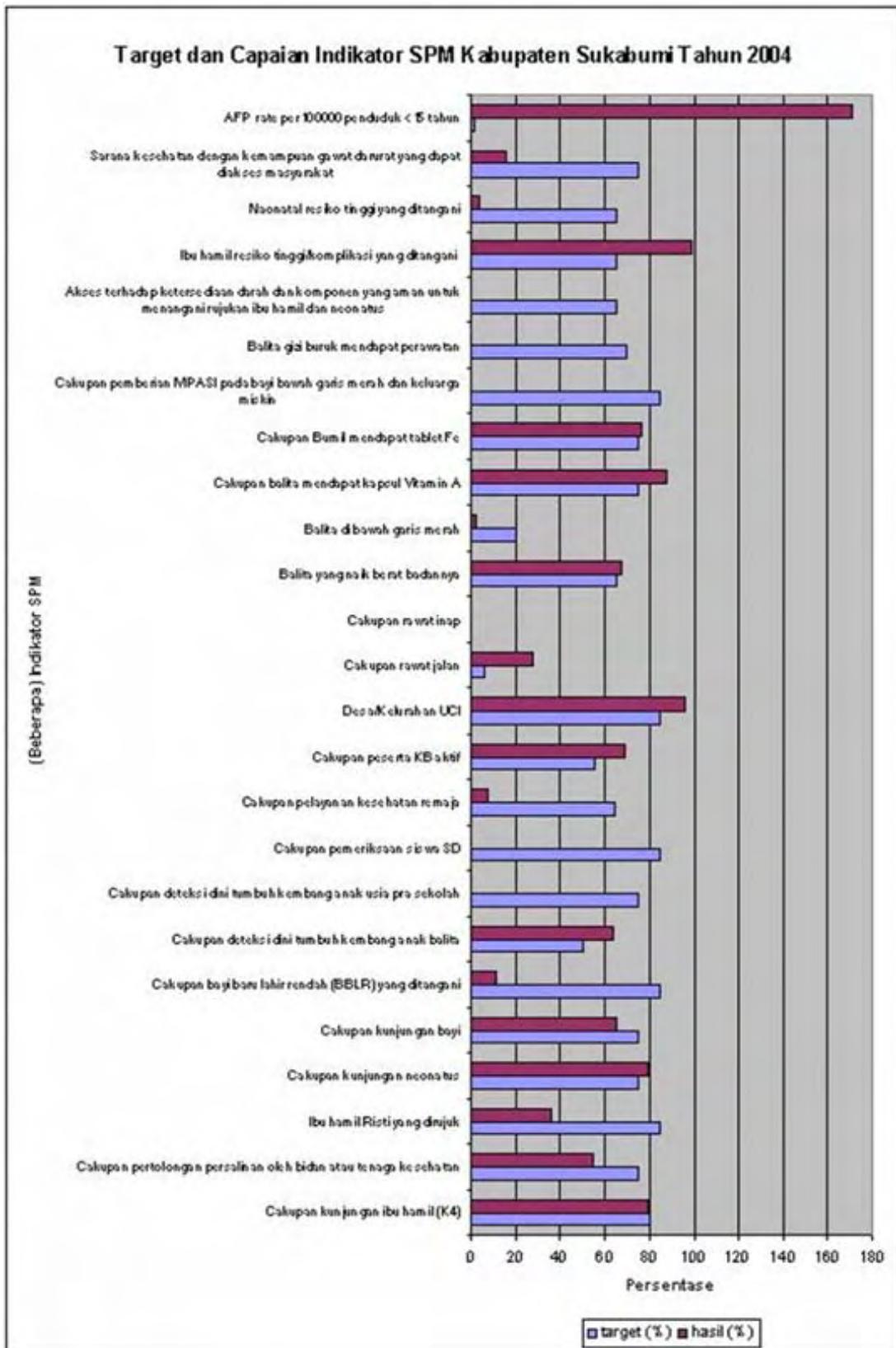


Pada tahapan ini, peran media antara lain :

- Terlibat dalam diskusi-diskusi FGD pada setiap topik bahasan Rancangan Awal RPJMD yang menyangkut kondisi dan prediksi daerah, kemampuan keuangan daerah, isu strategis daerah, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah.
- Mensosialisasikan proses dan hasil pembahasan FGD-FGD kepada masyarakat.
- Mengomentari, mengkritisi atau mengemukakan opini terkait topik bahasan.

Tujuan	<p>Sesuai PP No 65/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM maka SPM yang ditetapkan secara nasional merupakan acuan dalam menentukan pencapaian kinerja pelayanan SKPD maupun sebagai pertimbangan dalam menyusun perencanaan, khususnya target kinerja capaian program dan kegiatan SKPD. Kegiatan ini ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan SKPD terhadap SPM serta menentukan target kinerja capaian program yang ingin dituju selama kurun waktu jangka menengah▪ Mengetahui permasalahan atau kendala pencapaian kinerja pelayanan SKPD.▪ Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan program dan skala prioritasnya
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">▪ Tingkat pencapaian pelayanan SKPD saat ini dibandingkan terhadap SPM (jika SPM telah ada), atau terhadap kebutuhan pelayanan (jika SPM belum ditetapkan).▪ Kebutuhan peningkatan tingkat pelayanan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian SPM atau kebutuhan pelayanan.

Contoh Target dan Realisasi Kinerja Capaian Kegiatan Menurut SPM



Tujuan	<p>Kepala SKPD mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renstra SKPD dengan Forum SKPD. Kegiatan ini ditujukan mengelaborasi, mengkonsolidasikan dan mencapai kesepakatan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan SKPD terhadap Rancangan Renstra SKPD. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan (cross sectoral) dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga untuk menumbuhkan semangat bekerja sama di antara stakeholder dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan perencanaan</p>
Keluaran	<p>Materi kesepakatan dan komitmen hasil Forum Renstra SKPD dijadikan masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, serta menjadi rancangan akhir Renstra SKPD, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi, misi, dan tujuan pembangunan SKPD - Strategi dan kebijakan pembangunan SKPD - Program dan indikasi kegiatan
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1) Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder SKPD yang relevan untuk mengidentifikasi masalah dan aspirasinya, menunjukkan posisinya, dan merumuskan peranan dan kontribusinya 2) Legitimasi: karena stakeholder Forum SKPD merupakan representatif dari berbagai CSO, maka rencana yang dibuat akan mendapatkan legitimisasi dan dukungan yang lebih kuat. 3) Merespon terhadap kebutuhan: berorientasi pada hasil yang konkrit atas kebutuhan multi stakeholder berdasarkan diskusi dan negosiasi di antara peserta. 4) 4) Mendorong kerjasama dan komitmen: merupakan wadah yang memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. Di samping itu, wadah ini juga mendorong pemahaman bersama tentang isu dan membangun konsensus. 5) Pengembangan konsensus: mendorong pemahaman yang lebih baik atas perbedaan perspektif dan kepentingan, memfasilitasi pemahaman bersama dan berbagi kepentingan, serta membangun kemauan untuk bekerjasama merumuskan pemecahan masalah.

Tujuan	Sesuai UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan pelaksanaan Musrenbang untuk penyusunan RPJMD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan kegiatan ini dengan tujuan membahas rancangan RPJM Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan. Hasil Musrenbang dijadikan masukan bagi penyempurnaan rancangan RPJM Daerah.
Keluaran	Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inklusif: memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder yang relevan untuk mengidentifikasi kepedulian mereka, menunjukkan posisinya, dan memutuskan peran dan kontribusinya 2. Proses berkelanjutan: bukan merupakan proses yang berhenti pada waktu Musrenbang saja, melainkan tahapan ini akan ditindaklanjuti dengan keterlibatan CSO dalam tahapan pengawalan, implementasi, pengendalian dan evaluasi rencana. 3. Demand Driven: Musrenbang perlu difasilitasi dan dipandu oleh fasilitator yang kompeten untuk menghasilkan keluaran yang nyata dan menstrukturkan pembahasan sedemikian rupa sehingga kondusif bagi peserta untuk menyampaikan masalah dan pendapatnya 4. Merespon terhadap kebutuhan: berorientasi pada hasil yang konkrit atas kebutuhan multi stakeholder berdasarkan diskusi dan negosiasi di antara peserta. 5. Kerjasama: merupakan wadah yang memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan, keahlian, dan mobilisasi sumber daya dari berbagai sumber. Di samping itu, wadah ini juga mendorong pemahaman bersama tentang isu dan membangun konsensus. 6. Konsensus: mendorong pemahaman yang lebih baik atas perbedaan perspektif dan kepentingan, memfasilitasi pemahaman bersama dan berbagi kepentingan, serta membangun kamaan untuk bekerjasama mencari pemecahan masalah.



Pembahasan rancangan RPJMD dilakukan melalui pembahasan forum SKPD yang lebih terfokus sesuai dengan masing-masing SKPD serta melalui musrenbang yang melibatkan stakeholder lebih luas, namun pembahasannya lebih komprehensif. Dalam kegiatan ini unsur media dapat berkontribusi, melalui:

- Penyampaian informasi mengenai agenda pembahasan forum-forum SKPD dalam rangka Renstra SKPD dan agenda pembahasan musrenbang RPJMD
- Terlibat aktif dalam pembahasan forum-forum SKPD serta proses musrenbang, melaporkan proses pembahasan mulai dari tahap persiapan, serta mempublikasikan hasil-hasil pembahasan forum-forum SKPD dan pelaksanaan musrenbang RPJMD

Tujuan	<p>Sebagai pernyataan konsensus peserta atas materi pembahasan dalam Forum SKPD dan komitmen peserta untuk terus mendukung tahapan berikutnya. Kegiatan ini ditujukan</p> <ol style="list-style-type: none">1) sebagai berita acara untuk menformalkan secara eksplisit hasil-hasil kesepakatan atas rumusan prioritas isu strategis SKPD, pernyataan visi, misi, dan tujuan pembangunan SKPD, strategi dan kebijakan, kesepakatan atas program dan indikasi kegiatan SKPD, serta kerangka untuk tindak lanjut2) sebagai alat pemantauan atas pelaksanaan komitmen yang telah disepakati baik komitmen teknis, sumber daya dan dana, termasuk kesepakatan untuk bekerjasama dalam kerangka partisipatif
Keluaran	Naskah kesepakatan Forum SKPD (Jangka Menengah)
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none">1) komunikatif dan inklusif- naskah kesepakatan akan memfasilitasi komunikasi semua pihak dengan membuat eksplisit pandangan dan interest yang berbeda dan proses negosiasi sehingga menghasilkan kesepakatan2) dinamis- naskah kesepakatan bersifat dinamis, merupakan instrument penting perencanaan berorientasi tindakan dan hasil. Merupakan pernyataan resmi atas hasil-hasil suatu proses partisipasi, sifatnya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam implementasinya3) komitmen- mengemukakan secara jelas dan eksplisit tujuan-tujuan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolaboratif4) saling melengkapi- naskah kesepakatan yang dirumuskan secara partisipatif ini akan memberikan parameter (nilai tambah) baru bagi daerah dalam pelaksanaan '<i>good local governance</i>'

Tujuan	Kegiatan ini ditujukan sebagai (1) pernyataan konsensus peserta atas materi pembahasan dalam Musrenbang RPJMD dan komitmen peserta untuk terus mendukung tahapan berikutnya; (2) sebagai berita acara untuk menformalkan secara eksplisit hasil-hasil kesepakatan atas rumusan prioritas isu strategis daerah, agenda pembangunan SKPD, strategi dan kebijakan, serta kesepakatan atas program pembangunan 5 tahunan dan kerangka untuk tindak lanjut; (3) sebagai alat pemantauan atas pelaksanaan komitmen yang telah disepakati baik komitmen teknis, sumber daya dan dana, termasuk kesepakatan untuk bekerja sama dalam kerangka partisipatif
Keluaran	Naskah kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD
Prinsip-prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. komunikatif dan inklusif- naskah kesepakatan akan memfasilitasi komunikasi semua pihak dengan membuat eksplisit pandangan dan interest yang berbeda dan proses negosiasi sehingga menghasilkan kesepakatan 2. dinamis- naskah kesepakatan bersifat dinamis, merupakan instrument penting perencanaan berorientasi tindakan dan hasil. Merupakan pernyataan resmi atas hasil-hasil suatu proses partisipasi, sifatnya selalu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam implementasinya 3. komitmen- mengemukakan secara jelas dan eksplisit tujuan-tujuan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolaboratif 4. saling melengkapi- naskah kesepakatan yang dirumuskan secara partisipatif ini akan memberikan parameter (nilai tambah) baru bagi daerah dalam pelaksanaan <i>'good local governance'</i>



Pada tahapan ini, peran media diharapkan dapat menyebarluaskan hasil-hasil kesepakatan dari pembahasan forum-forum SKPD berkaitan dengan rancangan Renstra SKPD, khususnya SKPD yang terkait dengan pelayanan publik, serta hasil-hasil kesepakatan musrenbang RPJMD, khususnya terkait dengan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka menengah, serta arah kebijakan keuangan daerah dan program-program prioritas pembangunan untuk jangka menengah. Penyebarluasan informasi ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi peduli sekaligus turut mengawal konsistensi proses perencanaan selanjutnya sampai menjadi sebuah kebijakan daerah.

Tujuan	Membahas naskah /rancangan Perda tentang dokumen RPJMD.
Keluaran	Rancangan Perda yang telah disahkan setelah mengakomodasi masukan dari DPRD.



Media dapat berperan untuk mengawal hasil-hasil kesepakatan bersama masyarakat serta mendorong agar kebijakan-kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada kepentingan umum. Hal yang perlu diperhatikan media dalam tahap pembahasan rancangan peraturan daerah oleh DPRD adalah:

- Mencermati dan mengkritisi perubahan-perubahan substansial yang dilakukan oleh DPRD atas isi Rancangan Akhir RPJMD
- Mengklarifikasi/menanggapi atas usul perubahan DPRD
- Mempublikasikan/memberikan komentar/opini terhadap hasil pembahasan DPRD

Penjelasan	Merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang telah berketetapan hukum, melalui Perda, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang bersifat tahunan, maupun bagi penyusunan Renstra SKPD.
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penjelasan	Merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang telah resmi dan disepakati dengan legalitas melalui Peraturan Kepala SKPD, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pada tahapan ini, media diharapkan dapat menyebarkan informasi agar masyarakat mengetahui dan memiliki kepedulian terhadap RPJMD dan Renstra SKPD di daerahnya, dengan cara :

- Mensosialisasikan substansi pokok dokumen RPJMD dan Renstra SKPD serta status legalitas dokumen kepada masyarakat.
- Memberikan opini tentang kewajiban dan/atau partisipasi yang dapat dilakukan oleh berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka implementasi RPJMD dan Renstra SKPD

BAGIAN 4



RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI RKPD

	Hal
Apa itu RKPD	2
Landasan Hukum RKPD	3
Prinsip-prinsip Penyusunan RKPD	6
Keluaran Utama RKPD	8
Indikator Kualitas RKPD	9
Kerangka Analisis RKPD	11
Alur Proses Penyusunan RKPD	14
Step by step Penyusunan RKPD	15
Template dan Handout	16
Daftar Peristilahan dan Singkatan	17
T 1 Orientasi Perencanaan Daerah	22
T 2 Pembentukan Tim Penyusun RKPD	24
T 3 Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD	26
T 4 Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan	29
T 5 Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)	29
T 6 Pengumpulan Data/Informasi	32
T 7 Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting	33
T 8 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	39
T 9 Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD	40
T 10 Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD	40
T 11 Review Renstra SKPD	41
T 12 Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	41
T 13 Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana	42
T 14 SPM- standar pelayanan minimal	45
T 15 Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana	46
T 16 Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi	46
T 17 Identifikasi stakeholders	47
T 18 Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik	48
T 19 penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbang	49
T 20 Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD	52
T 21 Penetapan SK Tim Penyusun	52
T 22 Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada NGS	52
T 23 MUSRENBANG Desa/Kelurahan	52
T 24 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan	53
T 25 MUSRENBANG Kecamatan	53
T 26 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan	55
T 27 Pembahasan Forum SKPD	55
T 28 Berita Acara kesepakatan Forum SKPD	60
T 29 Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	61
T 30 Formulasi Dokumen Rancangan RKPD	62
T 31 Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKPD	65
T 32 Musrenbang Daerah/RKPD	68
T 33 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD	70
T 35 Formulasi Ranc.Akhir RKPD	72
T 37 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala SKPD	72
T 40 Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD)	72
T 43 Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)	73

RKPD

(RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH)

BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI MEDIA



BAGIAN 4

Tentang LGSP



L GSP (Local Governance Support Program) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah merupakan program peningkatan kapasitas (2005-2009) yang didanai oleh United Agency for International Development (USAID). Program ini bertujuan memperkenalkan tata pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di beberapa provinsi terpilih di Indonesia. Prakarsa dan program LGSP ditujukan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah mitra, organisasi kemasyarakatan, dan media yang mencakup bidang perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan dan mobilisasi sumber daya, serta tata pemerintahan yang partisipatif. Sampai dengan September 2009, LGSP akan bekerja dengan lebih dari 55 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Irian Jaya Barat.

Pengantar



Bahan pelatihan dan pendampingan ini disusun oleh LGSP USAID dengan tujuan untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih baik tentang esensi RKPD sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah. Bahan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu media dalam memahami RKPD sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan dokumen RKPD, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

APA ITU RKPD?

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RKPD

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

KELUARAN UTAMA RKPD

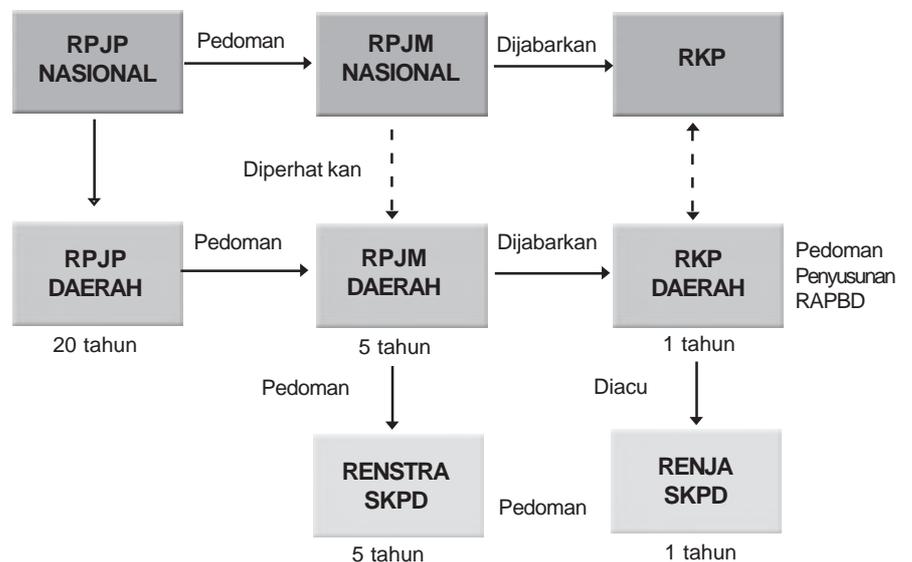
ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT UU 25/2004

INDIKATOR KUALITAS RKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RKPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RKPD

HANDOUT PENDUKUNG



RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan

dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penyusunan RKPD:

1. Siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD?
2. Bagaimana kinerja pembangunan daerah pada tahun-tahun lampau? Sejauh mana pencapaian tujuan, capaian program, dan kegiatan?
3. Sejauh mana capaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra SKPD?
4. Sejauh mana capaian tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah?
5. Apa capaian positif tahun-tahun lalu yang perlu dipelihara dan dikembangkan? Apa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran?
6. Peluang dan tantangan utama apa yang dihadapi dalam Tahun Rencana RKPD?
7. Adakah perubahan signifikan perlu dilakukan dalam pengorganisasian program, kegiatan, dan penganggaran RKPD Tahun Rencana?
8. Apakah tema, fokus, dan kebijakan RKPD Tahun Rencana?
9. Apakah fokus dan prioritas capaian program dan kegiatan sektoral (SKPD)?
10. Bagaimana status dan ketersediaan pendanaan RKPD Tahun Rencana?
11. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran?
12. Sejauh mana RKPD akan berkontribusi pada penanganan isu strategis nasional?

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen RKPD perlu membangun **komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi Stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan RKPD** melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

APA ITU
RKPD?LANDASAN
HUKUMPRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPDKELUARAN
UTAMA RKPDINDIKATOR
KUALITAS
RKPDBAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPDSTEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPDHANDOUT
PENDUKUNG

Penyusunan RKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang *performance planning* walaupun penganggaran daerah telah menjalankan *performance budgeting* untuk beberapa waktu; waktu (5 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun RKPD.

Penyusunan RKPD perlu **mengembangkan hubungan** (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga RKPD sebagai dokumen rencana tahunan **mudah diterjemahkan ke dalam** Renja SKPD, KUA APBD, RKA-SKPD, dan APBD.

Terdapat 9 (sembilan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

- Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Bappeda untuk menyiapkan RKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen RKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang RKPD dan penyampaian RKPD; status hukum RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi

penyusunan Renja SKPD. **Undang-Undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RKPD.**

Undang-Undang No 17/2003 tidak mengatur secara eksplisit tentang RKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD dalam kaitannya dengan perumusan KUA APBD dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi kerja (*performance budgeting*) dan prakiraan maju serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang No 32/2004 mengemukakan tentang RKPD sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Undang-Undang No 33/2004 mengemukakan tentang RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD dan RKA SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya RKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Renja SKPD dan RKA SKPD.

Peraturan Pemerintah No 58/2005 mengemukakan tentang penyusunan RKPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang penyusunan RKPD mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal; RKPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan KUA APBD dan PPAS untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.

Peraturan Pemerintah No 65/2005 menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 mengatur

secara lebih rinci tentang pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. SEB ini mengatur tentang tahapan musrenbang (pra dan pasca musrenbang), informasi yang perlu disediakan dalam musrenbang; masukan dan keluaran musrenbang; agenda; tipologi peserta musrenbang; organisasi penyelenggara, peranan dan tanggung jawab Bappeda dan SKPD dalam proses musrenbang. Secara keseluruhan, SEB ini telah memperlihatkan komitmen politik Pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat RKPD dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan Renja SKPD dan RAPBD, maka dokumen RKPD perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah diterjemahkan ke dalam rencana dan penganggaran tahunan daerah yang diatur dalam PERMENDAGRI No 13/2006. Ini bermakna bahwa RKPD perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. **Untuk itu, RKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas program dan kegiatannya, setiap program dan kegiatan perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.**

Pada saat ini, yang sedang dalam proses pengesahan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 32/2004 dan undang-Undang No 25/2004. Diharapkan PP ini akan dapat memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.

APA ITU
RKPD?

Sejalan dengan Undang-Undang No 25/2004, maka penyusunan RKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

LANDASAN
HUKUM

- **Teknokratis (Strategis)**
- **Demokratis dan partisipatif**
- **Politis**
- **Perencanaan Bottom- Up**
- **Perencanaan Top- Down**

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD

Teknokratis (Strategis)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD pada dasarnya **sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.**

KELUARAN
UTAMA RKPD

Sesuai fungsi RKPD untuk menjembatani rencana strategis jangka menengah dengan rencana dan program tahunan, maka elemen-elemen strategis yang mesti tercakup dalam RKPD adalah sebagai berikut:

INDIKATOR
KUALITAS
RKPD

- Ada review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu
- Ada rumusan status, kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini
- Ada rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD
- Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, **result oriented**, time bound)
- Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
- Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
- Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)
- Ada prioritas program dan kegiatan SKPD
- Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
- **Ada tolok ukur dan target kinerja keluaran**
- **Ada tolok ukur dan target kinerja hasil**
- **Ada pagu indikatif program dan kegiatan**
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, dan waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Demokratis dan Partisipatif

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RKPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan **di setiap tahapan** penyusunan RKPD
- Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder dalam pengambilan keputusan
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal
- Ada **sense of ownership** masyarakat terhadap RKPD
- Ada pelibatan dari media
- **Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif**
- **Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program**

Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan RKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:

- Ada konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- Ada keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD
- Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RKPD
- Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RKPD
- Ada pembahasan terhadap RANPERKADA RKPD
- Ada pengesahan RKPD sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan

Bottom-up

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:

- Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih
- Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- Mempertimbangkan hasil Forum Multi Stakeholder SKPD

Top down

Ini bermakna bahwa proses penyusunan RKPD perlu **bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:**

- Ada sinergi dengan RKP dan RENJA K/L
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- Ada sinergi dan **komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals, Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb**

Tujuan Utama / Goals MDG

Dalam MDG ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi angka kematian bayi
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber : Millennium Development Goals reports : an assessment UNDP

TOPIK	KELUARAN UTAMA RKPD
-------	---------------------

APA ITU
RKPD?

Adapun keluaran utama yang diharapkan dari hasil proses penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD

**KELUARAN
UTAMA RKPD**

INDIKATOR
KUALITAS
RKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Hasil Proses Teknokratis dan Strategis

- Profil Kinerja Pembangunan Daerah berisikan status, posisi, kedudukan, dan kinerja daerah dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-3 tahun ke depan.
- Dokumen RKPD yang telah disahkan berisikan rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja (Program, Kegiatan), Pagu Indikatif dan sumber pendanaannya sesuai dengan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif

- Naskah Kesepakatan Stakeholder dalam Konsultasi Publik pada tahapan penting perencanaan, Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Multi Stakeholder SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota, yang berisikan **konsensus dan kesepakatan rumusan tujuan, arah, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan serta pembiayaan RKPD, prioritas dan pagu indikatif program dan kegiatan.**

Hasil Proses Politis

- Hasil konsultasi dengan KDH dan DPRD
- PERKADA RKPD

APA ITU
RKPD?

Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh **kualitas program dan kegiatan RKPD yang disusun dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan bersama stakeholder melalui MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD.**

LANDASAN
HUKUM

Esensi RKPD

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD

- Disusun berdasarkan **Kerangka Penyelenggaraan Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.**
- Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan konsisten dengan visi, misi KDH, dan RPJMD.
- Arah pembangunan daerah dapat lebih dipahami oleh masyarakat; dengan demikian membangun '*sense of ownership*' dari rencana yang dibuat.
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pembangunan daerah yang prioritas dan mendesak.
- Kesesuaian dengan RKP dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI setiap tahunnya.
- Didasarkan pada kesepakatan dengan stakeholder yang dicapai melalui mekanisme Musrenbang RKPD dan Forum Multi Stakeholder SKPD.
- Disusun dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja.
- Penyusunannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder.
- Adanya dukungan data dan informasi yang akurat dan mutakhir.

KELUARAN
UTAMA RKPD

INDIKATOR
KUALITAS
RKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD

Elemen-Elemen Penting RKPD

- Analisis SWOT atas profil Kinerja Pembangunan Daerah
- Analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal daerah masa depan
- Analisis prioritas isu strategis pembangunan daerah
- Perumusan tujuan (SMART)
- Perumusan strategi untuk mengatasi isu
- Perumusan kebijakan
- Perumusan **program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja**
- Penyusunan **pagu indikatif** dan indikasi sumber pendanaan
- Implementasi Program
- Pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran rencana

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Kualitas RKPD

Berdasarkan pendekatan perencanaan strategis tersebut di atas, kualitas RKPD dapat diukur dari hal-hal di bawah ini:

- Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
- Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan.
- Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.
- Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pembangunan daerah.
- Ada **konsistensi** dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI.
- Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
- Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan **STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL**
- Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan RKPD
- Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan **Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD**

Prinsip Penyusunan APBD:

- a) Partisipasi Masyarakat
- b) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- c) Disiplin anggaran
- d) Keadilan anggaran
- e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- f) Taat Azas

(Permendagri No 26/2006)

APA ITU
RKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD

KELUARAN
UTAMA
RKPD

INDIKATOR
KUALITAS
RKPD

**KERANGKA
ANALISIS
RKPD**

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

RKPD dalam Kerangka PERMENDAGRI No 13/2006

Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, RKPD perlu mengikuti kerangka penyusunan anggaran tahunan yang telah ditentukan dalam PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. **Hal ini untuk memastikan bahwa RKPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada proses penganggaran tahunan, yaitu perumusan KUA APBD, PPAS, RAPBD, dan APBD.**

RKPD mencakup perencanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi:

- **Pelayanan umum**
- **Ketertiban dan keamanan**
- **Ekonomi**
- **Lingkungan hidup**
- **Perumahan dan fasilitas umum**
- **Kesehatan**
- **Pariwisata dan budaya**
- **Pendidikan**
- **Perlindungan sosial**

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH

Urusan Wajib

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Pemerintahan Umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Sumber : Lampiran A I Permendagri No 13/2006

Untuk kepentingan di atas, perlu dipahami table-tabel dari Permendagri No 13/2006, yang merupakan kerangka utama bagi penyusunan RKPD:

- Lampiran A.1 tentang Kode dan Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran A.V tentang Kode dan Klasifikasi Fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Lampiran A.VI tentang Pembagian Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.X tentang FORMAT KUA APBD
- Lampiran A. XI tentang FORMAT PPAS
- Lampiran A. XIV tentang FORMAT RKA-SKPD

Pengembangan Tolok Ukur Kinerja Pembangunan Daerah

Untuk mengembangkan analisis pembangunan daerah secara berkelanjutan, adalah penting bagi RKPD untuk mengembangkan tolok ukur kinerja untuk fungsi dan setiap urusan pelayanan wajib dan pilihan yang dapat menggambarkan dimana posisi dan kedudukan daerah masa kini dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib dan pilihan; mengidentifikasi urusan pelayanan wajib dan pilihan yang pada saat ini masih mengalami masalah; urusan pelayanan wajib mana yang perlu dikembangkan dan diperbaiki; seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh untuk menuju penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib atau pilihan yang optimal.

Pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang mencakup semua fungsi, urusan pelayanan wajib atau pilihan akan memperlihatkan secara jelas sejauh mana efektifitas sistem, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah yang telah dijalankan, mengidentifikasi apakah hubungan antara komponen-komponen fisik, lingkungan sosial, ekonomi telah terjalin baik; dapat mendeteksi segera apabila terdapat permasalahan dalam pelayanan SKPD dan dapat dirumuskan pemecahannya.

Pengembangan tolok ukur kinerja dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam kurun waktu rencana dari penyelenggaraan urusan pelayanan wajib atau pilihan tersebut di atas.

Pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah perlu melibatkan Forum Multi Stakeholder SKPD, karena sangat erat kaitannya dengan persepsi stakeholder tentang apa yang mereka anggap penting dalam pelayanan pemerintahan daerah.

Kriteria dalam pengembangan tolok ukur kinerja:

- **Relevan**
- **Mudah dipahami**
- **Reliable**
- **Informasi mudah diakses**
- **Memperlihatkan perspektif jangka menengah dan panjang**
- **Berhubungan dengan isu pembangunan daerah**
- **Memperlihatkan hubungan antara komponen pembangunan daerah**
- **Jumlah tolok ukur kinerja tidak terlalu banyak (3-5 tolok ukur kinerja kunci)**

Beberapa rujukan dalam pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang telah dikembangkan oleh Bappenas:

- **Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah**
- **Indeks Pembangunan Daerah**
- **Indikator Kemajuan Otonomi Daerah**
- **Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan Daerah**

Dalam kaitan di atas, RKPD perlu mengembangkan:

- Tolok ukur kinerja (3-5) untuk masing-masing fungsi dan urusan tersebut di atas yang dapat mencerminkan kemajuan pencapaian kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan tersebut secara berkelanjutan.
- Target kinerja untuk masing- masing fungsi tersebut di atas dalam lima tahun ke depan yang disesuaikan sejauh mungkin dengan target kinerja capaian program pemerintah, ketentuan peraturan, dan perundangan yang berlaku, standar pelayanan minimal, atau komitmen internasional.
- Posisi dan kedudukan daerah pada masa kini dalam penyelenggaraan urusan pelayanan wajib dan pilihan dari fungsi yang ditangani.
- Posisi dan kedudukan daerah yang diharapkan pada tahun rencana, dalam penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan wajib tersebut di atas.
- Analisis SWOT untuk menggambarkan secara lebih rinci kedudukan internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) daerah dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib, dan urusan pilihan.
- Program dan tolok ukur capaian kinerja program dalam 1 (satu) tahun ke depan untuk masing-masing urusan pelayanan.

APA ITU
RKPD?

Bagan 1 memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD yang dikembangkan oleh LGSP-USAID, yang mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.

LANDASAN
HUKUM

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan di sini yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RKPD yang terpadu.

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD

Alur Proses Strategis

KELUARAN
UTAMA
RKPD

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

INDIKATOR
KUALITAS
RKPD

Alur Proses Partisipatif

KERANGKA
ANALISIS RKPD

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi non government stakeholder seperti NGO, CSO, CBO untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD**

Alur Legislasi dan Politik

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Perda RKPD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

HANDOUT
PENDUKUNG

APA ITU
RKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD

KELUARAN
UTAMA RKPD

INDIKATOR
KUALITAS RKPD

KERANGKA
ANALISIS
RKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Tahap Persiapan

- T 1 Orientasi Perencanaan Daerah
- T 2 Pembentukan Tim Penyusun RKPD
- T 3 Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD
- T 20 Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
- T 21 Penetapan SK Tim Penyusun
- T 22 Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada NGS
- T 17 Identifikasi stakeholders
- T 18 Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik
- T 19 Penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbang

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- T 4 Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan
- T 5 Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)
- T 6 Pengumpulan Data/Informasi
- T 7 Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting
- T 8 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
- T 9 Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD
- T 10 Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD
- T 29 Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- T 30 Formulasi Dokumen Rancangan RKPD
- T 31 Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

- T 11 Review Renstra SKPD
- T 12 Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
- T 13 Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
- T 14 SPM- standar pelayanan minimal
- T 15 Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
- T 16 Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

- T 23 MUSRENBANG Desa/Kelurahan
- T 24 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan
- T 25 MUSRENBANG Kecamatan
- T 26 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan
- T 27 Pembahasan Forum SKPD
- T 28 Berita Acara kesepakatan Forum SKPD
- T 32 Musrenbang Daerah/RKPD
- T 33 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

- T 34 Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
- T 36 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD
- T 35 Formulasi Ranc.Akhir RKPD
- T 37 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala SKPD

Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

- T 38 Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD
- T 39 Penetapan Peraturan Kepala SKPD
- T 41 Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Kepala Daerah
- T 42 Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
- T 40 Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD)
- T 43 Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)

Keterangan:

T = Kode untuk langkah penyusunan rencana tahunan daerah (RKPD dan Renja SKPD)

TOPIK**HANDOUT PENDUKUNG**

**APA ITU
RKPD?**

Pengalaman Fasilitasi Penyusunan RKPD dan Renja SKPD:
Kasus di Kabupaten Klaten

**LANDASAN
HUKUM**

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RKPD**

**KELUARAN
UTAMA RKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS RKPD**

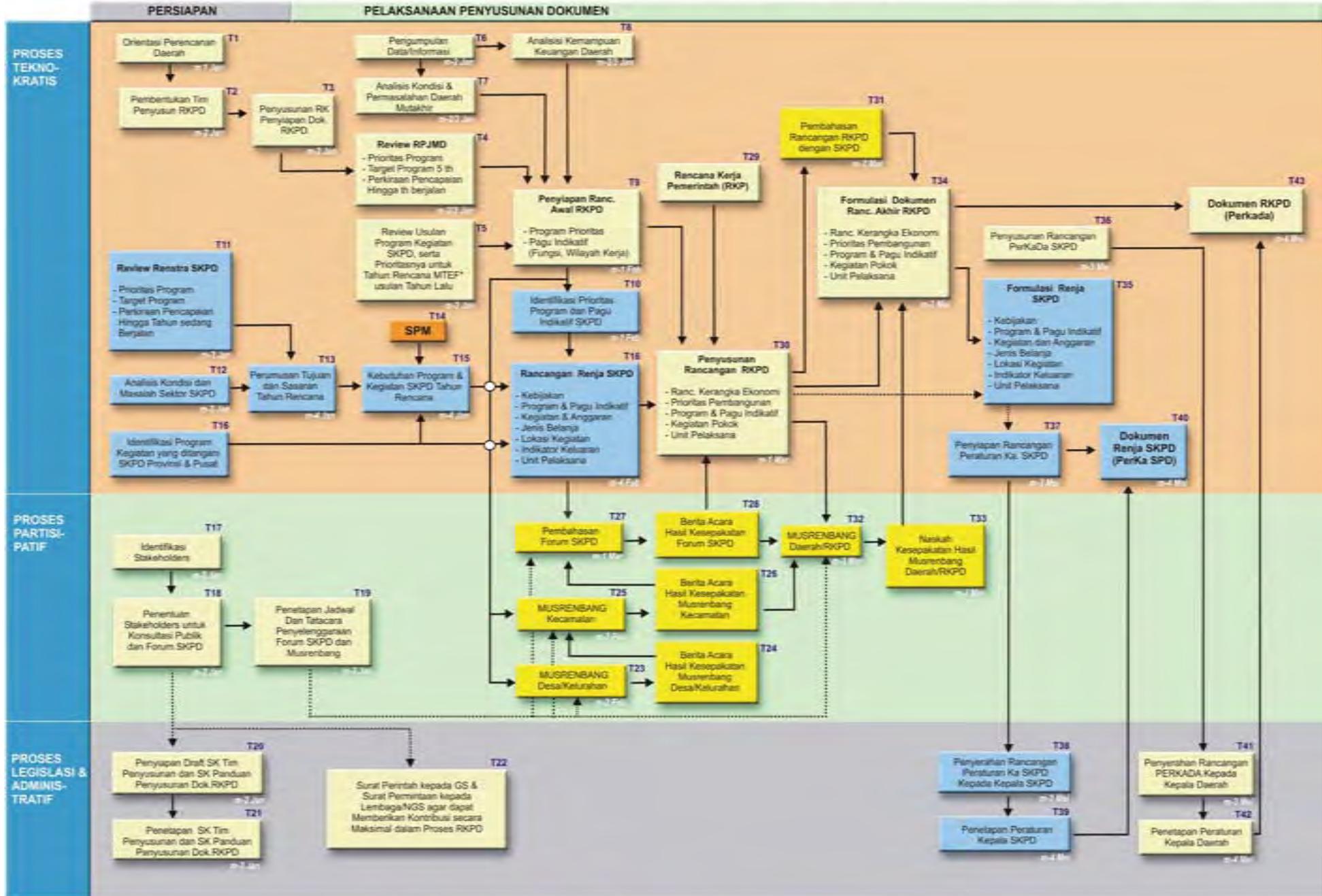
**KERANGKA
ANALISIS RKPD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RKPD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD)



KETERANGAN: Proses penyusunan RKPD Proses partisipatif Proses penyusunan Renja SKPD

T : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
m : Balas waktu penyelesaian pada minggu ke...

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan sosialisasi/ lokakarya tentang ketentuan sistem perencanaan daerah bagi calon anggota Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Tujuan kegiatan ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja SKPD. 2) Mengetahui bahwa substansi dokumen RKPD DAN Renja SKPD menjadi kewajiban daerah serta saling keterkaitan antar dokumen daerah. 3) Mengetahui peran dan fungsi setiap kelompok pemangku kepentingan dalam proses perencanaan RKPD dan Renja SKPD.
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami ketentuan peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan. 2) Mengetahui substansi pokok dan prinsip-prinsip dasar untuk setiap dokumen perencanaan daerah. 3) Memahami dan memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen RKPD dan Renja SKPD serta proses partisipatif yang harus dilakukan.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta lokakarya/sosialisasi orientasi perencanaan daerah adalah staf daerah yang dicalonkan menjadi anggota Tim Teknis Penyusunan dokumen serta para pengambil keputusan di daerah. • Di luar staf Pemda, dalam orientasi perlu juga dilibatkan peserta yang berasal dari non pemerintah, seperti Perguruan Tinggi setempat, serta organisasi masyarakat dan LSM yang punya kompetensi di bidang pembangunan daerah.



Dalam kegiatan orientasi perencanaan yang terkait proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD, unsur media perlu melengkapi pemahamannya dengan proses penyusunan serta muatan pokok RKPD dan Renja SKPD. Aspek pokok yang perlu dicermati, antara lain:

- Payung hukum-perundangan dan ketentuan-ketentuan peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD.
- Proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan proses agar lebih partisipatif, lebih berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat kecil dan lebih akuntabilitas.
- Substansi/muatan pokok dari dokumen RKPD dan Renja SKPD.
- Keterkaitan dokumen RKPD dan Renja SKPD dengan dokumen-dokumen rencana lainnya, baik di tingkat daerah, maupun dengan dokumen perencanaan yang hirarkinya lebih tinggi.
- Identifikasi tahapan proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD yang membutuhkan kontribusi media dalam rangka meningkatkan kinerja

Rancangan Awal RKPD yang secara garis besar memuat informasi sebagai berikut:

- Profil Kinerja Daerah
- Isu dan Permasalahan Strategis Daerah
- Tujuan dan Sasaran RKPD
- Arah Kebijakan RKPD (dalam kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum)
- Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Program SKPD, Lintas SKPD, dan Lintas Kewilayahan)
- Penjelasan Per Program dan Ker Kegiatan meliputi:
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur Masukan dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur Keluaran dan Target Kinerja keluaran
 - Tolok Ukur Hasil dan Target Kinerja Hasil
 - Pagu Indikatif



Pada tahapan formulasi dokumen rancangan awal RKPD, media dapat berperan untuk mensosialisasikan rancangan awal arah kebijakan pembangunan tahun rencana, khususnya berkaitan dengan program prioritas dan pagu indikatif, sehingga masyarakat dapat mengkritisi rancangan awal tersebut.

Pengantar

Perumusan Program dan Kegiatan Renja SKPD perlu memperhatikan **Standar Pelayanan Minimal**. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM mengatur tentang pengintegrasian SPM ke dalam penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mereview kesesuaian target kinerja capaian program dan kegiatan dengan **Standar Pelayanan Minimal** yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Departemen Teknis terkait. **STANDAR PELAYANAN MINIMAL yang layak menyediakan informasi untuk setiap kegiatan pelayanan dasar sebagai berikut:**

- Klasifikasi Fungsi Pemerintah Daerah
- Nama Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
- Nama dan Judul Kegiatan Pelayanan Dasar
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Pelayanan yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu
- Target Kinerja Keluaran
- Target Kinerja Hasil
- Target Kinerja Dampak
- Langkah- langkah melaksanakan kegiatan pelayanan
- Komposisi Sumber Daya (Personal, Material dan Peralatan) yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan dan keluaran
- Biaya Satuan untuk masing- masing Sumber Daya yang digunakan
- Biaya Satuan per keluaran Kegiatan Secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk:
- Mereview SPM yang relevan dengan kegiatan Renja SKPD yang direncanakan.
- Mereview kesesuaian Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan SKPD dengan Target SPM bagi Kabupaten/Kota
- Mereview kesesuaian Pagu Indikatif dengan SPM

Keluaran

- Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SKPD
- Target Kinerja Capaian Program
- Target Kinerja Capaian Kegiatan
- Target Kinerja Keluaran
- Target Kinerja Hasil
- Pagu Indikatif



Dalam hal Standar Pelayanan minimal (SPM) khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, media dapat melakukan:

- Sosialisasi ketentuan-ketentuan standar pelayanan yang ada atau telah ditetapkan kepada masyarakat, baik untuk skala nasional maupun skala daerah, sehingga diharapkan menjadi perhatian masyarakat dan sekaligus juga mengingatkan pada pemerintah beserta SKPD-SKPD terkait terhadap tugas pelayanannya.
- Media juga dapat memberikan opini terhadap tingkat pencapaian pelayanan yang ada dibandingkan terhadap SPM, kendala dan potensi peningkatan pelayanan, serta saran/kritik dan pemikirannya terhadap aspek tersebut.
- Memberikan komentar dan evaluasi sejauh mana penerapan SPM untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD telah diatur dalam SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan jadwal persiapan dan pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang (meliputi pra, pelaksanaan dan pasca Musrenbang).



Pada tahapan ini diharapkan peran media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota, serta ulasan hubungan antara musrenbang/forum SKPD dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga masyarakat mengetahui prosedur perencanaan pembangunan di daerah

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG KECAMATAN telah diatur dalam SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Forum SKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan usulan 'bottom-up' dari MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANG KECAMATAN dengan proses 'top-down' RANCANGAN Renja SKPD untuk menghasilkan RANCANGAN Renja SKPD yang lebih definitif. Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Forum SKPD diharapkan menghasilkan rumusan program dan kegiatan usulan SKPD untuk diakomodasikan dalam RANCANGAN RKPD.

Keluaran: Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodasikan 'bottom-up process' memuat secara garis besar:

- 1) Kode Fungsi
- 2) Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)
- 3) Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)
- 4) Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan permasalahan yang dihadapi)
- 5) Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan
- 6) Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)
- 7) Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran
- 8) Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
- 9) Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)

Hasil- hasil Forum SKPD dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang pada dasarnya untuk menformalisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat Forum SKPD tentang usulan program dan kegiatan. Naskah Kesepakatan dapat mencakup:

- Tujuan Forum SKPD
- Rangkuman Hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK (KOMISI)
- Usulan Prioritas Program, Kegiatan, dan Indikasi Sumber Dana (disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandatangani oleh perwakilan peserta, Ketua Panitia Forum SKPD, dan Pimpinan Sidang
- Daftar Delegasi yang akan mengikuti MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA
- Susunan keanggotaan Panitia Forum SKPD
- Daftar Peserta Forum SKPD



Pembahasan forum SKPD yang terkait dengan sektor pelayanan publik diharapkan kontribusi media untuk menginformasikan mulai dari jadwal dan agenda pembahasan, proses pembahasan, sampai dengan hasil-hasil kesepakatan pembahasan. Untuk sektor tersebut, bila perlu juga diberikan ulasan atau opini berkaitan dengan prioritas program dan dikaitkan dengan SPM yang hendak dicapai.

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD telah diatur dalam **SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.**

MUSRENBANG RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan usulan 'bottom-up' dari MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANG KECAMATAN dengan proses 'top-down' Rancangan RKPD dan Renja SKPD untuk menghasilkan Rancangan Akhir RKPD dan Renja SKPD.

Keluaran: Rancangan Akhir RKPD dan Renja SKPD yang telah mengakomodasikan 'bottom-up process'.

Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka MUSRENBANG RKPD diharapkan menghasilkan rumusan Rancangan Akhir RKPD yang memuat informasi tentang program dan kegiatan per SKPD (sesuai Lampiran A.X format RKPD):

- 1) Kode Fungsi
- 2) Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)
- 3) Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)
- 4) Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan permasalahan yang dihadapi)
- 5) Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan
- 6) Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)
- 7) Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran
- 8) Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
- 9) Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)

Hasil-hasil MUSRENBANG RKPD dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang pada dasarnya untuk menformalisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat MUSRENBANG RKPD tentang usulan program dan kegiatan. Naskah Kesepakatan dapat mencakup:

- Tujuan MUSRENBANG RKPD
- Rangkuman hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK (KOMISI)
- Usulan Prioritas Program, Kegiatan, dan Indikasi Sumber Dana (disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandatangani oleh perwakilan peserta dan Ketua Panitia Penyelenggara MUSRENBANG RKPD dan Pimpinan Sidang
- Usulan kebijakan/regulasi untuk peringkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat
- Susunan keanggotaan Panitia MUSRENBANG RKPD
- Daftar peserta MUSRENBANG RKPD



Pada tahapan ini, peran media diharapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca musrenbang. Pada tahap persiapan media dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai jadwal, agenda dan maksud kegiatan musrenbang, proses jalannya pembahasan musrenbang; memberikan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang; serta hasil-hasil kesepakatan yang diperoleh dari kegiatan musrenbang.

Hasil-hasil MUSRENBANG RKPD digunakan untuk memutakhirkan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD



Formulasi dokumen rancangan akhir RKPD merupakan penyempurnaan rancangan RKPD serta masukan-masukan atas Renja SKPD dan hasil-hasil kesepakatan musrenbang. Dalam hal ini media punya peran untuk mengawal hasil-hasil kesepakatan bersama masyarakat pada tahap proses penyusunan rancangan akhir serta menginformasikan kepada masyarakat hasil formulasi rancangan akhir RKPD khususnya menyangkut: rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, program dan pagu indikatif, serta kegiatan pokok tahun rencana.

BAGIAN 5



RENJA SKPD
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah

DAFTAR ISI RENJA SKPD

	Hal
Apa itu Renja SKPD	2
Landasan Hukum Renja SKPD	4
Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD	7
Keluaran Utama Renja SKPD	9
Indikator Kualitas Renja SKPD	10
Kerangka Analisis Renja SKPD	12
Alur Proses Penyusunan Renja SKPD	15
Step by step Penyusunan Renja SKPD	16
Template dan Handout	17
Daftar Peristilahan dan Singkatan	19
T 1 Orientasi Perencanaan Daerah	24
T 2 Pembentukan Tim Penyusun RKPD	26
T 3 Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKP	28
T 4 Review RPJMD dan pencapaian RKP tahun berjalan	31
T 5 Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)	31
T 6 Pengumpulan Data/Informasi	36
T 7 Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting	37
T 8 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	43
T 9 Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKP	44
T 10 Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD	44
T 11 Review Renstra SKPD	45
T 12 Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD	45
T 13 Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana	46
T 14 SPM- standar pelayanan minimal	49
T 15 Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana	50
T 16 Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi	50
T 17 Identifikasi stakeholders	51
T 18 Penentuan stakeholders untuk konsultasi publik	52
T 19 penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbang	53
T 20 Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKP	56
T 21 Penetapan SK Tim Penyusun	56
T 22 Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada NGS	56
T 23 MUSRENBANG Desa/Kelurahan	56
T 24 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan	57
T 25 MUSRENBANG Kecamatan	57
T 26 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan	59
T 27 Pembahasan Forum SKPD	59
T 28 Berita Acara kesepakatan Forum SKPD	64
T 29 Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	65
T 30 Formulasi Dokumen Rancangan RKP	66
T 31 Pembahasan Rancangan RKP dengan SKPD	69
T 32 Musrenbang Daerah/RKP	72
T 33 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKP	74
T 35 Formulasi Ranc.Akhir RKP	76
T 37 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala SKPD	76
T 40 Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD)	76
T 43 Dokumen RKP (Peraturan Kepala Daerah)	76

RENJA SKPD

(RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH)

BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI MEDIA



BAGIAN 5

Tentang LGSP



L GSP (Local Governance Support Program) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah merupakan program peningkatan kapasitas (2005-2009) yang didanai oleh United Agency for International Development (USAID). Program ini bertujuan memperkenalkan tata pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di beberapa provinsi terpilih di Indonesia. Prakarsa dan program LGSP ditujukan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah mitra, organisasi kemasyarakatan, dan media yang mencakup bidang perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan dan mobilisasi sumber daya, serta tata pemerintahan yang partisipatif. Sampai dengan September 2009, LGSP akan bekerja dengan lebih dari 55 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Irian Jaya Barat.

Pengantar



Bahan pelatihan dan pendampingan ini disusun oleh LGSP USAID dengan tujuan untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih baik tentang esensi Renja SKPD sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah. Bahan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu media dalam memahami Renja SKPD sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan dokumen Renja SKPD, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

APA ITU RENJA RKP?

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENJA SKPD

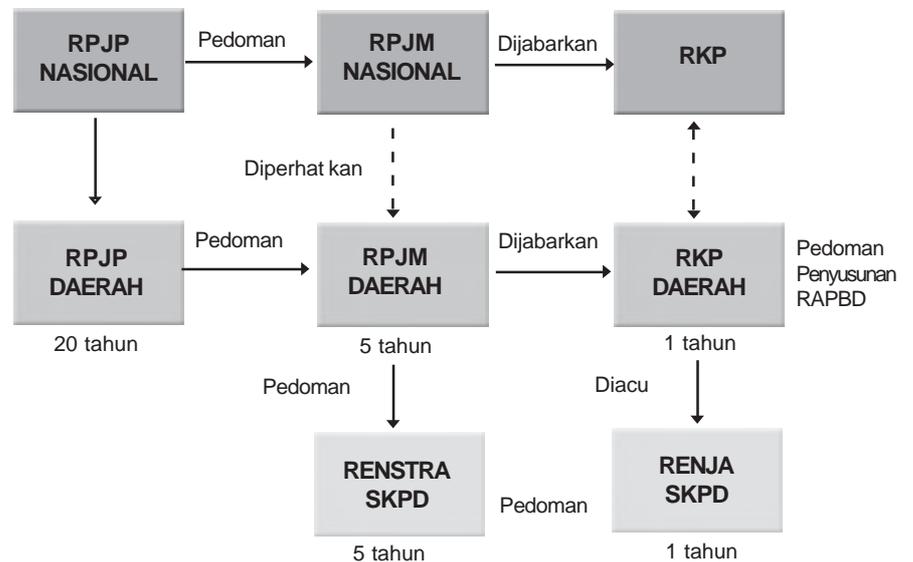
Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

KELUARAN UTAMA RENJA SKPD

ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT UU 25/2004

INDIKATOR KUALITAS RENJA SKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD



STEP BY STEP PENYUSUNAN RENJA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses

penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan **sangat fundamental** dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD **adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPd, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaannya.**

ESENSI RENJA SKPD

1. Merupakan penjabaran dari TUPOKSI SKPD
2. Selaras dengan Visi, Misi, dan Agenda SKPD
3. Selaras dengan dengan rencana resmi daerah di atasnya RKPd, Renstra SKPD, dan RPJMD
4. Mengakomodasikan hasil Forum Multi Stakeholder SKPD
5. Merupakan masukan utama bagi penyusunan Renstra SKPD, RKPd, dan RPJMD
6. Merupakan masukan utama bagi penyusunan RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD
7. Memuat:
 - Penjelasan Ringkas Latar Belakang, Tujuan dan Maksud Renja SKPD
 - Tujuan Renja SKPD yang selaras dengan tujuan RKPd dan Renstra SKPD serta TUPOKSI SKPD
 - Daftar program dan kegiatan pelayanan SKPD
 - Tolok ukur dan target capaian program SKPD
 - Tolok ukur dan target capaian kegiatan SKPD
 - Tolok ukur dan target kinerja masukan
 - Tolok ukur dan target kinerja keluaran
 - Tolok ukur dan target kinerja hasil
 - Biaya satuan sumber daya yang digunakan bagi pelaksanaan kegiatan
 - Biaya kegiatan (yang merupakan pagu indikatif kegiatan)
 - Biaya satuan per keluaran kegiatan (untuk mengukur efisiensi, kewajaran biaya per kegiatan)
 - Biaya program (yang merupakan pagu indikatif program)
 - Rencana kerja (**Program, Kegiatan**) dan pendanaannya
8. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penyusunan Renja SKPD:

1. Siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan Renja SKPD (Forum Multi Stakeholder SKPD)?
2. Bagaimana kinerja pelayanan SKPD pada tahun-tahun lampau? Sejauh mana pencapaian tujuan, capaian program, dan kegiatan?

3. Sejauh mana capaian tujuan dan sasaran pelayanan SKPD? Sejauh mana pencapaian visi dan misi SKPD dan Renstra SKPD?
4. Sejauh mana peringkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKPD sejauh ini?
5. Apa saja capaian positif tahun-tahun lalu yang perlu dipelihara dan dikembangkan? Apa saja faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran?
6. Peluang dan tantangan utama apa yang dihadapi dalam tahun rencana Renja SKPD?
7. Adakah perubahan signifikan perlu dilakukan dalam pengorganisasian program, kegiatan, dan penganggaran Renja SKPD tahun rencana?
8. Apakah **tujuan utama** Renja SKPD tahun rencana? Bagaimana kesesuaian dengan tujuan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD?
9. Apakah **tujuan dideskripsikan cukup jelas, berorientasi pada pelayanan masyarakat, mudah dipahami, dan terukur (results oriented) dan terkait erat dengan TUPOKSI SKPD?**
10. Apakah **tujuan** dilengkapi dengan **indikator kinerja capaian yang jelas?**
11. Apakah ada **kriteria** untuk menentukan prioritas program dan kegiatan Renja SKPD?
12. **Apakah prioritas program SKPD?**
13. **Apakah prioritas urusan pelayanan wajib yang akan diselenggarakan oleh SKPD?**
14. **Apakah prioritas kegiatan pelayanan wajib atau pilihan yang akan diselenggarakan oleh SKPD?**
15. **Bagaimana kesesuaiannya dengan hasil-hasil MUSRENBANG RKPD dan Forum Multi Stakeholder SKPD?**
16. Bagaimana hubungan dengan program dan kegiatan SKPD lain? (Program Lintas SKPD, Kewilayahan yang memerlukan kolaborasi antar SKPD)
17. Bagaimana ketersediaan pendanaan dan pembiayaan bagi program dan kegiatan SKPD dari semua sumber dana (APBD, ADD, APBD Provinsi, APBN, dana dekonsentrasi, dana pinjaman (PHLN)?

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renja SKPD perlu membangun **komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi Stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renja SKPD** melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

APA ITU RENJA SKPD?

LANDASAN HUKUM

Penyusunan RENJA SKPD perlu mengantisipasi tentang adanya diskrepansi (perbedaan) dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang belum adanya payung pengaturan yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran daerah yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran; masih terbatasnya pemahaman di daerah tentang *performance planning* walaupun penganggaran daerah telah menjalankan *performance budgeting* untuk beberapa waktu; waktu (5 bulan) yang diberikan dalam peraturan/perundangan untuk menyusun Renja SKPD.

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENJA SKPD

Penyusunan Renja SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renja SKPD sebagai dokumen rencana tahunan mudah diterjemahkan ke dalam KUA APBD, RKA-SKPD, dan APBD.

KELUARAN UTAMA RENJA SKPD

Terdapat 9 (sembilan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renja SKPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

INDIKATOR KUALITAS RENJA SKPD

- Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- Undang- Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
- SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RENJA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Undang-Undang No 25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Renja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Renja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi

penyusunan Renja SKPD. Undang-Undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Undang-Undang No 17/2003 tidak mengatur secara eksplisit tentang Renja SKPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD dalam kaitannya dengan perumusan KUA APBD dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi kerja (*performance budgeting*) dan prakiraan maju serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang-Undang No 32/2004 mengemukakan tentang Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-Undang No 33/2004 mengemukakan tentang RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD dan RKA SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan tentang perlunya penyusunan Renja SKPD dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya RKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Renja SKPD dan RKA SKPD.

Peraturan Pemerintah No 58/2005 mengemukakan bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Peraturan Pemerintah No 65/2005 menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dengan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 mengatur secara lebih rinci tentang pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. SEB ini mengatur tentang tahapan musrenbang (pra dan pasca musrenbang), informasi

yang perlu disediakan dalam musrenbang; masukan dan keluaran musrenbang; agenda; tipologi peserta musrenbang; organisasi penyelenggara, peranan dan tanggung jawab Bappeda dan SKPD dalam proses musrenbang. Secara keseluruhan, SEB ini telah memperlihatkan komitmen politik Pemerintah yang tinggi untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. Mengingat penyusunan Renja SKPD mengacu pada RKPD, maka Renja SKPD juga perlu mencerminkan kerangka penganggaran yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut. Untuk itu, Renja SKPD perlu menggunakan kerangka fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintahan daerah dalam menganalisis isu strategis, merumuskan strategi, kebijakan, dan menetapkan prioritas program dan kegiatannya, setiap program dan kegiatan perlu mempunyai tolok ukur dan target kinerja capaian program yang jelas.

Pada saat ini, yang sedang dalam proses pengesahan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 32/2004 dan undang-Undang No 25/2004. Diharapkan PP ini akan dapat memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.

APA ITU RENJA SKPD?

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENJA SKPD

KELUARAN UTAMA RENJA SKPD

INDIKATOR KUALITAS RENJA SKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RENJA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Sejalan dengan Undang-Undang 25/2004 maka penyusunan Renja SKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Teknokratis (Strategis)
- Demokratis dan partisipatif
- Politis
- Perencanaan Bottom- Up
- Perencanaan Top- Down

Teknokratis (Strategis)

Dokumen Renja SKPD merupakan perencanaan tahunan. Kualitas Dokumen Renja SKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD dan Forum SKPD. Penyusunan Renja SKPD pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Fungsi Renja SKPD adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD:

- Ada review menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD Tahun lalu
- Ada rumusan status, kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini
- Ada rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi pelayanan SKPD
- Ada review terhadap kesesuaian TUPOKSI
- Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, result oriented, time bound*)
- Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan
- Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi
- Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)
- Ada prioritas program dan kegiatan pelayanan SKPD
- Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
- Ada tolok ukur dan target kinerja keluaran
- Ada tolok ukur dan target kinerja hasil
- Ada pagu indikatif program dan kegiatan
- Ada jumlah perkiraan belanja kegiatan pada tahun rencana (n), tahun sebelumnya (n-1), dan tahun berikutnya (n+1)

- Ada *pro poor* dan *gender mainstreaming* dalam proses penyusunan rencana
- Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran, dan hasil, serta waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

Demokratis dan Partisipatif

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renja SKPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- Ada identifikasi *stakeholder* yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan Renja SKPD
- Ada kesetaraan antara *government* dan *non government stakeholders* dalam pengambilan keputusan
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
- Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal
- Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap Renja SKPD
- Ada pelibatan dari media
- Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Forum SKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif
- Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program

Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan Renja SKPD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD:

- Ada konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pelayanan SKPD
- Ada keterlibatan aktif DPRD dalam pembahasan di Forum SKPD
- Ada pembahasan hasil penjangkaran aspirasi konstituen (Reses) DPRD dalam Forum Multi *Stakeholder* SKPD
- Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan Renja SKPD

Bottom-up

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renja SKPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat:

- Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih dan relevansi TUPOKSI terhadap permasalahan yang ada masa kini
- Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah
- Mempertimbangkan hasil Forum Multi *Stakeholder* SKPD

Top down

Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renja SKPD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- Ada sinergi dengan RKPD
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD
- Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD
- Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals*, pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sanitasi dsb

Tujuan Utama / Goals MDG

Dalam MDG ditetapkan delapan tujuan utama yang perlu ditindaklanjuti oleh setiap negara yang meliputi:

1. memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. mewujudkan pendidikan dasar
3. meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. mengurangi angka kematian bayi
5. meningkatkan kesehatan ibu.
6. memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
7. menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan

Sumber : Millennium Development Goals reports : an assessment UNDP

APA ITU RENJA SKPD?

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENJA SKPD

KELUARAN UTAMA RENJA SKPD

INDIKATOR KUALITAS RENJA SKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RENJA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Adapun keluaran utama yang diharapkan dari hasil proses penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

Hasil Proses Teknokratis dan Strategis

- Profil Kinerja Pelayanan SKPD berisikan status, posisi, kedudukan, dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-3 tahun ke depan.

- Dokumen Renja SKPD yang telah disahkan berisikan daftar program, kegiatan, dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya yang disusun sesuai dengan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil Proses Demokratis dan Partisipatif

- Naskah Kesepakatan *Stakeholder* dalam Konsultasi Forum Multi *Stakeholder* SKPD, Musrenbang Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota yang berisikan konsensus dan kesepakatan rumusan tujuan, arah, strategi dan kebijakan pelayanan SKPD, prioritas program dan kegiatan, rencana belanja kegiatan, dan sumber pendanaan.

Hasil Proses Politis

- Hasil konsultasi dengan KDH dan DPRD
- Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD

APA ITU RENJA SKPD?

Kualitas Dokumen Renja SKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan RKP yang disusun dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan bersama *stakeholder* melalui Musrenbang dan Forum Multi *Stakeholder* SKPD.

LANDASAN HUKUM

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENJA SKPD

KELUARAN UTAMA RENJA SKPD

INDIKATOR KUALITAS RENJA SKPD

BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD

STEP BY STEP PENYUSUNAN RENJA SKPD

HANDOUT PENDUKUNG

Esensi Renja SKPD

- Disusun berdasarkan Kerangka Penyelenggaraan Fungsi, Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah
- Tata cara penyusunan program dan kegiatan mengikuti PERMENDAGRI No 13/2006, memuat:
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
 - Perkiraan Belanja Kegiatan (n-1, n, dan n+1)
- Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan SKPD dengan memenuhi asas SMART dan konsisten dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi KDH, dan RPJMD.
- Arah pelayanan SKPD dapat lebih dipahami oleh masyarakat; dengan demikian membangun '*sense of ownership*' dari Renja SKPD yang dibuat
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu pelayanan SKPD yang prioritas dan mendesak
- Kesesuaian dengan RKP dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI setiap tahunnya
- Didasarkan pada kesepakatan dengan *stakeholder* yang dicapai melalui mekanisme Musrenbang RKP dan Forum Multi *Stakeholder* SKPD
- Disusun dengan pendekatan perencanaan berbasis kinerja
- Penyusunannya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder
- Adanya dukungan data dan informasi yang akurat dan mutakhir

Elemen-Elemen Penting Renja SKPD

- Analisis SWOT atas profil Kinerja Pelayanan SKPD
- Analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal SKPD masa depan
- Analisis prioritas isu strategis pelayanan SKPD
- Perumusan tujuan (SMART)
- Perumusan strategi untuk mengatasi isu
- Perumusan kebijakan
- Perumusan program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja
- Satuan biaya sumber daya kegiatan
- Satuan biaya per keluaran kegiatan
- Perkiraan belanja kegiatan

- Pagu indikatif dan indikasi sumber pendanaan
- Implementasi Program
- Pemantauan, evaluasi, dan pemutakhiran rencana

Kualitas Renja SKPD

Berdasarkan pendekatan perencanaan strategis tersebut di atas, kualitas Renja SKPD dapat diukur dari hal-hal dibawah ini:

- Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
- Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan.
- Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD dan merumuskan apa yang perlu dilakukan agar kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.
- Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat
- Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI
- Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari pelayanan SKPD
- Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal
- Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi *Stakeholder* SKPD

Prinsip Penyusunan APBD:

- a) Partisipasi Masyarakat
- b) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- c) Disiplin anggaran
- d) Keadilan anggaran
- e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- f) Taat Azas

(Permendagri No 26/2006)

APA ITU RENJA SKPD?**LANDASAN HUKUM****PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RENJA SKPD****KELUARAN UTAMA RENJA SKPD****INDIKATOR KUALITAS RENJA SKPD****Renja SKPD dalam Kerangka PERMENDAGRI No 13/2006**

Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja SKPD perlu mengikuti kerangka penyusunan anggaran tahunan yang telah ditentukan dalam PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa RKPD dapat diterjemahkan secara konsisten kepada proses penganggaran tahunan, yaitu perumusan KUA APBD, PPAS, RAPBD, dan APBD.

Renja SKPD mencakup perencanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi:

- Pelayanan umum
- Ketertiban dan keamanan
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan budaya
- Pendidikan
- Perlindungan sosial

KERANGKA ANALISIS RENJA SKPD**BAGAN ALIR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD****STEP BY STEP PENYUSUNAN RENJA SKPD****HANDOUT PENDUKUNG****URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH****Urusan Wajib**

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Pemerintahan Umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Sumber : Lampiran A I Permendagri No 13/2006

Untuk kepentingan di atas, perlu dipahami adanya table-tabel dari Permendagri No 13/2006, yang merupakan kerangka utama bagi penyusunan RKPD:

- Lampiran A.1 tentang Kode dan Klasifikasi urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran A.V tentang Kode dan Klasifikasi Fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Lampiran A.VI tentang Pembagian Fungsi, Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
- Lampiran A.X tentang FORMAT KUAAPBD
- Lampiran A. XI tentang FORMAT PPAS
- Lampiran A. XIV tentang FORMAT RKA-SKPD

Pengembangan Tolok Ukur Kinerja Pembangunan Daerah

Untuk mengembangkan analisis pelayanan SKPD secara berkelanjutan, adalah penting bagi masing-masing SKPD untuk mengembangkan tolok ukur kinerja untuk fungsi dan setiap urusan pelayanan wajib dan pilihan yang dapat menggambarkan dimana posisi dan kedudukan daerah masa kini dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib dan pilihan; mengidentifikasi urusan pelayanan wajib dan pilihan yang pada saat ini masih mengalami masalah; urusan pelayanan wajib mana yang perlu dikembangkan dan diperbaiki; seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh untuk menuju penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib atau pilihan yang optimal.

HIRARKI TOLOK UKUR KINERJA**Tolok Ukur Kinerja Kabupaten/Kota**

Memperlihatkan secara makro kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah; yang sekaligus dapat memberikan gambaran kinerja masing-masing SKPD

Tolok Ukur Kinerja Program

Memperlihatkan kinerja SKPD dalam menyelenggarakan program sesuai TUPOKSI SKPD dan fungsi pemerintahan daerah

Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Memperlihatkan kinerja pelayanan SKPD pada peringkat kegiatan pelayanan; yang ditunjukkan dengan realisasi target capaian program, keluaran, dan hasil

Adalah penting bagi masing-masing SKPD memiliki tolok ukur kinerja yang relevan untuk masing-masing peringkat di atas.

Pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang mencakup semua fungsi, urusan pelayanan wajib atau pilihan akan memperlihatkan secara jelas sejauh mana efektifitas sistem, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah yang telah dijalankan, mengidentifikasi apakah hubungan antara komponen-komponen fisik, lingkungan sosial, ekonomi telah terjalin baik; dapat mendeteksi segera apabila terdapat permasalahan dalam pelayanan SKPD dan dapat dirumuskan pemecahannya.

Pengembangan tolok ukur kinerja dapat memperlihatkan sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam masa lima tahun ke depan dari penyelenggaraan urusan pelayanan wajib atau pilihan tersebut di atas.

Pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah perlu melibatkan Forum Multi *Stakeholder* SKPD, karena sangat erat kaitannya dengan persepsi *stakeholder* tentang apa yang mereka anggap penting dalam pelayanan pemerintahan daerah.

Kriteria dalam pengembangan tolok ukur kinerja:

- Relevan
- Mudah dipahami
- *Reliable*
- Informasi mudah diakses
- Memperlihatkan perspektif jangka menengah dan panjang
- Berhubungan dengan isu pembangunan daerah
- Memperlihatkan hubungan antara komponen pembangunan daerah
- Jumlah tolok ukur kinerja tidak terlalu banyak (3-5 tolok ukur kinerja kunci)

Beberapa rujukan dalam pengembangan tolok ukur kinerja pembangunan daerah yang telah dikembangkan oleh Bappenas:

- Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Indeks Pembangunan Daerah
- Indikator Kemajuan Otonomi Daerah
- Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan Daerah

Dalam kaitan di atas, Renja SKPD perlu mengembangkan:

- Tolok ukur kinerja (3-5) untuk masing-masing fungsi dan urusan tersebut di atas yang dapat mencerminkan kemajuan pencapaian kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan tersebut secara berkelanjutan.
- Target kinerja untuk masing- masing fungsi tersebut di atas dalam lima tahun ke depan yang disesuaikan sejauh mungkin dengan target kinerja capaian program pemerintah, ketentuan peraturan, dan perundangan yang berlaku, standar pelayanan minimal, atau komitmen internasional.
- Posisi dan kedudukan SKPD pada masa kini dalam penyelenggaraan urusan pelayanan wajib dan pilihan dari fungsi yang ditangani.
- Posisi dan kedudukan SKPD yang diharapkan pada tahun rencana, dalam penyelenggaraan fungsi dan urusan pelayanan wajib tersebut di atas.
- Analisis SWOT untuk menggambarkan secara lebih rinci kedudukan internal (kelemahan dan kekuatan) dan eksternal (tantangan dan peluang) SKPD dalam penyelenggaraan fungsi, urusan pelayanan wajib, dan urusan pilihan.
- Program dan tolok ukur capaian kinerja program dalam 1 (satu) tahun ke depan untuk masing-masing urusan pelayanan.

APA ITU RENJA
SKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENJA SKPD

KELUARAN
UTAMA RENJA
SKPD

INDIKATOR
KUALITAS
RENJA SKPD

KERANGKA
ANALISIS RENJA
SKPD

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENJA SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Bagan 1 memperlihatkan alur proses penyusunan RKPd dan Renja SKPD yang dikembangkan oleh LGSP-USAID, yang mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan di sini yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan Renja SKPD yang terpadu.

Alur Proses Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory events*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

**APA ITU RENJA
SKPD?**

**LANDASAN
HUKUM**

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

**KELUARAN
UTAMA RENJA
SKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS
RENJA SKPD**

**KERANGKA
ANALISIS RENJA
SKPD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

Tahap Persiapan

- T 1 Orientasi Perencanaan Daerah
- T 2 Pembentukan Tim Penyusun RKPD
- T 3 Penyusunan RK Penyiapan Dok. RKPD
- T 20 Penyiapan draft SK Tim Penyusun RKPD
- T 21 Penetapan SK Tim Penyusun
- T 22 Surat Perintah kepada GS dan surat permintaan kepada NGS
- T 17 Identifikasi *stakeholders*
- T 18 Penentuan *stakeholders* untuk konsultasi publik
- T 19 penetapan jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan Musrenbang

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

- T 4 Review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan
- T 5 Review usulan Program Kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana (prakiraan maju)
- T 6 Pengumpulan Data/Informasi
- T 7 Analisis Kondisi dan permasalahan daerah eksisting
- T 8 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
- T 9 Formulasi Dokumen Rancangan Awal RKPD
- T 10 Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif SKPD
- T 29 Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- T 30 Formulasi Dokumen Rancangan RKPD
- T 31 Pembahasan Rancangan RKPD dengan SKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD

- T 11 Review Renstra SKPD
- T 12 Analisis kondisi dan masalah sektor SKPD
- T 13 Perumusan Tujuan dan Sasaran Tahun Rencana
- T 14 SPM- standar pelayanan minimal
- T 15 Kebutuhan Program dan Kegiatan SKPD tahun Rencana
- T 16 Identifikasi Program kegiatan Pusat dan Provinsi

Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah

- T 23 MUSRENBANG Desa/Kelurahan
- T 24 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa/Kelurahan
- T 25 MUSRENBANG Kecamatan
- T 26 Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang kecamatan
- T 27 Pembahasan Forum SKPD
- T 28 Berita Acara kesepakatan Forum SKPD
- T 32 Musrenbang Daerah/RKPD
- T 33 Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbangda/RKPD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD

- T 34 Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
- T 36 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan PerKada RKPD
- T 35 Formulasi Ranc.Akhir RKPD
- T 37 Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Kepala SKPD

Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD

- T 38 Penyerahan rancangan Peraturan Ka SKPD ke Kepala SKPD
- T 39 Penetapan Peraturan Kepala SKPD
- T 41 Penyerahan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Kepala Daerah
- T 42 Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD
- T 40 Dokumen Renja SKPD (peraturan Kepala SKPD)
- T 43 Dokumen RKPD (Peraturan Kepala Daerah)

TOPIK**HANDOUT PENDUKUNG**

**APA ITU RENJA
SKPD?**

Pengalaman Fasilitasi Penyusunan RKPD dan Renja SKPD:
Kasus di Kabupaten Klaten

**LANDASAN
HUKUM**

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

**KELUARAN
UTAMA RENJA
SKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS
RENJA SKPD**

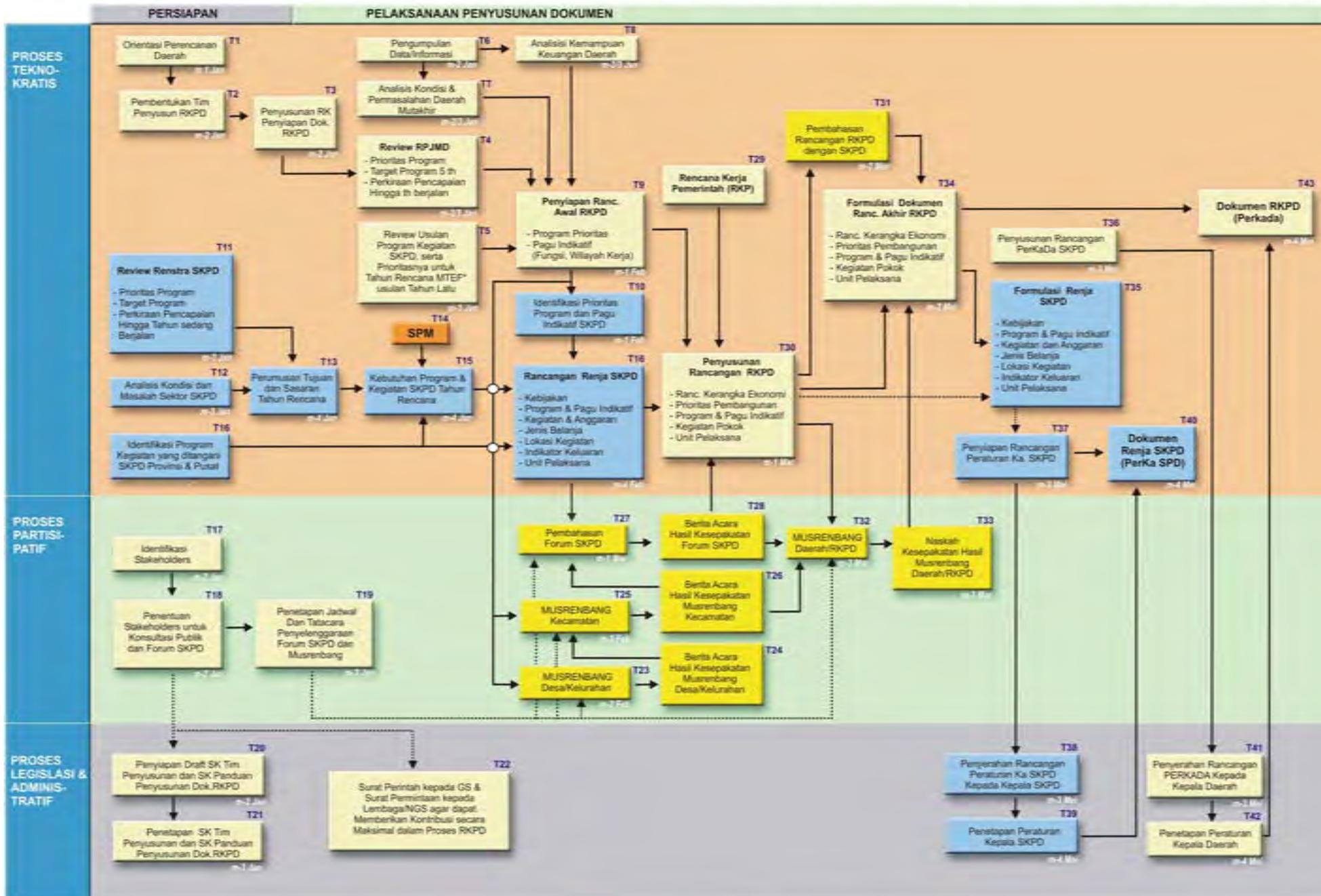
**KERANGKA
ANALISIS RENJA
SKPD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
RENJA SKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN DOKUMEN RENCANA KERJA SKPD (RENJA SKPD)



KETERANGAN: Proses penyusunan RKPD Proses partisipatif Proses penyusunan Renja SKPD

T : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan RKPD dan Renja SKPD
m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...

Tujuan	<p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengadakan sosialisasi/ lokakarya tentang ketentuan sistem perencanaan daerah bagi calon anggota Tim Penyusun RKPD dan Renja SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Tujuan kegiatan ini mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetahui ketentuan regulasi yang berkaitan dengan proses dan mekanisme pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja SKPD. 2) Mengetahui bahwa substansi dokumen RKPD DAN Renja SKPD menjadi kewajiban daerah serta saling keterkaitan antar dokumen daerah. 3) Mengetahui peran dan fungsi setiap kelompok pemangku kepentingan dalam proses perencanaan RKPD dan Renja SKPD.
Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami ketentuan peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan. 2) Mengetahui substansi pokok dan prinsip-prinsip dasar untuk setiap dokumen perencanaan daerah. 3) Memahami dan memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen RKPD dan Renja SKPD serta proses partisipatif yang harus dilakukan.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta lokakarya/sosialisasi orientasi perencanaan daerah adalah staf daerah yang dicalonkan menjadi anggota Tim Teknis Penyusunan dokumen serta para pengambil keputusan di daerah. • Di luar staf Pemda, dalam orientasi perlu juga dilibatkan peserta yang berasal dari non pemerintah, seperti Perguruan Tinggi setempat, serta organisasi masyarakat dan LSM yang punya kompetensi di bidang pembangunan daerah.



Dalam kegiatan orientasi perencanaan yang terkait proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD, unsur media perlu melengkapi pemahamannya dengan proses penyusunan serta muatan pokok RKPD dan Renja SKPD. Aspek pokok yang perlu dicermati, antara lain:

- Payung hukum-perundangan dan ketentuan-ketentuan peraturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD.
- Proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan proses agar lebih partisipatif, lebih berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat kecil dan lebih akuntabilitas.
- Substansi/muatan pokok dari dokumen RKPD dan Renja SKPD.
- Keterkaitan dokumen RKPD dan Renja SKPD dengan dokumen-dokumen rencana lainnya, baik di tingkat daerah, maupun dengan dokumen perencanaan yang hirarkinya lebih tinggi.
- Identifikasi tahapan proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD yang membutuhkan kontribusi media dalam rangka meningkatkan kinerja.

Rancangan Awal RKPD yang secara garis besar memuat informasi sebagai berikut:

- Profil Kinerja Daerah
- Isu dan Permasalahan Strategis Daerah
- Tujuan dan Sasaran RKPD
- Arah Kebijakan RKPD (dalam kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum)
- Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Program SKPD, Lintas SKPD, dan Lintas Kewilayahan)
- Penjelasan Per Program dan Ker Kegiatan meliputi:
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur Masukan dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur Keluaran dan Target Kinerja keluaran
 - Tolok Ukur Hasil dan Target Kinerja Hasil
 - Pagu Indikatif



Pada tahapan formulasi dokumen rancangan awal RKPD, media dapat berperan untuk mensosialisasikan rancangan awal arah kebijakan pembangunan tahun rencana, khususnya berkaitan dengan program prioritas dan pagu indikatif, sehingga masyarakat dapat mengkritisi rancangan awal tersebut.

Pengantar

Perumusan Program dan Kegiatan Renja SKPD perlu memperhatikan **Standar Pelayanan Minimal**. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM mengatur tentang pengintegrasian SPM ke dalam penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan daerah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mereview kesesuaian target kinerja capaian program dan kegiatan dengan **Standar Pelayanan Minimal** yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Departemen Teknis terkait.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL yang layak menyediakan informasi untuk setiap kegiatan pelayanan dasar sebagai berikut:

- Klasifikasi Fungsi Pemerintah Daerah
- Nama Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
- Nama dan Judul Kegiatan Pelayanan Dasar
- Tolok Ukur dan Target Kinerja Pelayanan yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu
- Target Kinerja Keluaran
- Target Kinerja Hasil
- Target Kinerja Dampak
- Langkah- langkah melaksanakan kegiatan pelayanan
- Komposisi Sumber Daya (Personal, Material dan Peralatan) yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan dan keluaran
- Biaya Satuan untuk masing- masing Sumber Daya yang digunakan
- Biaya Satuan per keluaran Kegiatan

Secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk:

- Mereview SPM yang relevan dengan kegiatan Renja SKPD yang direncanakan.
- Mereview kesesuaian Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan SKPD dengan Target SPM bagi Kabupaten/Kota
- Mereview kesesuaian Pagu Indikatif dengan SPM

Keluaran

- Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan SKPD
- Target Kinerja Capaian Program
- Target Kinerja Capaian Kegiatan
- Target Kinerja Keluaran
- Target Kinerja Hasil
- Pagu Indikatif



Dalam hal Standar Pelayanan minimal (SPM) khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, media dapat melakukan:

- Sosialisasi ketentuan-ketentuan standar pelayanan yang ada atau telah ditetapkan kepada masyarakat, baik untuk skala nasional maupun skala daerah, sehingga diharapkan menjadi perhatian masyarakat dan sekaligus juga mengingatkan pada pemerintah beserta SKPD-SKPD terkait terhadap tugas pelayanannya.
- Media juga dapat memberikan opini terhadap tingkat pencapaian pelayanan yang ada dibandingkan terhadap SPM, kendala dan potensi peningkatan pelayanan, serta saran/kritik dan pemikirannya terhadap aspek tersebut.
- Memberikan komentar dan evaluasi sejauh mana penerapan SPM untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD telah diatur dalam SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Kegiatan ini ditujukan untuk menetapkan jadwal persiapan dan pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang (meliputi pra, pelaksanaan dan pasca Musrenbang).



Pada tahapan ini diharapkan peran media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jadwal dan tata cara penyelenggaraan forum SKPD dan musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota, serta ulasan hubungan antara musrenbang/forum SKPD dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga masyarakat mengetahui prosedur perencanaan pembangunan di daerah

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG KECAMATAN telah diatur dalam SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

Forum SKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan usulan 'bottom-up' dari MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANG KECAMATAN dengan proses 'top-down' RANCANGAN Renja SKPD untuk menghasilkan RANCANGAN Renja SKPD yang lebih definitif. Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Forum SKPD diharapkan menghasilkan rumusan program dan kegiatan usulan SKPD untuk diakomodasikan dalam RANCANGAN RKPD.

Keluaran: Rancangan Renja SKPD yang telah mengakomodasikan 'bottom-up process' memuat secara garis besar:

- 1) Kode Fungsi
- 2) Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)
- 3) Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)
- 4) Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan permasalahan yang dihadapi)
- 5) Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan
- 6) Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)
- 7) Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran
- 8) Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
- 9) Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)

Hasil- hasil Forum SKPD dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang pada dasarnya untuk menformalisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat Forum SKPD tentang usulan program dan kegiatan. Naskah Kesepakatan dapat mencakup:

- Tujuan Forum SKPD
- Rangkuman Hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK (KOMISI)
- Usulan Prioritas Program, Kegiatan, dan Indikasi Sumber Dana (disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandatangani oleh perwakilan peserta, Ketua Panitia Forum SKPD, dan Pimpinan Sidang
- Daftar Delegasi yang akan mengikuti MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA
- Susunan keanggotaan Panitia Forum SKPD
- Daftar Peserta Forum SKPD



Pembahasan forum SKPD yang terkait dengan sektor pelayanan publik diharapkan kontribusi media untuk menginformasikan mulai dari jadwal dan agenda pembahasan, proses pembahasan, sampai dengan hasil-hasil kesepakatan pembahasan. Untuk sektor tersebut, bila perlu juga diberikan ulasan atau opini berkaitan dengan prioritas program dan dikaitkan dengan SPM yang hendak dicapai.

Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD telah diatur dalam **SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.**

MUSRENBANG RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan usulan 'bottom-up' dari MUSRENBANG DESA/KELURAHAN dan MUSRENBANG KECAMATAN dengan proses 'top-down' Rancangan RKPD dan Renja SKPD untuk menghasilkan Rancangan Akhir RKPD dan Renja SKPD.

Keluaran: Rancangan Akhir RKPD dan Renja SKPD yang telah mengakomodasikan 'bottom-up process'.

Sesuai ketentuan PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka MUSRENBANG RKPD diharapkan menghasilkan rumusan Rancangan Akhir RKPD yang memuat informasi tentang program dan kegiatan per SKPD (sesuai Lampiran A.X format RKPD):

- 1) Kode Fungsi
- 2) Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan (dimana permasalahan ditemukan)
- 3) Kode SKPD (yang diharapkan akan menangani usulan)
- 4) Kode dan Nama, Judul Program yang diusulkan (terkait dengan permasalahan yang dihadapi)
- 5) Kode dan Nama, Judul Kegiatan yang diusulkan
- 6) Tolok ukur dan Target Kinerja Capaian Kegiatan (Besaran Kegiatan)
- 7) Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Keluaran
- 8) Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
- 9) Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)

Hasil-hasil MUSRENBANG RKPD dituangkan dalam Naskah Kesepakatan yang pada dasarnya untuk menformalisasikan kesepakatan yang dicapai di peringkat MUSRENBANG RKPD tentang usulan program dan kegiatan. Naskah Kesepakatan dapat mencakup:

- ➔ Tujuan MUSRENBANG RKPD
- ➔ Rangkuman hasil SIDANG PLENO dan SIDANG KELOMPOK (KOMISI)
- ➔ Usulan Prioritas Program, Kegiatan, dan Indikasi Sumber Dana (disusun sesuai PERMENDAGRI 13/2006) yang ditandatangani oleh perwakilan peserta dan Ketua Panitia Penyelenggara MUSRENBANG RKPD dan Pimpinan Sidang
- ➔ Usulan kebijakan/regulasi untuk peringkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat
- ➔ Susunan keanggotaan Panitia MUSRENBANG RKPD
- ➔ Daftar peserta MUSRENBANG RKPD



Pada tahapan ini, peran media diharapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca musrenbang. Pada tahap persiapan media dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai jadwal, agenda dan maksud kegiatan musrenbang, proses jalannya pembahasan musrenbang; memberikan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang; serta hasil-hasil kesepakatan yang diperoleh dari kegiatan musrenbang.

Hasil-hasil MUSRENBANG RKPD digunakan untuk memutakhirkan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD



Formulasi dokumen rancangan akhir RKPD merupakan penyempurnaan rancangan RKPD serta masukan-masukan atas Renja SKPD dan hasil-hasil kesepakatan musrenbang. Dalam hal ini media punya peran untuk mengawal hasil-hasil kesepakatan bersama masyarakat pada tahap proses penyusunan rancangan akhir serta menginformasikan kepada masyarakat hasil formulasi rancangan akhir RKPD khususnya menyangkut: rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, program dan pagu indikatif, serta kegiatan pokok tahun rencana.

BAGIAN 6



KUA PPAS RKA-SKPD
(Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafond
Anggaran Sementara dan Rencana Kerja
Anggaran SKPD)

DAFTAR ISI RENJA SKPD

	Hal	
	Apa itu KUA, PPAS, RKA-SKPD	2
	Landasan Hukum KUA, PPAS, RKA-SKPD	5
	Prinsip-prinsip Penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD	7
	Keluaran Utama KUA, PPAS, RKA-SKPD	8
	Indikator Kualitas KUA, PPAS, RKA-SKPD	9
	Kerangka Analisis KUA, PPAS, RKA-SKPD	10
	Alur Proses Penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD	12
	Step by step Penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD	13
	Template dan Handout	15
	Daftar Peristilahan dan Singkatan	17
K 1	Pembentukan Tim Anggaran Pemda (TAPD)	21
K 2	Pedoman Penyusunan APBD dari Mendagri	21
K 3	Penyusunan Rancangan KUA	21
K 4	Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah	23
K 5	Penyampaian Rancangan KUA kepada DPRD	23
K 6	Pokok-pokok Pikiran DPRD	23
K 7	Pembahasan KUA (TAPD dengan DPRD)	23
K 8	Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD	24
K 9	Dokumen Kebijakan Umum APBD	24
K 10	Penyusunan Rancangan PPAS	24
K 11	Penyampaian Rancangan PPAS kepada DPRD	26
K 12	Pembahasan PPAS (TAPD dengan DPRD)	26
K 13	Nota Kesepakatan PPAS	26
K 14	Dokumen PPAS telah disepakati	26
K 15	Penyiapan SE tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD	27
K 16	Penetapan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	27
K 17	Standard Satuan Harga	27
K 18	Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun lalu dan semester 1 tahun berjalan	27
K 19	Analisis Standar Belanja	28
K 20	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	28
K 21	Penyusunan RKA SKPD	28
K 22	Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD	37
K 23	Penyempurnaan RKA-SKPD	37
K 24	Penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD	37
K 25	Rancangan Perda tentang APBD	38
K 26	Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat	38
K 27	Berita acara hasil sosialisasi Ranperda APBD kepada kepada Masyarakat	39
K 28	Verifikasi Rancangan Perda APBD	39
K 29	Penyampaian Ranperda APBD kepada Kepala Daerah	39
K 30	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD	39
K 31	Pembahasan Ranperda APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD	40
K 32	Risalah/Berita Acara Pembahasan RanPerda	40
K 33	Keputusan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap RanPerda APBD	41
K 34	Rancangan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tentang Penjabaran APBD	41
K 35	Penyampaian Ranperda APBD yang telah disetujui bersama DPRD & Ranperda Penjabaran APBD kepada Gubernur	41
K 36	Evaluasi Ranperda APBD dan RanPerkada Penjabaran APBD oleh Gubernur	42
K 37	Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD dan RanPerkada Penjabaran APBD	42
K 38	Penyempurnaan Ranperda APBD dengan DPRD dan Penyempurnaan Ranperda Penjabaran APBD	43
K 39	Ketetapan hasil penyempurnaan oleh Pimpinan DPRD (jika hasil evaluasi thd Ranperda APBD adlah tidak sesuai kepentingan umum dan peraturan perundangan)	43

K 40	Laporan Keputusan Pimpinan DPRD dalam sidang paripurna berikutnya	44
K 41	Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD kepada Gubernur	44

KUA PPAS RKA-SKPD

**(KEBIJAKAN UMUM APBD, PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN
SEMENTARA DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD)**

BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI MEDIA



BAGIAN 6

Tentang LGSP



L GSP (Local Governance Support Program) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah merupakan program peningkatan kapasitas (2005-2009) yang didanai oleh United Agency for International Development (USAID). Program ini bertujuan memperkenalkan tata pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di beberapa provinsi terpilih di Indonesia. Prakarsa dan program LGSP ditujukan bagi peningkatan kemampuan pemerintah daerah mitra, organisasi kemasyarakatan, dan media yang mencakup bidang perencanaan dan penganggaran terpadu, pengelolaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, pengelolaan dan mobilisasi sumber daya, serta tata pemerintahan yang partisipatif. Sampai dengan September 2009, LGSP akan bekerja dengan lebih dari 55 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Irian Jaya Barat.

Pengantar



Bahan pelatihan dan pendampingan ini disusun oleh LGSP USAID dengan tujuan untuk memberikan perspektif dan pemahaman yang lebih baik tentang esensi KUA, PPAS, dan RKA-SKPD sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah.

Bahan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu media dalam memahami KUA, PPAS, dan RKA-SKPD sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam proses penyusunan dokumen tersebut, sehingga hasilnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat.

**APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?**

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan system, mekanisme, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

**LANDASAN
HUKUM**

Dalam peraturan dan perundangan baru penyusunan rencana, dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up, dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dari seluruh komponen masyarakat bagi implementasinya.

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

KUA, PPAS, RKA SKPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi penyusunan RAPBD dan APBD. **Penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA SKPD telah diatur secara rinci dan lengkap dalam PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Panduan ini lebih ditujukan untuk mereview proses penyusunan ketiga dokumen tersebut dan keterkaitannya dengan penyusunan dokumen perencanaan.** Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen KUA, PPAS, RKA SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

**KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD**

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

KUA, PPAS, RKA SKPD mempunyai fungsi penting **dan sangat fundamental karena menjembatani proses penerjemahan rencana kedalam penganggaran.** KUA, PPAS, RKA SKPD disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan stakeholder atas tujuan, sasaran dan target perencanaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan konsistensi dokumen perencanaan seperti RKPD, Renja SKPD dengan KUA, PPAS dan RKA SKPD

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

ESSENSI KEBIJAKAN UMUM APBD

1. Disusun oleh TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
2. Disusun berlandaskan pada RKPD
3. Menggunakan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun oleh MENDAGRI sebagai acuan
4. Memuat :
 - Kondisi dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun Lalu
 - Isu dan Permasalahan yang dihadapi
 - Peluang dan Tantangan
 - Strategi dan Kebijakan RKPD
 - Kerangka Ekonomi Makro
 - Daftar dan Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
 - Proyeksi Pendapatan Daerah
 - Alokasi Belanja Daerah
 - Sumber pendanaan

ESSENSI PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA

1. Disusun berdasarkan KUA yang sudah disepakati
2. Disusun TPAD dan dinas bersama PANITIA ANGGARAN DPRD
3. Memuat:
 - Kondisi dan Realisasi Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Tahun Lalu
 - Isu dan Permasalahan yang dihadapi
 - Peluang dan Tantangan
 - Strategi dan Kebijakan APBD
 - Daftar dan Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
 - Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah (termasuk asumsi makro ekonomi, kemampuan fiskal daerah)
 - Prioritas dan Plafond Anggaran menurut bidang pemerintahan (SKPD)- besaran pagu indikatif

ESSENSI RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD

1. Disusun berdasarkan KUA APBD dan PPAS yang sudah disepakati
2. Disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan anggaran kinerja
3. Menggunakan prakiraan maju- perkiraan belanja untuk tahun berikutnya
4. Menggunakan pendekatan kinerja (masukan dan keluaran)
5. Penilaian kewajaran dengan STANDAR ANALISA BELANJA (SAB)
6. Pendekatan ASB : ANALISA STANDAR BELANJA untuk menilai kewajaran BEBAN KERJA dan BIAYA
7. Sesuai dengan TUPOKSI SKPD
8. Menggunakan STANDAR BIAYA
9. Menggunakan TOLOK UKUR KINERJA
10. Terdiri atas belanja langsung (kegiatan) dan belanja tidak langsung (periodik atau non kegiatan)
11. Memuat :
 - Kode Urusan Pemerintahan
 - Kode Organisasi
 - Kode dan Judul Program
 - Kode dan Judul Kegiatan
 - Lokasi Kegiatan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
 - Kelompok Sasaran kegiatan
 - Total dan Rincian Anggaran Belanja langsung
 - Biaya Satuan per Keluaran
 - Jumlah Realisasi dan Perkiraan Belanja kegiatan (n-1, n dan n+1)

Pada penyusunan KUA APBD, perhatian lebih diberikan pada prioritas, komposisi, sinkronisasi dan keseimbangan di antara program berikut pendanaannya serta kesesuaian prioritas program dengan pencapaian tujuan perencanaan RKP, RPJMD, RKP dan Pedoman Penyusunan APBD-MENDAGRI. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penyusunan KUA APBD:

1. siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan KUA APBD (apakah MULTI STAKEHOLDER akan dilibatkan)?
2. bagaimana agenda dan proses dan langkah-langkah pembahasan penyusunan KUAAPBD akan dilakukan?
3. apakah RKP yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun KUA APBD telah memperlihatkan kualitas dokumen seperti yang diharapkan sesuai PERMENDAGRI 13/2006, yaitu memuat:
 - daftar program dan kegiatan per urusan wajib dan pilihan per SKPD
 - tolok ukur dan target kinerja capaian program
 - tolok ukur dan target kinerja capaian keluaran
 - tolok ukur dan target kinerja masukan
 - tolok ukur dan target kinerja hasil

- perkiraan belanja (pagu indikatif) yang dilengkapi dengan biaya satuan per keluaran kegiatan
4. sudah adakah gambaran ketersediaan dana untuk tahun rencana?
 5. apakah kriteria untuk penentuan prioritas alokasi anggaran sudah ada (score dan bobot?) dan disusun berdasarkan VISI, MISI KEPALA DAERAH, RPJMD, Panduan Penyusunan APBD (MENDAGRI), **RKP**, Isu dan permasalahan strategis yang perlu ditangani **dan disepakati bersama antara TPAD dan DPRD?**

Pada penyusunan PPAS, perhatian lebih diberikan kepada analisis prioritas, komposisi dan keseimbangan kegiatan (BEBAN KERJA) dan pendanaannya (BIAYA) di antara berbagai bidang urusan pelayanan wajib dan pilihan dan kesesuaiannya terdapat pencapaian tujuan-tujuan perencanaan (RKPD, RPJMD, pemenuhan SPM, Pedoman Penyusunan APBD- MENDAGRI).

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penyusunan PPAS:

1. siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan PPAS (apakah MULTI STAKEHOLDER akan dilibatkan?)
2. bagaimana agenda dan proses, langkah-langkah pembahasan penyusunan PPAS akan dilakukan?
3. apakah KUA yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun PPAS telah memperlihatkan kualitas dokumen seperti yang diharapkan sesuai PERMENDAGRI 13/2006, yaitu memuat :
 - proyeksi APBD menurut pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
 - daftar program dan kegiatan per urusan wajib dan pilihan per SKPD
 - tolok ukur dan target kinerja capaian program
 - tolok ukur dan target kinerja capaian keluaran kegiatan
 - tolok ukur dan target kinerja masukan kegiatan
 - tolok ukur dan target kinerja hasil kegiatan
 - perkiraan belanja (pagu indikatif) yang dilengkapi dengan biaya satuan per keluaran kegiatan
4. apakah setiap program dan kegiatan didukung oleh data yang akurat dan mutakhir?
5. proporsi belanja langsung dan tidak langsung?

Pada penyusunan RKA SKPD, perhatian lebih diberikan kepada menilai kewajaran masukan dan keluaran; masukan-komposisi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan; biaya satuan per sumber daya; keluaran kegiatan; biaya satuan per keluaran kegiatan.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:

1. siapa yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan RKA-SKPD (apakah FORUM MULTI STEKHOLDER SKPD akan dilibatkan?)
2. apakah RENJA SKPD yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKA SKPD telah sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI 13/2007 yaitu memuat:
 - Daftar Program dan Kegiatan yang diusulkan SKPD
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
3. Apakah informasi berikut ini tersedia?
 - Standar Pelaksanaan Kegiatan (komposisi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan)
 - Biaya satuan per sumber daya digunakan untuk menghasilkan kegiatan
 - Biaya satuan per Keluaran Kegiatan
 - Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (tahun n dan n+1)

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renja SKPD perlu membangun **komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk FORUM MULTISTAKEHOLDER SKPD) untuk mencapai tujuan Renja SKPD** melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?

**LANDASAN
HUKUM**

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Ada 8 (delapan) landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD pada khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

- **Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara**
- **Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah**
- **Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**
- **Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**
- **PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan STANDAR PELAYANAN MINIMAL**
- **PERMENDAGRI No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**
- **SEB Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007**

Undang – Undang No 17/2003 mengatur keharusan SKPD menyusun RKA SKPD, peranan dan kedudukan RKPd dalam kaitannya dengan perumusan KUA APBD dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi kerja (*performance budgeting*) dan prakiraan maju serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Undang- Undang No 32/2004 mengatur tentang SKPD perlu menyusun RKA SKPD yang berisikan program dan kegiatan dan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya.

Undang-Undang No 33/2004 mengemukakan tentang RKPd sebagai dasar penyusunan RAPBD dan RKA SKPD. Undang-Undang ini juga menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja; **disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya (prakiraan maju)**. Ini menunjukkan tentang perlunya RKPd juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan RKA SKPD. **Penyusunan RKA-SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.**

Peraturan Pemerintah No 58/2005 mengatur tentang keharusan Kepala SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah (**Prakiraan Maju**), penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; berpedoman pada KUA APBD, PPAS dan dokumen perencanaan lainnya dan capaian STANDAR PELAYANAN MINIMAL. PP ini mengemukakan bahwa **PPAS merupakan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan penyusunan RKA-SKPD.**

Peraturan Pemerintah No 65/2005 menekankan tentang perlunya RPJMD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA APBD, dan RKA SKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Peraturan Mendagri No 13/2006 yang merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah No 58/2005 telah mengatur secara rinci mekanisme, proses dan prosedur penyusunan penganggaran tahunan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. PERMENDAGRI No 13/2006 mengatur tata cara penyusunan KUA APBD, PPAS, dan secara rinci RKA SKPD: (1) pendekatan penyusunan RKA-SKPD; (2) bagan alir penyusunan RKA SKPD; (3) muatan RKA SKPD; (4) klasifikasi belanja RKA SKPD; (5) format yang digunakan untuk menyusun RKA SKPD; (6) langkah-langkah untuk menyusun RAPBD.

Surat Edaran Bersama MENEG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALABAPPENAS dan MENDAGRI Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2007 mengemukakan tentang Penyusunan KUA, PPAS dan RKA SKPD **pada Tahap PASCA MUSRENBANG yang perlu mengikut sertakan delegasi masyarakat MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA.**

Pada saat ini yang sedang dalam proses pengesahan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 32/2004 dan undang-Undang No 25/2004. Diharapkan PP ini akan dapat memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, ketidak terpaduan, ataupun perbedaan yang timbul dari peraturan perundangan tentang perencanaan daerah.

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Teknokratis, yaitu memenuhi prinsip-prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah (prakiraan maju); Penganggaran Terpadu; Penganggaran Berbasis Prestasi Kerja
- Demokratis dan Partisipatif
- Politis

Teknokratis

- Ada prakiraan maju kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan tahun berikutnya
- Ada proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan
- Ada integrasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD
- **RKA SKPD memuat :**
 - Daftar program dan kegiatan
 - Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
 - Tolok ukur dan target kinerja keluaran
 - Tolok ukur dan target kinerja hasil
 - Pagu indikatif program dan kegiatan
 - Jumlah perkiraan belanja kegiatan pada Tahun Rencana (n), tahun sebelumnya (n-1) dan Tahun berikutnya (n+1)

Demokratis dan Partisipatif

SEB BAPPENAS dan MENDAGRI tentang MUSRENBANG Tahun 2007 mengemukakan tentang perlunya ada delegasi masyarakat PASCA MUSRENBANG yang mengikuti (**mengawal**) proses penyusunan KUA, PPAS dan RKA SKPD **dan kewajiban BAPPEDA untuk memberitahukan masyarakat apabila terdapat/terjadi perubahan-perubahan dari usulan semula dalam RKPD**. Hal ini untuk memastikan bahwa keseluruhan proses penyusunan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta diketahui oleh masyarakat (stakeholder)

- Ada **delegasi masyarakat MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA yang mengikuti** proses pengambilan keputusan **di setiap tahapan** penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD
- Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder dalam pengambilan keputusan
- Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan anggaran

- Ada keterwakilan yang memadai dari kaum perempuan dan kelompok marjinal dalam delegasi masyarakat
- Ada *sense of ownership* masyarakat terhadap KUA, PPAS, dan RKA SKPD
- Ada pelibatan dari media

Politis

Ini bermakna bahwa penyusunan KUA, PPAS dan RKA SKPD melibatkan proses pembahasan dan persetujuan dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD. Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD.

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

**KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD**

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Adapun keluaran utama yang diharapkan dari hasil proses penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD adalah sebagai berikut:

- Nota kesepakatan antara BUPATI/WALIKOTA dengan PIMPINAN DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisikan RKPD dan KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASI TERHADAP SUMBER PEMBIAYAAN
- Nota Kesepakatan antara BUPATI/WALIKOTA dengan PIMPINAN DPRD tentang Prioritas dan Plafond Anggaran yang berisikan RINGKASAN PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN PER SKPD
- RKA SKPD yang mencerminkan proses integrasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD, berisikan:
 - Ringkasan Anggaran, Belanja dan Pembiayaan
 - Rincian Anggaran pendapatan
 - Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
 - **Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan**
 - Rincian Anggaran Penerimaan Pembiayaan
 - Rincian Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Kualitas Kebijakan Umum APBD

- Kesesuaian dan konsistensi antara RKPD dengan KUA APBD
- Keselarasan dengan Pedoman Penyusunan APBD oleh MENDAGRI
- Kejelasan komitmen politis BUPATI/WALIKOTA dan PIMPINAN DPRD untuk mengimplementasikan KUA APBD
- **Kekompakan (*cohesiveness*), komposisi pengorganisasian prioritas program dan alokasi anggaran**
- **Ada dukungan data dan informasi atas penetapan capaian kinerja program dan kegiatan**
- Ada penetapan tolok ukur kinerja yang tepat bagi setiap program dan kegiatan
- Keselarasan antara pendapatan daerah dengan belanja daerah
- Keselarasan (alignment) antara pendapatan SKPD dengan belanja SKPD
- Proses pembahasan KUA APBD dilakukan dengan keikutsertaan delegasi masyarakat MUSRENBANG

Kualitas PPAS

- Kesesuaian dan **konsistensi** antara RKPD, KUA, dengan PPAS
- Dukungan data dan informasi atas penetapan capaian kinerja program dan kegiatan
- Ada penjelasan yang lengkap terhadap pengambilan keputusan PPAS
- Proses pembahasan KUA APBD dilakukan dengan keikutsertaan dan mendapatkan masukan dari delegasi masyarakat MUSRENBANG

Kualitas RKA SKPD

- Kesesuaian dan **konsistensi** antara RKPD, Renja SKPD, KUA dengan PPAS
- **Kelengkapan informasi yang termuat dalam RKA SKPD:**
 - Kode Urusan Pemerintahan
 - Kode Organisasi
 - Kode dan Judul Program
 - Kode dan Judul Kegiatan
 - Lokasi Kegiatan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
 - Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
 - Kelompok Sasaran kegiatan

- Total dan Rincian Anggaran Belanja langsung
- Biaya Satuan per Keluaran
- Jumlah Realisasi dan Perkiraan Belanja kegiatan (n-1, n dan n+1)
- Keikutsertaan delegasi masyarakat MUSRENBANG dalam pembahasan dan persetujuan RKA SKPD

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?

Penyusunan KUA, PPAS DAN RKA SKPD telah diatur sepenuhnya dalam PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

LANDASAN
HUKUM

KUA dapat dikatakan merupakan formalisasi politis dari dokumen RKPD. KUA APBD merupakan kompromi pendekatan teknokratis, demokratis partisipatif dengan pendekatan politis. RKPD yang telah dihasilkan melalui terutama proses teknokratis dan partisipatif dipertemukan dengan pendekatan politis melalui pembahasan dengan DPRD (dimana DPRD mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi konstituen-RESES DPRD). **Perumusan KUA perlu didukung dengan kriteria penentuan prioritas program dan alokasi anggaran.**

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD

PPAS lebih menfokuskan pada penetapan BEBAN KERJA dan BIAYA dari masing-masing SKPD yang sesuai untuk melaksanakan program dan kegiatannya; kesesuaian peruntukan belanja dan sumber pendapatan SKPD.

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

RKA SKPD lebih menitikberatkan pada rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sesuai RKPD, dan TUPOKSI SKPD. Penyusunan RKA SKPD terkait erat dengan STANDAR PELAYANAN MINIMAL

**KERANGKA
ANALISIS KUA,
PPAS, RKA SKPD**

KUA, PPAS, DAN RKA SKPD mencakup perencanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi:

- **Pelayanan umum**
- **Ketertiban dan keamanan**
- **Ekonomi**
- **Lingkungan hidup**
- **Perumahan dan fasilitas umum**
- **Kesehatan**
- **Pariwisata dan budaya**
- **Pendidikan**
- **Perlindungan social**

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH**Urusan Wajib**

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Pemberdayaan Perempuan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
13. Sosial
14. Tenaga Kerja
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
18. Pemuda dan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Pemerintahan Umum
21. Kepegawaian
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Komunikasi dan Informatika

Urusan Pilihan

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Energi dan Sumberdaya Mineral
4. Pariwisata
5. Kelautan dan Perikanan
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Sumber: Lampiran A I Permendagri No 13/2006

Untuk kepentingan di atas, perlu dipahami adanya table-tabel dari PERMENDAGRI No 13/2006 yang merupakan kerangka utama bagi penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD.

- Lampiran A.X tentang FORMAT KUA APBD
- Lampiran A. XI tentang FORMAT PPAS
- Lampiran A. XIV tentang FORMAT RKA-SKPD
- Lampiran A.XII A. tentang Nota Kesepakatan antara KDH dengan PIMPINAN DRPD tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- Lampiran A.XII.B Nota Kesepakatan antara KDH dengan PIMPINAN DPRD tentang Prioritas dan Plafond Anggaran.

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

KERANGKA
ANALISIS KUA,
PPAS, RKA SKPD

**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Bagan 1 Memperlihatkan alur proses penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD yang dikembangkan oleh LGSP-USAID mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku tentang perencanaan daerah.

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang digambarkan di sini yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan KUA, PPAS, dan RKA SKPD yang terpadu.

Alur proses teknokratis dan strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur proses partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning events* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap *public participatory event*, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.

Alur legislasi dan politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Peraturan Kepala SKPD tentang KUA, PPAS, dan RKA SKPD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?

LANDASAN
HUKUM

PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD

INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD

KERANGKA
ANALISIS KUA,
PPAS, RKA SKPD

BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD

HANDOUT
PENDUKUNG

Tahap Persiapan

- K 1 Pembentukan Tim Anggaran Pemda (TAPD)
- K 2 Pedoman Penyusunan APBD dari Mendagri

Tahap Penyusunan KUA

- K 3 Penyusunan Rancangan KUA
- K 4 Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah
- K 5 Penyampaian Rancangan KUA kepada DPRD
- K 6 Pokok-pokok Pikiran DPRD
- K 7 Pembahasan KUA (TAPD dengan DPRD)
- K 8 Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD
- K 9 Dokumen Kebijakan Umum APBD

Tahap Penyusunan PPAS

- K 10 Penyusunan Rancangan PPAS
- K 11 Penyampaian Rancangan PPAS kepada DPRD
- K 12 Pembahasan PPAS (TAPD dengan DPRD)
- K 13 Nota Kesepakatan PPAS
- K 14 Dokumen PPAS telah disepakati

Tahap Penyusunan RKA-SKPD

- K 15 Penyiapan SE tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD oleh TAPD
- K 16 Penetapan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
- K 17 Standard Satuan Harga
- K 18 Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun lalu dan semester 1 tahun berjalan
- K 19 Analisis Standar Belanja
- K 20 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- K 21 Penyusunan RKA SKPD
- K 22 Pembahasan RKA-SKPD oleh TAPD
- K 23 Penyempurnaan RKA-SKPD
- K 24 Penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD

Tahap Penetapan APBD

- K 25 Rancangan Perda tentang APBD
- K 26 Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat
- K 27 Berita acara hasil sosialisasi Ranperda APBD kepada Masyarakat
- K 28 Verifikasi Rancangan Perda APBD
- K 29 Penyampaian Ranperda APBD kepada Kepala Daerah
- K 30 Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD
- K 31 Pembahasan Ranperda APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
- K 32 Risalah/Berita Acara Pembahasan RanPerda

- K 33 Keputusan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap RanPerda APBD
- K 34 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tentang Penjabaran APBD
- K 35 Penyampaian Ranperda APBD yang telah disetujui bersama DPRD & Ranperda Penjabaran APBD kepada Gubernur
- K 36 Evaluasi Ranperda APBD dan RanPerkada Penjabaran APBD oleh Gubernur
- K 37 Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD dan RanPerkada Penjabaran APBD
- K 38 Penyempurnaan Ranperda APBD dengan DPRD dan Penyempurnaan Ranperda Penjabaran APBD
- K 39 Ketetapan hasil penyempurnaan oleh Pimpinan DPRD (jika hasil evaluasi thd Ranperda APBD adalah tidak sesuai kepentingan umum dan peraturan perundangan)
- K 40 Laporan Keputusan Pimpinan DPRD dalam sidang paripurna berikutnya
- K 41 Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD kepada Gubernur
- K 42 Penetapan Kepala Daerah tentang Perda APBD & PerKada Penjabaran APBD
- K 43 Peraturan Daerah tentang APBD
- K 44 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- K 45 Penyampaian Perda APBD dan PerKada Penjabaran APBD kepada Gubernur

**APA ITU RENJA
KUA, PPAS, RKA
SKPD?**

**LANDASAN
HUKUM**

**PRINSIP-PRINSIP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

**KELUARAN
UTAMA KUA,
PPAS, RKA SKPD**

**INDIKATOR
KUALITAS KUA,
PPAS, RKA SKPD**

**KERANGKA
ANALISIS KUA,
PPAS, RKA SKPD**

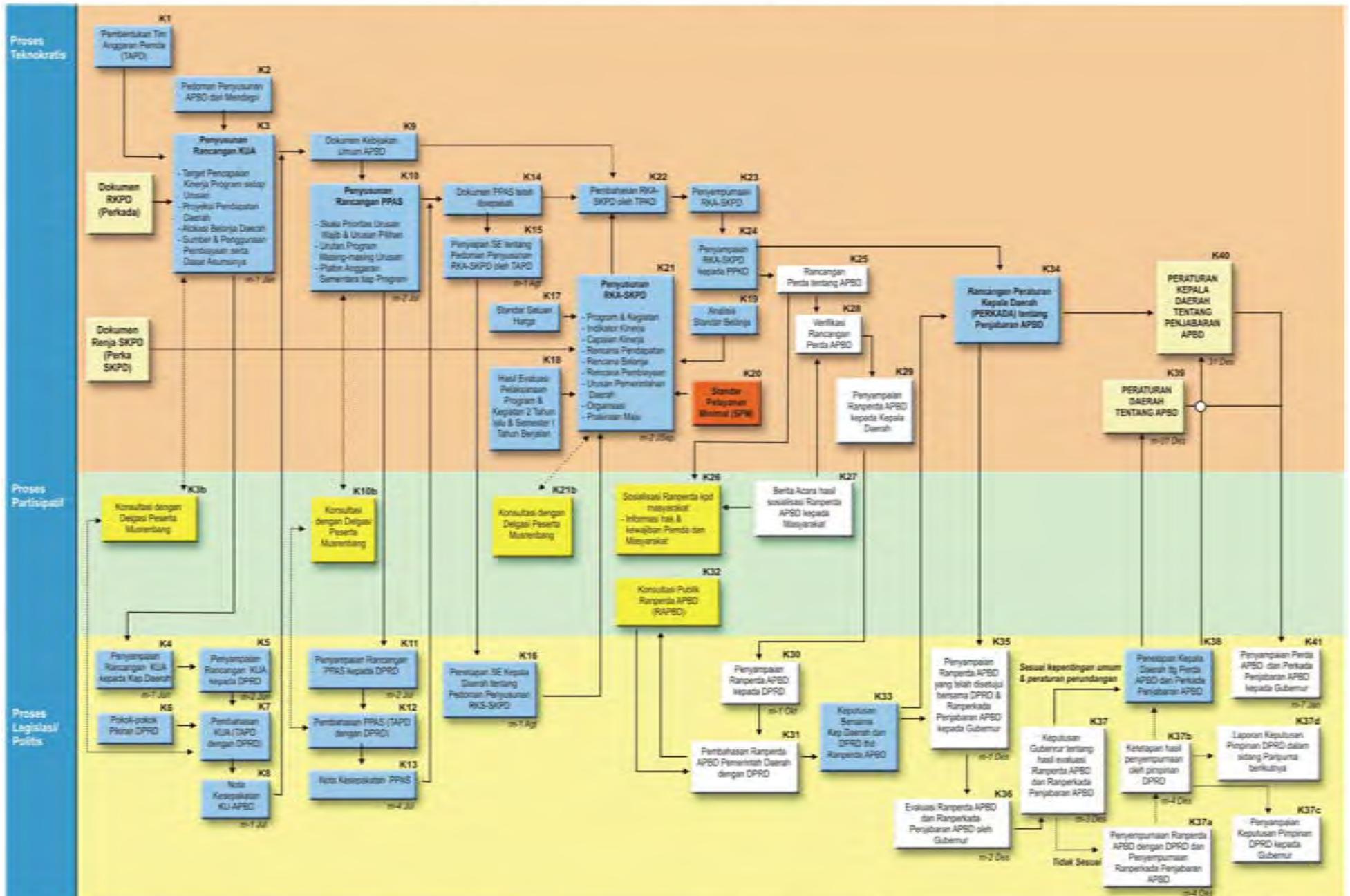
**BAGAN ALIR
PROSES
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

**STEP BY STEP
PENYUSUNAN
KUA, PPAS, RKA
SKPD**

**HANDOUT
PENDUKUNG**

- 1) Tinjauan Proses Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD: Beberapa Pemikiran Awal
- 2) Analisis Pendapatan
- 3) Paradigma Baru Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Inisiasi Modus Jurnalisme
- 4) Inisiasi Modus Baru: Jurnalisme Perencanaan dan Penganggaran
- 5) Tinjauan Akhir Pengesahan Anggaran
- 6) Elemen-elemen Anggaran Kinerja

PENYUSUNAN DOKUMEN KUA, PPAS, RKA-SKPD DAN PENETAPAN APBD



KETERANGAN: Proses Penetapan APBD Proses partisipatif Proses penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD

K : Kode Kotak Kegiatan/Langkah untuk Proses Penyusunan KUA, PPAS, RKA-SKPD dan Penetapan APBD
m : Batas waktu penyelesaian pada minggu ke...



Media memiliki kompetensi kuat untuk berperanserta atau memberi perhatian khusus dalam proses penyusunan RAPBD, karena tahap penyusunan RAPBD sudah berkaitan dengan rencana penggunaan sumber-sumber keuangan daerah, sehingga sangat rawan terhadap konflik kepentingan berbagai pihak.

Kebutuhan mencermati proses penganggaran didasarkan atas pemahaman bahwa **anggaran adalah amanah rakyat yang ditiptikan kepada legislatif dan eksekutif untuk kesejahteraan rakyat**, dimana peran media adalah sebagai diseminator, komunikator, mediator, dan pengotrol kebijakan agar tepat sasaran.

Untuk dapat berperan efektif dalam mengkritisi substansi APBD beserta proses penyusunannya, maka media perlu membekali diri dengan kemampuan cara membaca APBD, baik format dan strukturnya, menemukan titik-titik kritis dalam penganggaran, maupun kejelian dalam menangkap bentuk-bentuk distorsi yang terdapat dalam APBD.

Beberapa **hal kunci** yang perlu dicermati media, antara lain :

- ❖ **aspek pendapatan**; menyangkut kewajaran besaran, komposisi, dan sumber pendapatan, kecenderungan pertumbuhan, dan kebijakan yang terkait pendapatan
- ❖ **aspek hukum**; apakah ditemukan kejanggalan yang menyangkut konsistensi hukum, apakah ada pos dan jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah proses penganggarnya sudah memenuhi panduan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku
- ❖ **aspek ekonomi keuangan**; apakah ditemukan kejanggalan seperti alokasi yang lebih besar dari standar indeks dan harga yang ditentukan, duplikasi anggaran, pengulangan alokasi anggaran setiap tahun, kewajaran antara besaran biaya pengadaan dengan pemeliharaan, apakah ada perbedaan harga satuan untuk jenis dan type barang yang sama, dan sebagainya
- ❖ **aspek sosial**; apakah ditemukan alokasi yang berlebihan/menyolok, apakah konsisten antara pos kegiatan dengan penerima manfaat, apakah program dan kegiatan ditujukan untuk kalangan marginal atau tidak
- ❖ **aspek kebijakan**; apakah anggaran yang dialokasikan memiliki kesesuaian dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah

Kontribusi media dalam proses penyusunan RAPBD adalah sebagaimana tergambar dalam bagan alir penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD

Maksud	Menyiapkan rancangan kebijakan daerah berkaitan dengan APBD yang meliputi urusan dan program, target pencapaian kinerja, sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.
Tujuan	Agar ada kejelasan landasan penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD.
Keluaran	<ul style="list-style-type: none">• Urusan dan program prioritas daerah• Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah.• Proyeksi pendapatan daerah, alokasi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya.
Prinsip-prinsip	<ul style="list-style-type: none">• Program-program yang akan dilaksanakan Pemda diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah,• Asumsi-asumsi yang digunakan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah.• Mempertimbangkan dengar pendapat masyarakat dari hasil musrenbang

Penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD termasuk format yang digunakan dapat dilihat pada PERMENDAGRI-13 Tahun 2006.

Kegiatan konsultasi dengan delegasi peserta musrenbang merupakan kegiatan yang sangat strategis ditinjau dari sudut kepentingan demokratisasi dan akuntabilitas publik. Kegiatan ini dilaksanakan setelah rancangan KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersusun guna menjaring pertimbangan dari perwakilan masyarakat.

Delegasi peserta musrenbang yang dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi ini adalah delegasi/ utusan yang berasal dari forum SKPD dan delegasi musrenbang kecamatan, yang berperan untuk menjaga kesinambungan antara Renja SKPD/RKPD dengan KUA.



Rancangan KUA disusun oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), mengacu pada dokumen RKPD dan berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

Media perlu mencermati dan mengkritisi agar proses perumusan KUA mengacu pada RKPD yang sudah disepakati, dan mencegah masuknya usulan-usulan baru yang prosesnya diluar mekanisme musrenbang. Hasil rumusan rancangan KUA perlu dikonsultasikan dengan delegasi peserta musrenbang RKPD yang berfungsi mengawal hasil-hasil kesepakatan musrenbang. Dalam hal ini media diharapkan dapat memantau apakah proses konsultasi dengan delegasi peserta musrenbang dilaksanakan atau tidak.

Kalau terjadi perbedaan atau perubahan antara hasil kesepakatan musrenbang dengan rancangan KUA, sebaiknya dapat diinformasikan kepada masyarakat beserta penjelasannya melalui peran media.

Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan antara TAPD dengan panitia anggaran DPRD.

Materi yang menjadi bahan pembahasan, diantaranya adalah :

- § Perumusan isu-isu sektoral serta kaitannya dengan isu daerah dan isu-isu nasional yang menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan.
- Keterkaitan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dan konsistensinya terhadap RKPD.
- Prioritas-prioritas kegiatan dan program apa yang mendesak dan butuh penanganan segera.
- Sinkronisasi/keterpaduan program/kegiatan antar sektor di daerah dan dengan program pembangunan sektoral nasional.
- Indikator kinerja yang akan dicapai dari setiap usulan program/kegiatan dan pertimbangan efisiensi dan efektifitas program/kegiatan, serta keterkaitannya dengan pencapaian SPM
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam analisis kemampuan keuangan daerah, rancangan kerangka ekonomi, perumusan arah kebijakan keuangan daerah, serta perumusan pagu indikatif dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana keterkaitannya dengan kerangka ekonomi nasional dan perkiraan kemampuan keuangan nasional.
- Konsistensi program/kegiatan yang diusulkan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta realisasi permasalahan daerah dan harapan masyarakat.



Rancangan KUA yang telah disusun TAPD melalui tahapan konsultasi dengan delegasi peserta musrenbang disampaikan kepada DPRD dan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama TAPD dengan DPRD. Proses pembahasan KUA perlu dipantau media dan hasil-hasil kesepakatannya serta penjelasan-penjelasan yang penting perlu disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan ada kepedulian terhadap rencana pembangunan di daerahnya.

Kegiatan ini tidak diatur dalam peraturan perundangan, namun terkandung dalam SKB Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Mendagri pada tahap Paska Musrenbang dengan tujuan terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD serta tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta musrenbang.

Kegiatan Konsultasi dengan delegasi peserta musrenbang merupakan kegiatan yang sangat strategis ditinjau dari sudut kepentingan demokratisasi dan akuntabilitas publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahap penyusunan rancangan PPAS oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka menjangkau masukan dan pertimbangan dari perwakilan masyarakat atau konsultasi dengan wakil-wakil dari masyarakat.

Delegasi peserta musrenbang yang dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi ini adalah delegasi/ utusan yang berasal dari forum SKPD dan delegasi musrenbang kecamatan, yang berperan untuk menjaga konsistensi antara Renja SKPD/RKPD dan KUA dengan PPAS.



Rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) juga masih disusun oleh TAPD mengacu pada hasil kesepakatan KUA dan berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Hasil rumusan rancangan KUA juga perlu dikonsultasikan dengan delegasi peserta musrenbang RKPD yang berfungsi mengawal hasil-hasil kesepakatan musrenbang. Dalam hal ini media diharapkan dapat berkontribusi untuk mensosialisasikan keputusan hasil pembahasan TAPD dengan delegasi peserta musrenbang, serta penjelasan-penjelasan yang diperlukan kepada masyarakat, terkait PPAS.

Pembahasan rancangan PPAS dilaksanakan antara TAPD dengan panitia anggaran DPRD.

Materi yang menjadi bahan pembahasan, diantaranya adalah :

- Pengecekan hasil kesepakatan sebelumnya dalam KUA terutama pada butir-butir penting mengenai ukuran capaian kinerja yang direncanakan, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi-asumsi yang digunakan.
- Capaian sasaran program yang direncanakan,
- Dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif/plafon sementara untuk mencapai sasaran program,
- Prioritas program dan plafon anggaran.
- Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program.



Rancangan PPAS yang telah disusun TAPD melalui tahapan konsultasi dengan delegasi peserta musrenbang disampaikan kepada DPRD dan selanjutnya dilakukan pembahasan bersama TAPD dengan DPRD.

Media dapat berkontribusi untuk memantau jalannya proses pembahasan PPAS, serta menginformasikan hasil-hasil kesepakatan serta penjelasan-penjelasan yang penting kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui mengenai jalannya proses pembahasan, apa yang menjadi prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan dan seberapa besar anggaran yang akan dialokasikan daerah untuk setiap sektor pembangunan, serta langkah atau tahapan proses berikutnya setelah ditetapkannya PPAS menjadi PPA.

Setelah Ranperda APBD selesai dibuat oleh PPKD, maka untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, dalam rangka memperoleh masukan dan dukungan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang direncanakan.

Kegiatan sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk menginformasikan hak dan kewajiban pemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD.

Kegiatan sosialisasi diatur melalui Permendagri No.13/2006.



Rancangan Perda tentang APBD disusun oleh PPKD berdasarkan RKA-SKPD yang telah dilengkapi oleh masing-masing SKPD mengacu pada PPAS yang telah ditetapkan menjadi PPA.

Rancangan Perda APBD sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah untuk dikritisi dan mendapat masukan melalui bantuan media, termasuk juga menginformasikan apa-apa yang menjadi hak maupun kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah sehubungan dengan APBD yang direncanakan.

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada KUA serta PPA yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Pembahasan Ranperda lebih menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, maka dapat meminta RKA-SKPD yang bersangkutan kepada kepala daerah untuk menjelaskan lebih lanjut.

Pembahasan Ranperda APBD sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD, yaitu dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, yaitu :

- Pembicaraan tahap pertama, meliputi penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna tentang penyampaian ranperda APBD
- Pembicaraan tahap kedua, berupa pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD yang berasal dari Kepala Daerah dan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
- Pembicaraan tahap ketiga meliputi pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau rapat Pansus yang dilakukan bersama-sama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- Pembicaraan tahap keempat meliputi :
 - 1) pengambilan keputusan dalam rapat paripurna
 - 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan (apabila dipandang perlu).



Ranperda yang telah disusun oleh PPKD selanjutnya oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Kegiatan pembahasan Ranperda APBD merupakan kewenangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait fungsi anggaran DPRD. Jalannya proses pembahasan, argumentasi, dan kesepakatan-kesepakatan bersama antara Pemda dengan DPRD perlu dipantau dan dicermati oleh unsur media serta diinformasikan kepada masyarakat dalam rangka pengawalan.

Sebelum pembahasan/pembicaraan tahap kedua, maka setelah dilakukan pembicaraan tahap pertama DPRD wajib mensosialisasikan (konsultasi publik) kepada masyarakat luas mengenai rancangan Perda APBD untuk memperoleh masukan, dengan melibatkan seluruh perwakilan stakeholders, termasuk Tokoh Masyarakat, Ormas, Perguruan Tinggi, LSM dan Pengusaha/asosiasi pengusaha.

Hasil forum konsultasi publik dijadikan sebagai masukan bagi DPRD dalam rangka pembahasan berikutnya.



Pada tahapan proses pembahasan di DPRD ini, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban DPRD untuk menjaring masukan dari masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan amanat UU-10/2004 pasal 54, untuk itu DPRD dapat menyelenggarakan konsultasi publik dengan masyarakat. Media dapat berperan penting untuk memfasilitasi maupun menyebarkan jalannya konsultasi publik, mencatat kesepakatan-kesepakatan dan mengawalinya dalam proses perumusan RAPBD selanjutnya.

Perda tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan gubernur, selanjutnya ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala daerah serta diundangkan dalam lembaran daerah dan diberi nomor dan tanggal pengundangan serta ditandatangani Sekretaris Daerah, sehingga menjadi dokumen yang resmi dan sah.



APBD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, merupakan dokumen resmi dan sah (legal) sebagai acuan penggunaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan untuk tahun yang direncanakan.

Agar masyarakat dapat memantau dan mengkritisi pelaksanaan APBD sekaligus mengawal untuk meminimasi penyimpangan, maka media sangat berperan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum mengenai ringkasan APBD, khususnya informasi tentang lokasi kegiatan setiap sektor, besaran anggaran setiap sektor serta indikator kinerja setiap kegiatan untuk setiap sektor.

ABSTRACT

GUIDELINE FOR TRAINING AND FACILITATION OF MEDIA IN LOCAL DEVELOPMENT PLANNING

The Guideline for Training and Facilitation of Media in Local Development Planning is prepared in relation to the LGSP- USAID technical assistance in the area of participatory local development planning.

In accordance with the LGSP objectives, the guideline is aimed at strengthening role, function and capacity of media in local development planning. This includes greater media involvement and contribution in (1) analyzing and evaluating local plan and budget; (2) enhancing public awareness and education in local development planning issues; (3) enhancing public participation in local development planning and budgeting process; (4) in developing infrastructure for good local governance

The specific objective of the guideline is the following; (1) to provide media with better understanding of perspective and process of participatory local development planning; (2) to enhance the role and contribution of media in the local planning and budgeting preparation process; (3) to define the position and role of media in different stages and levels of local plan development process; (4) to enhance the level and quality of journalistic professionalism in the area of local development planning.

It is expected that this guideline will result in better quality of news analysis and evaluation related to local development planning issues; the creation of civil society organizations that actively contributed to local development policy and plan preparation and implementation; the development of a good local governance; and development of a healthy and effective relationship between media and key actors involved in local development planning.

Basic approach used in developing this guideline is the following: (1) to define the contribution of media in each type of local development plan preparation; (2) to use the framework of LAW 25/2004 on National Development Planning System that requires Local development plan preparation should be based on technocratic, participatory, political, bottom-up and top down planning; (3) to give emphasis on strengthening of local planning perspective, process and quality of planning products; (4) to use as framework the LAW 32/2004 especially in relation to the classification of government functions, obligatory and optional services in all plans preparation to ensure there is consistency between long , medium and short term planning and annual program and budget; (5) to be a 'loose leaf document' to keep the training materials up-to-date, encourage local initiatives and to ensure sustain development of the guideline; (6) to produce a practical guideline.

The guideline consists of 6 (six) main sections as the following:

- Section 1 Preparation of RPJP Daerah
- Section 2 Preparation of RPJM Daerah
- Section 3 Preparation of RENSTRA SKPD
- Section 4 Preparation of RKPD
- Section 5 Preparation of RENJA SKPD
- Section 6 Preparation of KUA, PPAS and RKA-SKPD

TERMS USED

RPJP Daerah	Regional Long Term Development Plan is a Local Government (LG) Statutory Plan with 20 years perspective; consists of vision, mission, and general direction of local development.
RPJM Daerah	Regional Medium Term Development Plan is a LG statutory plan document with 5 years perspective, consists of Bupati/Walikota vision, mission, agenda and its translation into local development strategy, policies, five year program and indicative resource envelope and budget resources allocation for each LG Work Unit and sector.
RENSTRA SKPD	Local Government Work Unit (Agency) Strategic Plan is a LG statutory plan document with 5 years perspective; consists of LG Work Unit vision, mission, agenda, five-year program and indicative budget.
RKPD	Regional Government Annual Work Program and Budget is LG statutory plan document for 1 year period; consists of regional economic framework, program, activities, performance indicator, indicative budget ceiling for each LG Work Unit.
RENJA SKPD	LG Work Unit Annual Work Program; consists of LG Work Unit program, activities and indicative budget ceiling; developed based on the results of Musrenbang (Multi stakeholders development consultation forum) and SKPD Forum (bottom-up planning process).
KUA	Local Government General Budget Policy prepared by LG Budget Team; developed based of RKPD; consists of previous year program and budget realization; statement of development issues and problems, challenges and opportunities; strategy and policy of LG work program; macro economic framework; target and indicator of program and activities; LG revenue projection; budget resources allocation and sources of fund.
PPAS	Local Government Indicative Annual Budget Ceiling developed based on KUA; prepared by LG Budget Team and DPRD (Local Council) Budget Team; consist previous year program and budget realization; strategy and policy of LG Annual Budget; list, target and indicator of program and activities to be undertaken; projection of revenue, expenditure and local finance; priority and ceiling of budget for each obligatory services and SKPD.
RKA SKPD	LG Work Unit Annual Work Budget prepared by SKPD; consists of name, title, location of program and activity proposed by SKPD; indicator of program targets, inputs, outputs and short term outcome and budget for each resource (personnel, materials, equipments) and total budget for activity.
DPRD	Regional House of Representatives or Local Parliament.
CSO	Civil Society Organizations.

RINGKASAN

BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI MEDIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Panduan Pelatihan dan Pendampingan bagi Media dalam Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk mendukung bantuan teknis LGSP-USAID dalam bidang perencanaan pembangunan daerah partisipatif.

Sesuai dengan tujuan LGSP, panduan ini bertujuan untuk memperkuat peran, fungsi, dan kemampuan media dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut mencakup keterlibatan dan kontribusi media yang lebih besar dalam: (1) melakukan analisis dan evaluasi rencana dan anggaran daerah; (2) memperdalam kesadaran publik sekaligus meng-edukasi publik dalam isu-isu perencanaan pembangunan daerah; (3) memperluas partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah; (4) pembangunan prasarana bagi tata pemerintahan daerah yang baik.

Adapun tujuan khusus dari panduan ini adalah: (1) memberikan pemahaman yang lebih baik kepada media mengenai perspektif dan proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif; (2) memperbesar peran dan kontribusi media dalam proses perencanaan daerah dan penyusunan anggaran daerah; (3) menjelaskan posisi dan peran media dalam setiap tahapan dan tingkatan yang berbeda dari proses penyusunan rencana daerah; (4) meningkatkan kemampuan dan kualitas profesionalisme jurnalistik dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Panduan ini diharapkan mampu menghasilkan kualitas analisis dan evaluasi berita yang lebih baik berkaitan dengan isu-isu perencanaan pembangunan daerah; mewujudkan organisasi masyarakat sipil yang aktif memberikan kontribusi pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan daerah; pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang baik; dan membangun hubungan yang sehat dan efektif antara media dan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan dasar yang digunakan dalam penyusunan panduan ini adalah: (1) mendefinisikan kontribusi media dalam setiap tahap penyusunan rencana pembangunan daerah; (2) disusun berdasarkan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan bahwa penyusunan rencana pembangunan harus berdasarkan perencanaan yang teknokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*; (3) menekankan pentingnya memperbaiki perspektif, proses, dan kualitas produk-produk perencanaan; (4) menggunakan kerangka berpikir UU 32/2004 terutama yang berkaitan dengan pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan dalam semua penyusunan rencana untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan jangka panjang, menengah, program tahunan dan anggaran; (5) dimaksudkan sebagai "dokumen tumbuh" untuk mendorong tumbuhnya prakarsa daerah dan memastikan perkembangan yang berkelanjutan dari panduan ini; (6) dimaksudkan sebagai sebuah panduan praktis.

Panduan ini terdiri dari 6 (enam) bagian utama yaitu:

- Bagian 1- Penyusunan RPJP Daerah
- Bagian 2 - Penyusunan RPJM Daerah
- Bagian 3 - Penyusunan RENSTRA SKPD
- Bagian 4 - Penyusunan RKPD
- Bagian 5 - Penyusunan RENJA SKPD
- Bagian 6 - Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD

PENJELASAN PENGGUNAAN
BAHAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

PERANAN MEDIA
DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. BAHAN ini ditujukan bagi memenuhi kebutuhan akan referensi dasar yang lengkap dan mutakhir bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
2. BAHAN ini ditujukan untuk membantu meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengetahuan media untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah
3. BAHAN ini terdiri atas 6 bagian yaitu RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD dan KUA, PPAS, RKA SKPD, dimana masing-masing bagian pada dasarnya berdiri sendiri dan dapat digunakan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah. Organisasi penyajian BAHAN ini disatukan dengan tujuan agar pengguna dapat melihat interrelasi antar dokumen rencana dan perlunya konsistensi kerangka penyusunan dokumen rencana mulai dari RPJPD hingga RKA SKPD.
4. Untuk kepentingan penyusunan rencana, setiap BAGIAN memberikan informasi tentang rincian langkah-langkah (STEP BY STEP) yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana; diikuti dengan penjelasan untuk masing-masing langkah bagi memudahkan pemahaman atas tujuan, maksud langkah tersebut.
5. HANDOUT disediakan pada bagian akhir dari setiap BAGIAN bagi individu yang ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci atas langkah-langkah tertentu proses penyusunan rencana
6. Setiap BAGIAN mengandung 3 alur penyusunan rencana yaitu alur teknokratis, alur partisipatif, dan alur politis dan legislasi. Ini ditujukan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak eksekutif, legislatif dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan rencana.
7. Pada alur teknokratis diharapkan eksekutif lebih besar peranannya, sementara pada alur partisipatif organisasi masyarakat sipil diharapkan lebih berperan dan pada alur legislasi/politis diharapkan lebih besar peranan DPRD.
8. Memberikan penjelasan tentang kemungkinan peranan dan kontribusi media dalam langkah berkaitan proses penyusunan rencana



PENDAHULUAN

Media merupakan unsur penting dan strategis dalam menentukan serta mendorong proses perubahan ke arah pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Sasaran menuju pencapaian “good local governance” akan ditentukan juga oleh sejauhmana peran dan kontribusi media dalam proses-proses tersebut, termasuk juga pada tahapan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang meliputi aspek-aspek :

- Wawasan ke depan (*visionary*);
- Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*);
- Partisipasi masyarakat (*participation*);
- Tanggung gugat (*accountability*);
- Supremasi hukum (*rule of law*);
- Demokrasi (*democracy*);
- Profesionalisme & kompetensi (*professionalism and competency*);
- Daya tanggap (*responsiveness*);
- Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- Desentralisasi (*decentralization*);
- Kemitraan dengan dunia usaha swasta & masyarakat (*private sector and civil society partnership*);
- Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
- Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*); dan
- Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*).

Adapun jenis dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang wajib dimiliki oleh setiap daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan adalah:

- RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
- Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
- Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- KUA (Kebijakan Umum APBD)
- PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara)
- RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- APBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD merupakan kelengkapan dokumen yang harus disiapkan dalam rangka proses penyusunan APBD.

Peran pers dan media dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui pemantauan, investigasi, advokasi, pengumpulan pendapat masyarakat (pooling), evaluasi, kritik/komentar, pengawalan dan penyebarluasan informasi serta memberi ruang bagi masyarakat banyak dalam menyampaikan opini. Peran dan fungsi media terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain:

- **Meningkatkan wawasan masyarakat** dengan cara mensosialisasikan visi dan misi pembangunan baik di tingkat nasional, regional (provinsi), maupun lokal (kabupaten/kota), serta berbagai kebijakan pokok yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.
- **Meningkatkan kesadaran masyarakat** terhadap makna dan tanggung jawab pembangunan di daerahnya, sehingga mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan/pelaksanaan/pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
- **Meningkatkan keterbukaan dan transparansi** dengan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai informasi dan agenda daerah berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan, serta produk-produk perencanaan dan penganggaran yang menyangkut kepentingan publik.
- **Meningkatkan partisipasi dan kontribusi pemikiran masyarakat** melalui kegiatan jaring aspirasi (pooling pendapat) masyarakat berkaitan dengan isu-isu strategis daerah, harapan masyarakat, dan substansi-substansi rencana pembangunan daerah.

- **Meningkatkan akuntabilitas proses perencanaan** dengan mempublikasikan pelaksanaan proses-proses perencanaan serta hasil-hasil rumusan materi rencana dan kebijakan daerah untuk dikritisi dan ditanggapi masyarakat lainnya.
- **Meningkatkan demokratisasi dan komitmen daerah** terhadap pengurangan kesenjangan melalui evaluasi, kritik, dan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan yang terkait kepentingan masyarakat marginal dan masalah kesenjangan pembangunan.
- **Meningkatkan supremasi hukum** melalui investigasi, pengkajian, dan advokasi terhadap proses perumusan kebijakan publik dan penganggaran daerah.
- **Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah** dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan melalui pemantauan dan pengawasan, kajian dan kritik/masukan, sosialisasi/penyebarluasan informasi seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan serta hasil-hasil yang dicapai.

Komitmen dan kualitas media/jurnalisme dalam mencermati perencanaan dan penganggaran, didasarkan atas beberapa elemen, antara lain:

- kebenaran informasi
- loyalitas jurnalis yang didedikasikan kepada masyarakat
- kedisiplinan dalam melakukan verifikasi
- independensi
- komitmen memantau kekuasaan
- mengadvokasi masyarakat yang ter-marginalisasi
- orientasi pada "public interest"
- cara penyajian yang memikat dan relevan
- analisis yang proporsional dan komprehensif
- berpegang pada hati nurani

Agar fungsi dan peranan media tersebut dapat dimainkan dengan lebih efektif dan efisien, maka media perlu memahami dengan baik proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, materi/substansi pokok berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta payung hukum yang menjadi acuannya.

Aspek legalitas yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi partisipasi publik dan peran media dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain:

- Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 9 s/d 12, pasal 16 s/d 18, dan pasal 22 s/d 27.
- Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 150-151)
- Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (pasal 52 dan pasal 53)
- Peraturan Pemerintah No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (pasal 12 dan pasal 13)
- Peraturan Pemerintah No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (pasal 17)
- Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 4, 5, 10,12,15, 23)
- Peraturan Pemerintah No 3/2007 tentang LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD kepada Masyarakat (pasal 27)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006
- SEB Meneg PPN/Kepala BAPPENAS dan MENDAGRI Nomor 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang 2007

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang No.25/2004 menganut prinsip-prinsip:

- **Teknokratis (Strategis)**; merupakan perencanaan strategis ke masa depan yang disusun secara sistimatis berdasarkan teknis perencanaan.
- **Demokratis dan Partisipatif**; proses pengambilan keputusan dan konsensus melibatkan stakeholder luas dan intensif, kesetaraan unsur pemerintah (Government Organizations) dan unsure non pemerintah (Non Government Organizations) dalam proses.

- **Politis**; proses melalui konsultasi yang melibatkan masyarakat dan kekuatan politis (kepala daerah dan DPRD) dan legalisasi melalui PERDA.
- **Bottom-up planning**; mengakomodasi kepentingan/aspirasi pembangunan masyarakat dan daerah, sesuai kondisi dan potensi daerah.
- **Top-down planning**; sinergi dan konsistensi dengan perencanaan lebih tinggi, memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan nasional, dan komitmen terhadap tujuan pembangunan global.

TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Bahan Pelatihan dan Pendampingan ini adalah:

- Memberikan kepada media tentang perspektif, wawasan dan proses perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh
- Meningkatkan peranan dan kontribusi media dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah
- Mencoba memperjelas posisi, kedudukan dan peranan media dalam proses penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan daerah
- Meningkatkan kualitas profesionalisme media dalam bidang perencanaan dan penganggaran daerah

SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatnya kualitas pemberitaan perencanaan dan penganggaran daerah
- Terwujudnya organisasi masyarakat sipil yang peduli dan aktif berkontribusi terhadap perencanaan pembangunan daerahnya
- Meningkatnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran daerah
- Terwujudnya good local governance
- Terwujudnya hubungan yang sehat dan efektif antara media dengan aktor-aktor pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan daerah

DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.
- 6) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
- 8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD
- 9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- 10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 12) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.
- 13) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.
- 14) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- 15) Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 16) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

- 17) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 18) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 19) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program.
- 20) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- 21) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
- 22) Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 23) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 24) Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 25) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
- 26) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 27) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 28) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 29) MTEF atau Medium Term Expenditure Framework/Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 30) Kerangka Ekonomi Jangka Menengah Daerah merupakan kerangka prakiraan terhadap besaran pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan.
- 31) Kerangka Pendanaan (*Resource Envelope*) merupakan gambaran kemampuan pendanaan daerah untuk membiayai belanja pemerintah.
- 32) Kerangka fiskal daerah adalah kerangka prakiraan terhadap pendapatan, hibah, pinjaman dan belanja daerah.
- 33) Proyeksi fiskal daerah adalah proyeksi terhadap pendapatan, hibah, pinjaman dan belanja daerah.
- 34) Target fiskal daerah adalah sasaran pendapatan dari sumber-sumber keuangan daerah.
- 35) Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal daerah.
- 36) Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PROLEGDA adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
- 37) Prakiraan maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 38) Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

- 39) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 40) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 41) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
- 42) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
- 43) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
- 44) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 45) Prioritas dan Plafon Anggaran, yang selanjutnya disingkat dengan PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
- 46) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 47) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
- 48) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.
- 49) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
- 50) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan.
- 51) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami issue dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.
- 52) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
- 53) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- 54) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
- 55) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai

- upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- 56) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
 - 57) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil Musrenbang.
 - 58) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
 - 59) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.
 - 60) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.
 - 61) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
 - 62) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM.
 - 63) CBO adalah singkatan dari Community based Organization atau Kelompok Masyarakat.
 - 64) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat.

Ilustrasi Topik dan Headlines dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

WIDJONO NGOEDIJO,
LGSP PLANNING ADVISOR

Catatan berikut ini mencoba untuk memberikan panduan bagi pengembangan peran dan strategi media dalam kaitannya dengan penyusunan berbagai tingkatan perencanaan pembangunan daerah. Ilustrasi topik dan 'headlines' diberikan untuk memberikan gambaran tentang esensi dan ruang lingkup isu pembangunan daerah untuk setiap dokumen rencana.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Strategi media dalam RPJP- Daerah adalah mendorong terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik; meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kemungkinan berbagai ancaman fisik, lingkungan, sosial, politik, keamanan dan kelembagaan yang dihadapi yang diperkirakan berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan berbagai peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang; memberikan tajuk rencana berupa evaluasi dan kritisi atas rancangan RPJP Daerah dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan opini dan harapannya atas RPJP Daerah

Ilustrasi Topik dan Headlines

- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan RPJP Daerah
- Skenario pembangunan daerah 20 tahun mendatang
- Potret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Realisasi Target Capaian Millennium Development Goals
- Kesenjangan pembangunan antar daerah
- Krisis ketersediaan air bersih
- Krisis energi listrik
- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan migrasi
- Degradasi lingkungan kawasan taman nasional
- Degradasi lingkungan kawasan lindung
- Penanganan Illegal logging, illegal sand mining, illegal fishing
- Ketidak mampuan pengendalian rencana pemanfaatan ruang
- Pencemaran perairan dan sungai
- Abrasi pantai dan degradasi kawasan pesisir
- Kerusakan serius terumbu karang
- Penanganan kawasan tertinggal
- Penanganan kawasan perbatasan
- Penanganan kawasan rawan pangan dan bahaya kelaparan
- Pemekaran kabupaten/kota
- Kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah
- Kerjasama internasional dalam pembangunan daerah
- Degradasi kawasan Pertambangan
- Tanggung jawab korporat dalam pembangunan masyarakat sekitar
- Regulasi penataan dan pemanfaatan ruang
- Sumber daya kelautan yang semakin berkurang
- Sistem transportasi regional semakin memburuk

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Strategi Media dalam RPJM Daerah adalah mendorong direalisasikannya visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih pada masa kampanye pemilihan kedalam program lintas sektoral dan lintas kewilayahan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun kedepan; mengemukakan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan kinerja penyelenggaraan berbagai urusan pelayanan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; perubahan atau reformasi birokrasi kelembagaan yang dilakukan untuk mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan; pertanggung jawaban Kepala Daerah Terpilih selama masa kepemimpinannya.

Ilustrasi Topik dan Headlines

- Sosok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Sosok Pimpinan DPRD
- Agenda dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
- Pandangan Kepala Daerah Terpilih pada masalah pengentasan kemiskinan dan gender
- Pandangan Politik DPRD terhadap kinerja pembangunan daerah
- Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan RPJM Daerah
- Potret kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme
- Penanganan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- Penguatan peran perempuan dalam pembangunan
- Efisiensi organisasi perangkat daerah
- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
- Penurunan ekonomi biaya tinggi
- Penghilangan hambatan perdagangan antar daerah
- Perlindungan atas kesejahteraan ibu dan anak
- Keadilan dan kesetaraan gender
- Penanganan bahaya narkoba dan HIV/AIDS
- Penanganan bencana alam
- Kinerja urusan pelayanan wajib pendidikan
- Kinerja urusan pelayanan wajib kesehatan
- Kinerja urusan pelayanan investasi dan penanaman modal

- Penanganan kriminalitas dan keamanan
- Realisasi target capaian Standar Pelayanan Minimal
- Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Strategi Media dalam RENSTRA SKPD adalah mendorong direalisasikannya visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dalam tujuan, strategi, kebijakan, program pelayanan SKPD dalam kurun waktu 5 tahun kedepan; mengemukakan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD terutama yang bertanggung jawab untuk urusan pelayanan wajib prioritas seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, pengembangan investasi dan penanaman modal; memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan opini tentang kepuasannya terhadap pelayanan yang diterimanya.

Ilustrasi Topik dan Headlines

- Pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan RENSTRA SKPD
- Pelibatan dunia usaha dalam program pelayanan SKPD
- Alokasi Pagu Anggaran bagi program prioritas RENSTRA SKPD
- Potret Forum Multi stakeholders SKPD
- Potret kinerja pelayanan SKPD
- Target dan realisasi capaian program SKPD
- Peringkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan SKPD
- Strategi dan Program Pengentasan Kemiskinan
- Penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme
- Penguatan peran perempuan dalam pembangunan
- Efisiensi organisasi perangkat daerah
- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah
- Penurunan ekonomi biaya tinggi
- Penghilangan hambatan perdagangan antar daerah
- Perlindungan atas kesejahteraan ibu dan anak
- Penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir

- Keadiliran dan kesetaraan gender
- Penanganan bahaya narkoba dan HIV/AIDS
- Penurunan angka kriminalitas
- Penanganan bencana alam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Strategi media dalam RKPD adalah mendorong diwujudkannya dan direalisasikan program, kegiatan dan anggaran pembangunan daerah yang mengutamakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Musrenbang RKPD dan Forum Konsultasi SKPD; memberikan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan tahun lalu; mencermati dan mengevaluasi besaran alokasi pagu anggaran APBD untuk urusan pelayanan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan dan hajat hidup masyarakat.

Ilustrasi Topik dan Headlines

- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan RKPD
- Arah, Kebijakan, Program Prioritas RKPD
- Potret Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Lalu
- Opini masyarakat terhadap RKPD Tahun depan
- Keberpihakan RKPD pada pengentasan kemiskinan
- Program RKPD untuk penanganan gizi balita buruk
- Program RKPD untuk pengurangan angka kematian ibu dan bayi baru lahir
- Program RKPD untuk pendidikan anak keluarga miskin
- Program RKPD untuk prasarana dan sarana kesehatan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Strategi Media dalam RENJA SKPD adalah mendorong terdapatnya program dan kegiatan penyediaan pelayanan SKPD yang efisien, efektif dan responsif kepada masyarakat; mengemukakan hasil pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelayanan SKPD tahun lampau dan secara berkala terutama bagi SKPD yang bertanggung jawab atas pelayanan wajib dan prioritas; mengemukakan pooling pendapat- opini masyarakat atas pelayanan SKPD yang diterimanya ; mencermati kewajaran alokasi pagu anggaran bagi penyediaan pelayanan SKPD

Ilustrasi Topik dan Headlines

- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan FORUM STAKEHOLDERS SKPD dalam perumusan RENJA SKPD
- Prioritas dan Alokasi Pagu Anggaran pelayanan wajib SKPD
- Potret kinerja pelayanan SKPD Tahun Lalu
- Opini masyarakat terhadap kualitas dan responsiveness pelayanan SKPD
- Penanganan keluhan pelayanan SKPD
- Transparansi proses perencanaan pelayanan SKPD
- Meningkatnya drop-out sekolah dilingkungan anak keluarga miskin
- Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dan IMB

Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafond Anggaran Sementara Rencana Kerja Anggaran SKPD dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah

Strategi Media dalam KUA, PPAS, RKA dan RAPBD adalah mendorong terwujudnya Kebijakan Umum Anggaran yang berpihak kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai hasil Musrenbang RKPD; mengemukakan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja APBD tahun lalu; memberikan evaluasi dan kritisi sejauh mana KUA dan PPAS berpihak kepada masyarakat miskin, kelompok perempuan dan marjinal; mencermati dan mengevaluasi apakah ada ketimpangan alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung (publik); mencermati dan mengevaluasi kewajaran standar biaya satuan kegiatan dan proporsi komponen biaya yang digunakan di RKA SKPD; menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan opini tentang KUA dan PPAS sebelum disusun menjadi RAPBD dan dibahas oleh DPRD.

Ilustrasi Topik dan Headlines

- Keberpihakan KUA kepada masyarakat miskin
- Rencana Alokasi anggaran APBD bagi masyarakat miskin
- Belanja publik untuk prasarana dan sarana
- Kemana APBD akan dibelanjakan tahun depan?
- Pandangan masyarakat terhadap KUA dan PPAS
- Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan KUA dan PPAS

- Debat DPRD dan Eksekutif dalam pembahasan KUA dan PPAS
- Potret APBD Tahun depan
- Peningkatan pendapatan asli daerah
- Berapa belanja kesehatan per kapita penduduk?
- Berapa belanja pendidikan per kapita penduduk?
- Target dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal dalam urusan pelayanan wajib
- Efektifkah belanja SKPD kesehatan?
- Berapa belanja untuk kesehatan ibu dan anak?
- Berapa belanja untuk penanganan FLU BURUNG?
- Transparansi diseminasi RAPBD
- Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi APBD